

DINAMIKA MENUJU SMK 4.0

Strategi SMK Berkolaborasi di Era Disrupsi

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 tidak dapat dielakkan lagi. Ia telah mengubah segala aspek kehidupan. Dunia industri dan tenaga kerja menjadi sektor yang terpengaruh oleh revolusi industri 4.0. Lantas, sejauh mana kesiapan kita dalam menghadapi perubahan ini? Se jauh mana kesiapan sektor pendidikan kita dalam menyiapkan SDM untuk menghadapi tantangan disrupsi pada era industri 4.0?

Buku memuat dinamika SMK dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Buku ini memaparkan sejarah perkembangan SMK dari masa kolonial, orde baru, orde lama, hingga masa revitalisasi SMK. Gagasan-gagasan mengenai arah SMK dalam menghadapi perkembangan teknologi, teknologi informasi, dan tantangan disrupsi dibahas dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga memuat gagasan mengenai kurikulum hingga manajemen SMK dalam menghadapi revolusi industri 4.0.



REZPY GEIZLA INDONESIA

REZPY GEIZLA INDONESIA

Jalan Pinguin III Blok CE No.1 - Bintaro Jaya

Email : rezpygeizla_indonesia@yahoo.com

ISBN 978-623-91166-0-4



9 786239 116804

DINAMIKA MENUJU SMK 4.0

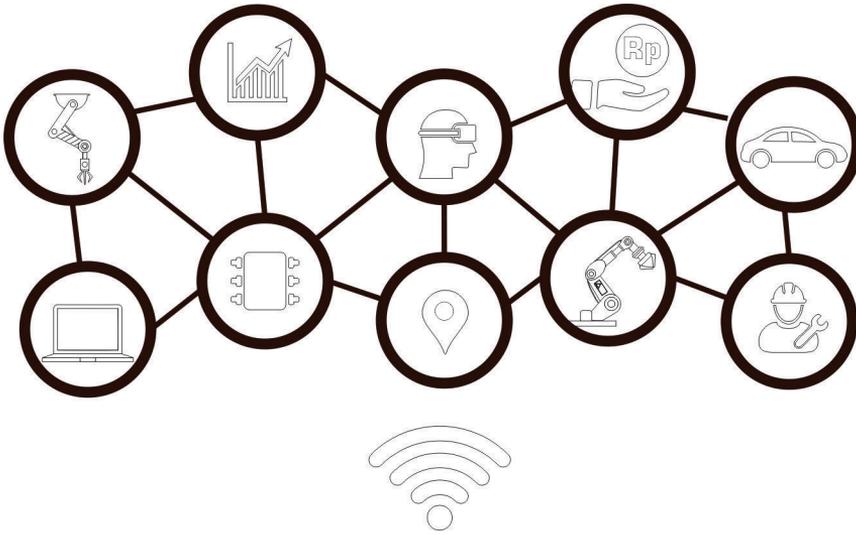
ARIE WIBOWO KHURNIAWAN



DINAMIKA MENUJU SMK 4.0

Strategi SMK Berkolaborasi di Era Disrupsi

ARIE WIBOWO KHURNIAWAN



DINAMIKA MENUJU **SMK 4.0**

Strategi SMK Berkolaborasi di Era Disrupsi

ARIE WIBOWO KHURNIAWAN

DINAMIKA MENUJU SMK 4.0

Strategi SMK Berkolaborasi di Era Disrupsi

Penulis

Arie Wibowo Khurniawan

Editor

Langgeng Prima Anggradinata, Triyanto, & M. Iqbal Tawakal

Desain sampul

Langgeng Prima Anggradinata

Infografik

Langgeng Prima Anggradinata

Tata Letak

Rangga Dwi Anggradinata
Langgeng Prima Anggradinata

Penerbit

Rezpy Geizla Indonesia

Jalan Pinguin III Blok CE No.1 Sektor 3 Bintaro Jaya
Tangerang Selatan, Indonesia
email: rezpygeizla_indonesia@yahoo.com

Cetakan pertama, Juli 2019

Prakata

Revolusi industri 4.0 tidak dapat dielakkan lagi. Ia telah mengubah segala aspek kehidupan. Dunia industri dan tenaga kerja menjadi sektor yang terpengaruh oleh revolusi industri 4.0. Lantas, sejauh mana kesiapan kita dalam menghadapi perubahan ini? Sejauh mana kesiapan sektor pendidikan kita dalam menyiapkan SDM untuk menghadapi tantangan disrupsi pada era industri 4.0?

Buku yang memuat dinamika SMK dalam menghadapi revolusi industri 4.0 memaparkan sejarah perkembangan SMK dari masa kolonial, orde baru, orde lama, hingga masa revitalisasi SMK. Gagasan-gagasan mengenai arah SMK dalam menghadapi perkembangan teknologi, teknologi informasi, dan tantangan disrupsi dibahas dalam buku ini. Selain itu, buku ini juga memuat gagasan mengenai kurikulum hingga manajemen SMK dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Penulis berharap, gagasan-gagasan yang tertuang dalam buku ini menjadi ikhtiar untuk menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Buku ini masih terbuka untuk selalu disempurnakan. Masukan yang konstruktif merupakan hal yang berharga bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pendidikan Indonesia!

Jakarta, 1 Juli 2019

Arie Wibowo Khurniawan

DAFTAR ISI

Prakata	ii
Bab 1 Dari Abad ke-18 ke Nawacita untuk Revitalisasi SMK	1
Bab 2 SMK Zaman Now	15
Bab 3 Tantangan SMK di Era Disrupsi	29
Bab 4 Lulusan SMK di Era Indonesia 4.0	41
Bab 5 Pembaruan SMK Berkelanjutan	59
Bab 6 SMK 4.0	71
Bab 7 SMK dan Wirausaha	85
Bab 8 Pembentukan Ekosistem Bilingual di SMK	99
Bab 9 Aktivasi Karakter Bekerja Siswa SMK	111
Bab 10 Simbiosis SMK dan Industri	129
Bab 11 <i>Good SMK Governance</i>	147
Bab 12 Kemandirian Finansial SMK	153
Biografi Penulis	161

BAB 1

DARI ABAD KE-18 KE NAWACITA UNTUK REVITALISASI SMK

“Pendidikan tidak hanya dilihat sebagai proses *transfer of knowledge* dan *transfer of value*, melainkan juga dilihat sebagai kontestasi kekuasaan yang bekerja di antara pihak-pihak yang berkepentingan [terkait dengan] pemikiran-pemikiran tentang pendidikan, kebijakan-kebijakan, dan pembentukan pengetahuan. Pendidikan sebagai sebuah proses kebudayaan tidak lepas dari kekuasaan yang bekerja di dalamnya.¹”

--Yosef Dedy Pradipto (2007)

Yosef Dedy Pradipto mengingatkan kita bahwa kekuasaan berperan dalam menentukan arah pendidikan. Mengapa ia harus dapat menentukan arah pendidikan? Hal itu dilakukan untuk memantapkan kekuasaannya. Mengapa sebuah negara (boleh kita katakan sebagai pemegang kekuasaan) harus membuat sistem pendidikan tertentu? Itu dilakukan agar terlahir generasi-generasi muda yang mampu menjawab tantangan masa depan sehingga kekuasaan (dan kedaulatan)

¹ Dalam buku *Belajar Sejati vs Kurikulum Nasional* karya Yosef Dedy Pradipto (2007).

negara berjalan dengan persisten!

Kita dapat melihat hubungan antara kekuasaan dan pendidikan dari sejarah pendidikan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sejarah sekolah kejuruan telah merentang sepanjang 150 tahun. Dari rentang yang panjang itu, tentu saja banyak dinamika, perubahan, dan perkembangan. Namun, hal yang tidak pernah berubah adalah bahwa sekolah kejuruan selalu didirikan untuk memenuhi kebutuhan industri.

Jika kita melihat sejarah perkembangan sekolah kejuruan, kita dapat melihat hubungan antara sekolah kejuruan dengan kekuasaan (pemerintah yang berkuasa). Pemerintah pada setiap periode selalu memiliki andil dalam menentukan arah pendidikan. Kekuasaan (pemerintah) selalu percaya bahwa pendidikan merupakan cara agar dapat hidup secara mandiri dan untuk menjawab masalah masa kini dan tantangan di masa depan.

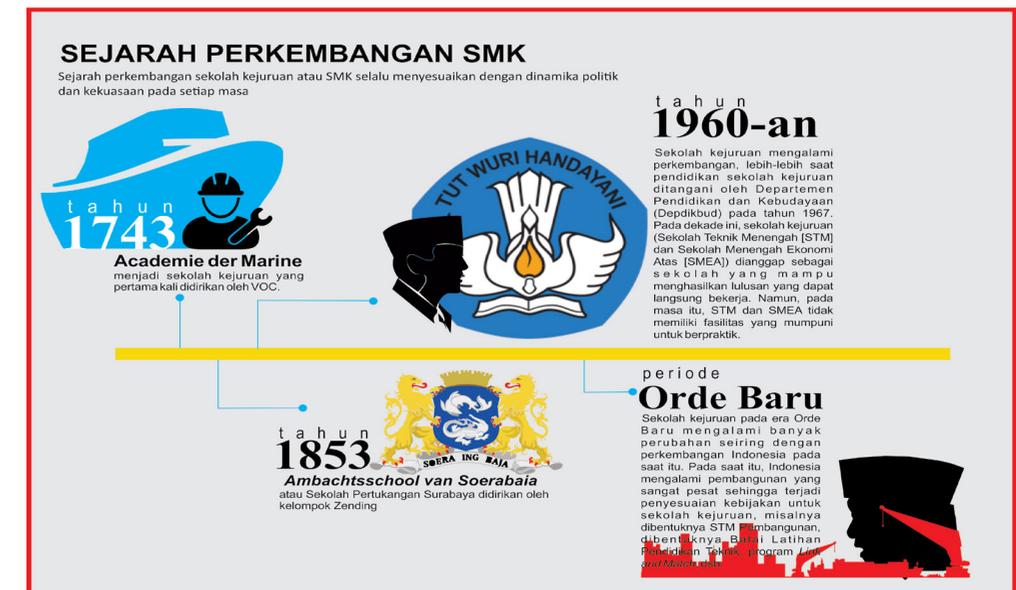
Kita tidak dapat memisahkan antara (1) sekolah kejuruan, (2) kebutuhan industri, (3) kekuasaan (pemerintah) dari sebuah siklus pendidikan, khususnya pendidikan kejuruan. Tentu saja, argumentasi ini bukan tanpa dasar. Sejarah sekolah kejuruan telah membuktikan bahwa terdapat pertautan antara ketiga hal tersebut. Baiklah, kita mulai dari sekolah kejuruan pertama di Indonesia, yakni Academie der Marine.

Sejarah Sekolah Kejuruan pada Masa Kolonial

Academie der Marine menjadi sekolah kejuruan yang pertama kali didirikan oleh VOC pada tahun 1743. Sekolah tersebut didirikan untuk memenuhi kebutuhan VOC (penguasa perdagangan saat itu) di bidang pelayaran. Para calon perwira pelayaran dididik di sekolah ini selama enam tahun. Di akademi ini, mereka mempelajari navigasi, matematika, menulis, menggambar, agama, berkuda, anggar, dansa, dan berbagai macam bahasa (Belanda, Melayu, Latin, Malabar, dan Persia). Pada tahun tersebut, industri pelayaran membutuhkan perwira yang memiliki kecakapan-kecakapan. Tentu saja, akademi ini dibuat untuk kepentingan perdagangan VOC agar mereka mampu melakukan kegiatan perdagangan sekaligus ekspansi ke penjuru nusantara. Namun, sekolah tersebut hanya bertahan selama dua belas tahun. Pada tahun 1755, sekolah tersebut pun ditutup.

Setelah VOC mengalami kebangkrutan di akhir abad ke-18, pendirian sekolah

kejuruan dirintis kembali oleh Belanda. Pada tahun 1853, Ambachtsschool van Soerabaia atau Sekolah Pertukangan Surabaya didirikan oleh kelompok Zending, sebuah organisasi pekabaran Injil. Gubernur Jendral, Duymaer van Twist sangat menyetujui pendirian sekolah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meski dikelola oleh swasta, sekolah tersebut didukung oleh pemerintah kolonial Belanda. Sekolah tersebut ditujukan untuk kaum Indo-Eropa dan Belanda saja. Syarifah Majid, dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa Ambachtsschool van Soerabaia sangat erat kaitannya dengan perkembangan industri di Surabaya.² Latar belakang berdirinya sekolah tersebut ialah berdasarkan kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Pada tahun 1870, kebutuhan tenaga kerja tersebut semakin bertambah seiring dengan berkembangnya industri di Surabaya.



Gambar 1.1 “Sejarah Perkembangan SMK”

Dalam penelitiannya, Syarifah Majid juga menyebutkan bahwa pada tahun 1905, saat politik etis telah diterapkan (pada 1901), sekolah kejuruan sejenis dibuka untuk kalangan bumiputra melalui surat keputusan nomor 17664 tanggal 14 Oktober 1905 yang dikeluarkan Direktur Pendidikan Agama dan Kerajinan. Dengan demikian,

² Lihat Majid, S. (2016) “Ambachtsschool Surabaya Tahun 1853-1942” <http://repository.unair.ac.id/33189/>.

pendidikan semakin berkembang di Surabaya dan diikuti oleh Batavia dan Semarang saat Ambachtsschool dibuka di sana. Selain Ambachtsschool, terdapat pula sekolah kejuruan lainnya pada masa kolonial, misalnya Ambacht Leergang dan Technische School.

Dari uraian di atas, kita dapat melihat hubungan yang telah disebutkan di awal bahwa sekolah kejuruan selalu berhubungan dengan kebutuhan industri dan kekuasaan pada suatu masa. Hubungan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sekolah kejuruan itu sendiri. Pada masa awal kemerdekaan, hubungan ini amat terlihat jelas.

Dinamika SMK pada Masa Orde Lama hingga Orde Baru

Pada masa awal kemerdekaan, sekolah kejuruan mengalami stagnasi. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada masa awal kemerdekaan, negara menghadapi masalah ekonomi. Masalah ekonomi tersebut hadir karena kondisi politik negara pada saat itu tidak stabil. Pada dekade 1950-an, Indonesia mengalami perang pascakemerdekaan dan berbagai pemberontakan di daerah. Hal ini mengakibatkan terpecahnya perhatian negara dalam menata pendidikan, khususnya sekolah kejuruan. Pada masa itu, negara belum sepenuhnya menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur dan industri. Hal ini membuat sekolah kejuruan tidak memiliki perkembangan yang signifikan.

Industri di Indonesia semakin meningkat setelah memasuki era orde baru dan memasuki periode Pelita (Pembangunan Lima Tahun) I dan II, terutama saat modal asing mulai masuk ke Indonesia. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 7%. Hal ini menyebabkan peningkatan kebutuhan industri secara signifikan. Namun, pada saat itu, sekolah kejuruan masih belum matang sehingga belum menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selain kualitas lulusan sekolah kejuruan belum mumpuni, hubungan antara pendidikan dan industri pun belum bersinergi. Akhirnya, lulusan sekolah kejuruan hanya mampu mengisi 50% dari kebutuhan industri.

Pada awal dimulainya Pelita I (Pembangunan Lima Tahun Pertama), pemerintah bermaksud mengadakan pembaruan dan perbaikan pada sistem pendidikan nasional, terutama pada Sekolah Teknologi Menengah. Pada periode 1970-1971,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan untuk menyelesaikan dua belas instalasi Pendidikan Teknik secara bertahap yang disebut sebagai "Proyek Perintis Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan" dengan lama belajar empat tahun. Kemudian, secara berturut-turut tanggal 1 Juli 1971 proyek perintis Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan di Jakarta dan tanggal 7 Juli 1971 proyek perintis Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan yang berlokasi di Semarang diresmikan oleh Presiden RI kedua, Soeharto. Demikian juga Proyek Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan yang berlokasi di Yogyakarta diresmikan pada tanggal 29 Juli 1972. Selanjutnya, pada tahun 1973, Pemerintah menyelesaikan delapan proyek perintis STM pembangunan di Indonesia, yaitu STM Pembangunan Jakarta, STM Pembangunan Semarang, STM Pembangunan Bandung, STM Pembangunan Yogyakarta, STM Pembangunan Surabaya, STM Pembangunan Pekalongan, STM Pembangunan Temanggung, STM Pembangunan Ujung Pandang, Proyek Perintis STM Pembangunan Surabaya. Kemudian, Balai Latihan Pendidikan Teknik pun dibangun oleh pemerintah dengan dana yang berasal dari pinjaman World Bank. Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah membuat program Peningkatan Mutu Pengajaran Teknik (PMPT). Program ini bertujuan meningkatkan mutu guru di STM Pembangunan dan BLPT. Segala upaya yang dilakukan pemerintah dari periode Pelita I sampai dengan Pelita V bertujuan mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah pada saat itu.

Pada Pelita IV, sekolah kejuruan menemui berbagai masalah. Pada masa itu, guru dan tenaga pendidik belum tersedia secara maksimal. Selain itu, mutu program pendidikan dan program pembinaan di sekolah kejuruan masih rendah. Kesempatan belajar para siswa pun masih sempit. Masalah lainnya adalah fasilitas di sekolah yang belum memadai. Tentu saja, pemerintah membuat strategi-strategi untuk memecahkan persoalan tersebut yang direalisasikan pada Pelita V.

Pada Pelita V, Depdikbud mengeluarkan program-program yang diharapkan dapat memecahkan persoalan yang terdapat dalam pendidikan kejuruan. Program-program itu adalah terkait dengan (1) lembaga pendidikan, siswa, dan ketenagaan, (2) pembiayaan, (3) bantuan hibah dan pinjaman luar negeri, (4) ikatan kerja sama dengan luar negeri, (5) kerja sama dengan industri dalam negeri, (6) pengembangan proyek-proyek, dsb.

Program-program yang telah dilaksanakan pada periode Pelita sebelumnya telah dilaksanakan. Sekolah kejuruan pun telah mengalami perkembangan. Namun, saat memasuki Pelita VI, dunia telah mengalami perubahan ke arah globalisasi. Pendidikan kejuruan dihadapkan kembali oleh tantangan globalisasi, perdagangan bebas, dan teknologi informasi. Dengan demikian, pemerintah menyadari bahwa sekolah kejuruan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Depdikbud mengubah Nomenklatur STM dan SMEA menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada saat itu, pemerintah mengimplementasikan kurikulum 1994—atau dapat pula disebut sebagai kurikulum berbasis kompetensi di tahun 2004. Pada masa Pelita VI, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro mengeluarkan program *Link and Match* dan Pendidikan Sistem Ganda—sebagai pengejawantahan dari program *Link and Match*. Pendidikan Sistem Ganda mengharuskan siswa untuk belajar di luar lingkungan sekolah, yakni di lingkungan industri. Dengan demikian, pendidikan SMK menjadi lebih efisien dan menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Selain itu, Pendidikan Sistem Ganda ditujukan untuk menjalin kerja sama dengan industri. Meski pada dasarnya keterlibatan industri dalam pendidikan kejuruan telah dimulai sejak tahun 1984, pada periode ini, hubungan pendidikan kejuruan dan industri semakin kuat dengan diterapkannya Pendidikan Sistem Ganda tersebut.

Nawacita dan Revitalisasi SMK

Setelah orde baru berganti dan Indonesia memasuki masa reformasi, pendidikan kejuruan semakin berkembang secara kuantitatif. Tentu saja, kebutuhan tenaga kerja dalam bidang industri semakin meningkat setelah masa orde baru. Namun, seiring dengan berkembangnya jumlah SMK, jumlah lulusan dari SMK semakin meningkat. Peningkatan jumlah lulusan SMK tersebut tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja. Pada akhirnya, banyak lulusan SMK yang tidak terserap lapangan pekerjaan. Berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2016, sebanyak 12,5% atau 1,52 juta lulusan SMK menganggur. Hal ini merupakan angka terbesar jika melihat lulusan yang menganggur di jenjang pendidikan yang lain, misalnya SMA sebesar 9,6% atau 1,95 juta, diploma sebesar 6,4% atau 0,22 juta, dan lulusan universitas sebesar 5,1% atau 0,56 juta.

Atas dasar itu, pada tanggal 9 September 2016, Presiden RI ketujuh, Joko Widodo, mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa perhatian pemerintah kepada pendidikan vokasi semakin kuat.



Gambar 1.2 "Kronologi Revitalisasi SMK di Era Joko Widodo"

Pemerintah menempatkan SMK menjadi salah satu prioritas dari program kerja. Dalam nawacita, pemerintah berfokus membangun manusia Indonesia ke arah yang lebih maju dengan meningkatkan produktivitas rakyat Indonesia sehingga mereka mampu bersaing dengan dunia internasional, khususnya dalam bidang industri. Untuk menciptakan situasi tersebut, pemerintah membangun *science and technopark* di kawasan politeknik dan meningkatkan sarana dan prasarana dengan teknologi mutakhir di jenjang pendidikan SMK.

Pemerintah berupaya untuk merevitalisasi SMK. Sebagai langkah awal, pada tanggal 9 September 2016, Presiden menerbitkan Inpres No. 9/2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Empat hari kemudian, tanggal 13

September 2016, Rapat terbatas digelar dan dihadiri oleh jajaran Kabinet Kerja.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menyadari bahwa Indonesia telah memasuki era persaingan. Dalam persaingan itu, pemerintah optimis bahwa Indonesia memiliki kekuatan-kekuatan yang harus digunakan. Indonesia memiliki kekuatan yang kuat karena lebih dari 60% penduduknya adalah anak muda. Pemerintah optimis dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia; bertekad untuk membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja yang banyak dihuni oleh pekerja berlatar pendidikan SD dan SMP menjadi tenaga kerja yang terdidik dan terampil, yakni pekerja lulusan SMK. Pemerintah juga melihat banyak sektor industri yang mengalami kekurangan tenaga kerja lulusan SMK. Misalnya, bidang perikanan dan kelautan membutuhkan 3,3 juta tenaga kerja; sebanyak 300.000 tenaga kerja dibutuhkan oleh bidang pertanian; bidang pariwisata pun membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit, yakni 600.000 tenaga kerja.

Pemerintah melihat bahwa SMK masih lemah secara kuantitatif dan kualitatif. Dengan demikian, pemerintah bertekad untuk memperkuat pendidikan kejuruan, khususnya SMK, agar lulusan SMK mampu terserap lapangan pekerjaan. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat hubungan SMK dengan industri. Pemerintah juga melihat bahwa masyarakat Indonesia memandang pendidikan kejuruan, khususnya SMK, sebagai pendidikan kelas dua untuk penduduk menengah ke bawah. Stigma itu perlu dikikis dengan kampanye nasional.

Pada dasarnya, payung hukum untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikan vokasi telah tertuang di PP No. 41/2015 dari Kementerian Perindustrian. Dalam PP tersebut, pada pasal 3, pembangunan industri nasional didukung oleh tenaga kerja dan manajerial. Tenaga kerja yang mendukung pembangunan industri nasional ialah tenaga kerja yang lahir dari pendidikan kejuruan, pelatihan industri berbasis kompetensi, dan pemagangan industri. Dengan demikian, melalui Inpres No. 9/2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran kabinatnya dan kepala daerah untuk melakukan langkah-langkah dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan pendidikan kejuruan.

Dalam inpres tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus (1) membuat peta jalan pengembangan SMK; (2) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*); (3)

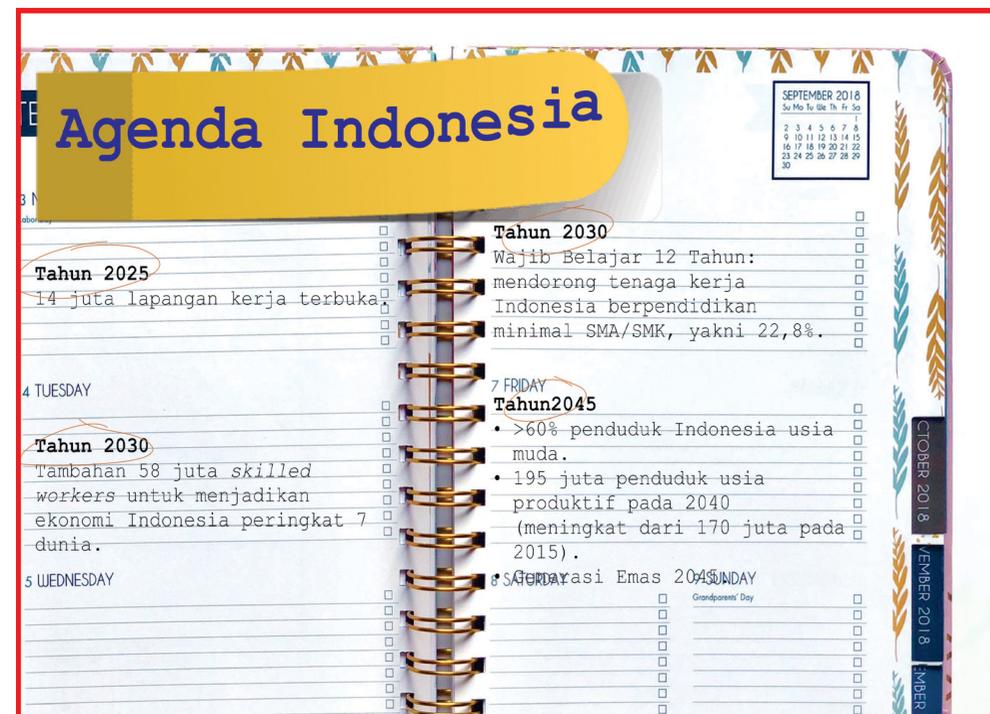
meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; (4) meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri; (5) meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; (6) membentuk kelompok kerja pengembang SMK. Selain kepada Mendikbud, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) diinstruksikan untuk (1) mempercepat penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan penyetaraan, dan pengakuan; (2) mengembangkan program studi di perguruan tinggi untuk menghasilkan guru kejuruan yang dibutuhkan SMK. Kepada Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Presiden Joko Widodo melalui inpres tersebut menginstruksikan jajarannya untuk menyusun proyeksi pengembangan, jenis kompetensi, khususnya yang terkait dengan lulusan SMK.



Gambar 1.3 "SMK dan SDGs"

Selain kepada jajaran kabinatnya, melalui inpres itu, Presiden Joko Widodo juga memberi instruksi kepada gubernur. Ia menyadari bahwa gubernur memiliki

wewenang dan tanggung jawab di wilayah teknis untuk mengembangkan SMK melalui UU Nomor 23 Tahun 2014. Dalam hal ini, gubernur diinstruksikan untuk (1) memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayah masing-masing; (2) menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas; (3) melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; (4) mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Implementasi inpres tersebut diawasi oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan dilaporkan kepada Presiden paling singkat enam bulan sekali.



Gambar 1.4 "Agenda Indonesia"

Secara garis besar, Presiden Joko Widodo memberikan tiga arahan. Pertama, pemerintah perlu melakukan reorientasi SMK ke arah kebutuhan kerja. Kedua, pendidikan kejuruan harus melibatkan dunia usaha dan industri dalam proses pendidikannya. Ketiga, untuk meningkatkan lulusan SMK secara kuantitatif,

pemerintah harus mempermudah pihak-pihak yang ingin membuat sekolah kejuruan. Kemudian, pada tanggal 29 November 2016, lima menteri menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi dan *link and match* dengan dunia industri.

Selain Nawacita, ada beberapa hal yang melatarbelakangi program revitalisasi jenjang pendidikan SMK, salah satunya ialah Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 yang dirumuskan pada tanggal 21 Oktober 2015 dalam forum resolusi PBB. Terdapat 17 tujuan SDGs 2030 dan 169 target, salah satunya ialah meningkatkan jumlah pekerja muda dan dewasa yang memiliki keahlian (termasuk keahlian teknik dan kejuruan) untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan.

Selain itu, pada tahun 2030, agar ekonomi Indonesia menempati peringkat ketujuh dan tujuan SDGs tercapai, Indonesia perlu menambahkan 58 juta pekerja terampil. Namun, pada kenyataannya, pada tahun 2012, Indonesia hanya memiliki 45 juta pekerja, sedangkan pekerja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu ialah 135 juta pekerja.

Selain itu, hal yang melatarbelakangi revitalisasi jenjang pendidikan SMK ialah terkait dengan persaingan SDM di wilayah regional (ASEAN) dan global. Dalam wilayah ekonomi regional, 14 juta lapangan kerja akan terbuka sampai tahun 2025 dan terdapat 20 kompetensi keahlian. Indonesia harus bersaing dengan negara lain untuk memenangkan persaingan itu. Oleh sebab itu, sumber daya manusia Indonesia harus ditingkatkan, khususnya sumber daya manusia lulusan SMK. Di wilayah global, khususnya di Eropa, terjadi penurunan penduduk usia kerja sebesar 23% dari tahun 2010 ke 2050 karena *ageing society*. Kondisi ini merupakan peluang karena Indonesia memiliki 60% penduduk usia produktif. Jika Indonesia berhasil meningkatkan kualitas SDM, khususnya lulusan SMK, lapangan pekerjaan di Eropa akan terbuka bagi tenaga kerja Indonesia.

Peluang lainnya ialah Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2040. Pada tahun 2040, Indonesia akan mendapatkan 195 juta penduduk usia produktif; meningkat dari tahun 2015 yang hanya mencapai 170 juta jiwa. Bonus demografi tersebut harus dimanfaatkan dengan cara memberikan keterampilan abad ke-21 kepada mereka. SMK merupakan salah satu cara untuk membangun generasi yang memiliki keterampilan. Dengan demikian, pada tahun

2045, tepat 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, generasi Indonesia akan menjadi generasi emas 2045. Namun, jika ini tidak dimanfaatkan secara maksimal, bonus demografi akan menjadi malapetaka bagi Indonesia. Jika penduduk Indonesia tidak terampil dan kalah bersaing di lapangan pekerjaan, dapat dibayangkan, jumlah pengangguran akan bertambah berkali-kali lipat. Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya menyiapkan strategi-strategi menuju Generasi Emas 2045, salah satunya dengan memperbaiki pendidikan, khususnya merevitalisasi SMK agar terjadi perbaikan struktur tenaga kerja.

Menurut data BPS, bahwa sejak tahun 2015, tenaga kerja Indonesia di dominasi oleh tenaga kerja lulusan SD atau di bawahnya, yakni sebesar 45,1%. Sementara itu, tenaga kerja lulusan SMP dan SMA masing-masing 17,8% dan 16,4%. Kemudian, tenaga kerja lulusan SMK hanya 9,8%. Selanjutnya, tenaga kerja lulusan diploma hanya 2,6%; cukup jauh bila dibandingkan dengan tenaga kerja lulusan S-1 dan D-4, yakni sebesar 8,3%. Dari data tersebut, ada dua hal yang harus digarisbawahi. Pertama, tenaga kerja yang pernah mengenyam pendidikan SD sangat dominan; hampir mencapai setengah dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Kedua, tenaga kerja lulusan pendidikan kejuruan/vokasi terlalu sedikit. Jika ditotal, jumlah lulusan SMK dan diploma hanya mencapai 12,4%.

Dengan demikian, pemerintah mendorong agar tenaga kerja Indonesia memiliki pendidikan minimal SMA/SMK. Wajib belajar 12 tahun tengah digalakkan dengan Program Indonesia Pintar. Program tersebut telah terbukti mampu mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut terbukti pada kenaikan angka partisipasi kasar (APK) dari tahun 2011 hingga tahun 2018. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, APK pada tahun 2011 hingga tahun 2016 menunjukkan bahwa banyak siswa yang berhasil melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2014 hingga 2015. Pada tahun 2015, APK meningkat sebesar 1,63% dari tahun 2014 untuk jenjang SD/MI/Paket A; APK meningkat sebesar 2,54% dari tahun 2014 untuk jenjang SMP/MTs/Paket B; dan APK meningkat sebesar 3,76% dari tahun 2014 untuk jenjang SMA/MA/Paket C. Tren peningkatan terus berlanjut sampai dengan tahun 2018. Peningkatan APK ini merupakan salah satu efek positif dari pengimplementasian Program Indonesia Pintar (PIP).

Jika hasil positif ini terus terjadi, pada tahun 2030 diperkirakan jumlah tenaga kerja berpendidikan SD akan menurun dari 45,1% (pada tahun 2015) ke 20,7% dan tenaga kerja berpendidikan SMP akan menurun dari 17,8% (pada tahun 2015) ke 11,5%. Tenaga kerja lulusan SMA pun akan meningkat dari 16,4% (pada tahun 2015) ke 18,5%. Kemudian, tenaga kerja lulusan S-1 akan meningkat secara signifikan menjadi 18,5% (dari 8,3% pada tahun 2015). Sementara itu, pendidikan kejuruan/vokasi pula akan meningkat. Tenaga kerja lulusan SMK akan meningkat tajam ke angka 22,8% (dari 9,8% pada tahun 2015). Demikian pula dengan tenaga kerja lulusan diploma, mereka akan meningkat ke angka 8% (dari 2,6% pada tahun 2015).

Selain itu, seperti yang telah disinggung di atas, bahwa dengan disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2014, gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengembangkan pendidikan kejuruan, khususnya SMK. Dengan demikian, pemerintah provinsi dapat menajamkan ketepatan pemenuhan *supply-demand* tenaga kerja lintas kabupaten dan kota. Kondisi saat ini, menurut data BPS tahun 2018, dari 6,87 juta total pengangguran terbuka, jika dilihat menurut pendidikan tertinggi maka SMK menyumbang porsi pengangguran terbanyak, yaitu sebesar 8,92%. Selain itu, dari segi kualitas guru, hanya 22,3% guru SMK yang mengajar sesuai bidang keterampilan (guru kejuruan). Tentu saja, hal ini berpengaruh terhadap kualitas lulusan SMK. Kemudian, saat ini pendidikan vokasi belum *link and match* dengan dunia usaha dan industri. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran untuk menghubungkan dunia industri dengan SMK. Jika kondisi-kondisi di atas dapat diperbaiki oleh pemerintah provinsi, daerah akan maju dan kualitas SMK akan semakin meningkat.

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa visi kekuasaan (pemerintah) dari zaman kolonial abad ke-18 memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan sekolah kejuruan, selain industri. Kekuasaan (pemerintah) berperan secara signifikan dalam menentukan arah pendidikan kejuruan. Pada era Presiden Joko Widodo, kesadaran untuk meningkatkan kualitas SDM menjadi sangat kuat karena kondisi saat ini menuntut perubahan. Dalam hal ini, revitalisasi SMK menjadi salah satu penentu masa depan generasi Indonesia. Apabila revitalisasi berjalan dengan maksimal, niscaya generasi emasi Indonesia 2045 akan terwujud.

SMK ZAMAN NOW

Obrolan (*conversation*) dalam dunia pemasaran sangat penting karena obrolan akan menimbulkan *awareness* kemudian *interest* lalu *desire* dan akhirnya sampai pada *action*. Setiap perusahaan mempraktikkan hal ini ketika mereka akan memasarkan produknya. Nike adalah merek dagang produk olahraga—dalam hal ini adalah sepatu sepak bola—yang telah menguasai obrolan mengenai produk sepatu bola. Hal ini membuat produk sepatu sepak bola mereka menguasai pasar. Namun, kondisi ini berbalik saat Adidas memasarkan sepatu sepak bola Adidas Ace 16 Pure Control. Adidas membangun obrolan yang kemudian menciptakan *awareness* di pasar sepatu bola. Akhirnya, Adidas Ace 16 Pure Control mampu mendongkrak penjualan. Hal ini juga dialami oleh SMK.³

Sejak lama, SMK tidak menguasai obrolan. Oleh sebab itu, mereka dianggap sebagai jenjang pendidikan kelas dua. SMK “kalah populer” dengan SMA. Namun, nampaknya, kini keadaan mulai berbalik. Saat pemerintah mulai merevitalisasi dan mereorientasi SMK, SMK mendapat *awareness* dari masyarakat.

³Dalam “Kenapa beli Adidas Ace 16 Pure Control?” karya Panji Pragiwaksono (2016), <https://www.youtube.com/watch?v=VjiXOkosciY>

Revitalisasi dan reorientasi SMK menimbulkan berbagai imbas. Satu di antaranya adalah perhatian berbagai pihak terhadap SMK yang berimplikasi kepada kenaikan jumlah peminatan terhadap SMK. Jumlah peserta didik SMK pun meningkat secara signifikan beberapa waktu belakangan ini.



Gambar 2.1 Infografik "Tingkat Pengangguran SMK Cukup Tinggi".

Namun, peningkatan jumlah peserta didik SMK yang mengakibatkan tingginya jumlah lulusannya, ternyata tidak berbanding lurus terhadap penyerapan tenaga kerja lulusan SMK. Berdasarkan data Kemdikbud, pada tahun 2016, sebanyak 1,52 juta lulusan SMK, hanya 87,5% yang terserap ke dalam dunia kerja. Artinya 12,5% sisanya menjadi pengangguran yang berakibat pada sebuah persoalan baru sekaligus menjadi sebuah tantangan.

Tingkat pengangguran SMK dengan angka di atas menjadi tingkat pengangguran tertinggi jika dibandingkan dengan lulusan lainnya yakni lulusan dari SMA, diploma, dan S-1. Pada tahun yang sama, yakni tahun 2016, lulusan SMA mencapai angka 1,95 juta dan 9,60% di antaranya menganggur. Sementara itu, lulusan Diploma yang mencapai angka 0,22 juta, 6,4% di antaranya menganggur.

Lulusan Universitas yang mencapai angka 0,56 juta, tingkat pengangguran yang ditimbulkannya hanya 5,1%.

Masalah Kurikulum

Persoalan di atas menjadi sesuatu yang ironis karena SMK yang sejatinya adalah sebuah konsep institusi pendidikan dengan tingkat keterampilan yang ditonjolkan dan digadang-gadang menjadi solusi atas tingginya angka pengangguran. Namun, justru SMK melahirkan angka pengangguran yang paling tinggi jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya (SMA dan S-1). Hal ini tentu saja menjadi sebuah antitesis atas *branding* "keterampilan" yang dimiliki SMK.

Jika kita telaah, tingginya angka pengangguran lulusan SMK antara lain sebagai akibat dari fokus kompetensi yang tidak tepat. Beberapa bidang kompetensi yang ada di SMK mengindikasikan ketidaksinkronan dengan di dunia kerja (khususnya dunia industri sebagai relasi yang paling dekat dengan SMK). Penyelenggara pendidikan SMK harus lebih jeli melihat persoalan pasar ini dengan memandang dari perspektif lainnya. Penyelenggara pendidikan SMK harus terus mengikuti informasi tentang dunia industri agar fokus kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan terus dapat dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan di bidang industri.



Gambar 2.2 Infografik "Kurikulum SMK Perlu Berfokus pada Kebutuhan Industri".

Kurikulum SMK juga harus disesuaikan untuk dapat mengoptimalkan keterampilan para lulusannya. Penyesuaian kurikulum juga perlu dilakukan untuk menjawab kebutuhan dunia industri yang menjadi sasaran utama dari lulusan SMK. Selama ini, sebaran mata pelajaran di SMK masih mengakomodasi mata pelajaran yang berupa pengetahuan umum. Berdasarkan data Kemdikbud, mata pelajaran yang berkaitan langsung dengan kejuruan teknik baru mendapat alokasi 54% atau hanya sekitar setengah dari seluruh mata pelajaran yang didapatkan siswa selama sekolah di SMK. Alokasi sisanya yakni 4% diisi oleh ilmu dasar kejuruan seperti Kimia dan Fisika. Kemudian, pengetahuan dasar seperti Matematika, Bahasa Inggris, dan Komputer memiliki porsi 16%. Terakhir, mata pelajaran dasar seperti PPKN dan Pendidikan Agama mendapat alokasi yang cukup besar, yakni 26%.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hanya setengah dari seluruh mata pelajaran merupakan mata pelajaran bidang keahlian. Misalnya, lulusan teknik mesin masih belum terampil karena fokus belajarnya pada bidang teknik mesin hanya separuh dari yang semestinya. Hal ini menjadi wajar jika kemudian lulusan SMK banyak yang menganggur. Tentu saja, pengangguran yang dihasilkan lulusan SMK disebabkan karena lulusan SMK belum terampil atau baru 'setengah terampil'.

Ada korelasi yang sifatnya kausalitas antara tingkat pengangguran lulusan SMK dengan penyelenggaraan pendidikan di SMK. Dengan demikian, harus ada pembenahan terhadap kurikulum yang diberlakukan dalam bentuk penambahan alokasi mata pelajaran yang terkait secara langsung dengan kejuruan. Mata pelajaran yang lain harus rela "mengalah" untuk penyesuaian kembali alokasinya karena penyesuaian inilah yang akan menjadi modal atas optimalisasi keterampilan para lulusan SMK.

Segalanya Harus Daring

Selain realokasi kurikulum SMK, agar fokus pada kompetensi bidang, sekolah juga sudah seharusnya mengikuti perkembangan zaman sekarang yakni mengedepankan sistem daring (*online*). Dengan adanya sistem daring dalam manajemen sekolah, beberapa permasalahan dapat diatasi dengan lebih cepat dan tepat. Misalnya, dalam hal transparansi pembelajaran, adanya sistem manajemen daring akan memudahkan sekolah untuk memantau interaksi antara guru dengan

para siswa. Jika sistem daring diimplementasikan, manajemen akan dapat segera mengetahui masalah yang dihadapi siswa dan guru dalam kegiatan pembelajaran dan dapat segera mencari jalan pemecahannya.

Selain pemantauan antara interaksi guru dengan siswa, sistem daring juga memungkinkan orang tua siswa untuk dapat berinteraksi dengan guru. Dengan begitu, komunikasi akan terjalin di antara kedua belah pihak tersebut. Hal ini akan memperkuat eksistensi siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Jika terjadi persoalan di sekolah—apalagi persoalan tersebut berpotensi mengganggu bidang akademis, khususnya proses pembelajaran keterampilannya—guru dapat melaporkan kepada orangtua untuk dicari solusinya bersama-sama. Begitu pun sebaliknya, jika orangtua menemukan persoalan terkait anaknya di lingkungan keluarga yang sekiranya berpotensi mengganggu kegiatan sekolah, orangtua juga dapat segera berdiskusi dengan guru secara cepat tanpa harus menunggu untuk dapat bertatap muka secara langsung.



Gambar 2.3 "Sistem Manejemen Sekolah Berbasis Daring"

Sistem daring juga memungkinkan orangtua untuk dapat mengontrol aktivitas keseharian anak-anak mereka di sekolah. Orangtua dapat mengetahui kehadiran anak mereka di sekolah. Bahkan lebih kompleksnya lagi, orangtua dapat mengetahui detail kegiatan anaknya di sekolah. Dengan demikian, orangtua dapat memantau perkembangan anaknya sehingga membantu dalam proses optimalisasi pembelajaran keterampilan yang sedang diikuti oleh anaknya.

Persoalan lainnya yang dapat diatasi dengan keberadaan manajemen daring di SMK adalah tentang perkembangan akademis dari para siswa. Dengan sistem manual, para siswa masih dapat menyembunyikan perkembangan akademik mereka. Namun dengan adanya sistem daring, orangtua dapat dengan mudah mengakses informasi tentang perkembangan akademis anak-anak mereka yang tersaji secara daring.

Tantangan lainnya yang terkait dengan ketertinggalan penyelenggara pendidikan SMK terhadap perkembangan informasi di bidang industri adalah tidak adanya platform digital untuk komunikasi terintegrasi antara pemerintah, penyelenggara SMK, dan penyelenggara industri. Ketiadaan platform digital ini melemahkan masing-masing pihak untuk melakukan langkah-langkah yang strategis. Jika tidak ada platform digital, pemerintah akan kesulitan mendapat informasi atau pangkalan data seputar penyelenggaraan pendidikan SMK dan kompleksitas persoalan yang ada di dalamnya. Hal ini menjadi penghalang bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Kemudian, bagi penyelenggara pendidikan SMK, ketiadaan platform tersebut akan melemahkan segi informasi tentang perkembangan dunia industri. Impaknya, SMK tidak dapat memberikan arahan kepada para lulusan juga kepada para siswa saat proses pembelajaran. Lulusan dan siswa SMK akan kesulitan mencari peluang pekerjaan yang dapat diakses berdasarkan kompetensi mereka masing-masing. Selain itu, penyelenggara pendidikan SMK tidak dapat menyesuaikan penyelenggaraan pendidikannya dengan dinamika perkembangan di dunia industri. Kemudian, bagi industri sendiri, ketiadaan platform tersebut akan mengakibatkan kesulitan bagi perusahaan-perusahaan untuk mencari calon pekerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akhirnya, posisi-posisi pekerjaan tertentu akan diisi oleh orang-orang yang kurang memiliki kompetensi. Bahkan,

lapangan pekerjaan akan diisi oleh pekerja yang kompetensinya tidak berhubungan secara langsung. Bahkan, lebih parahnya lagi, lapangan pekerjaan akan diisi oleh pekerja-pekerja asing.

Guru Harus Maju

Tantangan lain yang timbul untuk SMK masa kini adalah guru. Idealnya sebagai institusi yang akan membentuk lulusan-lulusan berketerampilan, SMK harus memiliki guru produktif yang mumpuni. Guru-guru yang mengajar di SMK seyogianya didominasi oleh guru bidang mata pelajaran yang sesuai dengan kompetensi lulusan baik itu di bidang mesin, informatika, elektro, dan lain sebagainya



Gambar 2.4 "Kurikulum SMK Perlu Berfokus pada Kebutuhan Industri"

Namun, faktanya, berdasarkan data Kemdikbud, pada tahun 2016, komposisi guru SMK yang terdiri atas guru produktif hanya mencapai angka 22%. Padahal, terminologi guru produktif dalam konteks ini adalah guru yang kompetensinya sesuai dengan kejuruan di SMK. Dengan kata lain, 78% sisanya hanyalah guru normatif adaptif, yakni para guru yang kompetensinya di bidang pengetahuan dasar sehingga

tidak terkait secara langsung dengan kejuruan yang ada di SMK. Maka dari itu, terdapat ketimpangan yang sangat besar atas komposisi guru semacam itu.

Dengan komposisi di atas, dapat dikatakan bahwa institusi-institusi SMK hanya memenuhi kelayakan dari segi rasio jumlah guru. Jumlah guru hanya memenuhi alokasi persentase dari keseluruhan jumlah rata-rata siswa per tahun di sekolah tersebut sehingga tidak terkena peringatan sebagai sekolah yang 'tidak sehat'. Padahal, dengan kecukupan jumlah rasio guru tersebut, ternyata komposisi di dalamnya masih didominasi oleh guru-guru yang tidak sesuai dengan kebutuhan kurikulum SMK.

Berdasarkan perkembangan SMK saat ini, kebutuhan guru produktif di SMK juga mengalami perkembangan yang dinamis dan diproyeksikan terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Kemdikbud, pada tahun 2016, kebutuhan guru produktif berada pada angka 296.350 orang. Kemudian, pada tahun 2017, kebutuhan guru produktif meningkat menjadi 415.237; pada tahun 2018 meningkat menjadi 430.683; pada tahun 2019 meningkat menjadi 481.128; pada tahun 2019 meningkat menjadi 492.790 orang guru.

Proyeksi peningkatan kebutuhan guru SMK produktif tersebut sejalan dengan dorongan terhadap perkembangan SMK dari berbagai pihak. Namun, jika angka kebutuhan di atas tidak terpenuhi, SMK akan sulit berkembang. Jumlah guru produktif sangat menentukan kualitas SMK dan kualitas para peserta didik juga para lulusannya.

Tuntutan perubahan kurikulum, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, akan mengikuti dinamika dunia bisnis (industri) yang tidak pernah berhenti bergerak maju. Kurikulum juga harus bergerak maju agar dapat terus mendampingi kemajuan industri, tetapi tentunya harus juga diikuti oleh kemajuan di sektor tenaga pendidiknya. Dengan mencukupi angka kebutuhan guru produktif di SMK, pada saat yang bersamaan juga, sedang dilakukan upaya optimalisasi pencetakan lulusan SMK dengan keterampilan yang mumpuni.

Masalah Disparitas

Tantangan berikutnya adalah disparitas di antara institusi-institusi SMK. Terbentuk jurang pemisah yang menganga cukup dalam dan jauh antara SMK yang

berstatus negeri dengan SMK swasta. SMK negeri selama ini dipandang menjadi menara gading, khususnya dari segi penempatan kualitasnya. Sementara itu, SMK swasta secara umum dipandang sebagai institusi SMK kelas dua karena kualitasnya yang terindikasi dari aspek sarana prasarana pendidikan dan kualifikasi pendidik yang ada di dalamnya.

Berbanding terbalik, kuantitas SMK swasta jauh melebihi SMK negeri. Data Kemdikbud menyebutkan bahwa SMK negeri hanya sekitar 26% dari keseluruhan SMK yang ada atau berjumlah 3.529 sekolah. Sementara itu, SMK swasta jauh melampaui yakni sekitar 74% atau 10.280 sekolah. Bahkan, angka tersebut diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan. Dinamika peningkatan jumlah SMK swasta ini perlu mendapatkan pengawasan yang ekstra ketat karena peningkatan jumlah SMK swasta akan berdampak negatif jika peningkatan kuantitas itu tidak diimbangi dengan peningkatan kualitasnya.

Hal yang lebih perlu diwaspadai lagi, dari 10.280 SMK swasta tersebut, 3.604 di antaranya memiliki jumlah siswa yang kurang dari 100. Lalu, 2.518 SMK swasta memiliki jumlah siswa yang berkisar 100–200. Hanya 459 SMK swasta yang memiliki jumlah siswa lebih dari 1.000 orang dalam rata-rata tahunannya. Jika ditelusuri, jumlah peserta didik pada sebuah institusi pendidikan menjadi salah satu indikator kualitas institusi pendidikan tersebut. Selain itu, jumlah peserta didik juga menentukan keberadaan atau keberlangsungan operasional sebuah SMK.

Masalah Akreditasi dan Kualitas

Pernyataan tersebut sejalan dengan tantangan berikutnya di bidang SMK, yaitu masih begitu banyak sekolah yang belum terjamin kualitasnya. Indikatornya adalah akreditasi terhadap sekolah; lebih spesifik lagi akreditasi terhadap Kompetensi Keahlian (KK). Data statistik dari BNSP tahun 2017 menunjukkan bahwa dari total 47.119 KK, baru 7.522 yang terakreditasi A. sementara itu, 8.161 KK terakreditasi B, 2.128 KK terakreditasi C, dan 265 KK tidak terakreditasi. Bahkan, 29.043 KK belum terakreditasi sama sekali. Tentu saja, hal ini mengkhawatirkan.

Kondisi tersebut adalah sebuah alarm kewaspadaan tentang kualitas SMK dan lebih spesifik kualitas KK. Nilai dari institusi SMK terletak pada keterampilan yang dimiliki lulusannya. Namun, kondisi di atas menunjukkan bahwa sebagian

besar KK justru belum terakreditasi. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa SMK yang belum terjamin kualitasnya (dan merepresentasikan kualitas lulusannya) justru lebih dominan jika dibandingkan dengan SMK yang telah terakreditasi atau memiliki lulusan yang kualitasnya terjamin.



Gambar 2.5 "Akreditasi Kompetensi Keahlian di SMK"

Dengan melihat rendahnya kualitas para lulusan SMK, kita harus merasa wajar jika kemudian angka pengangguran yang dihasilkan dari lulusan SMK menempati posisi paling tinggi. Dalam dunia bisnis dan industri sebagai penyerap tenaga kerja, angka-angka di atas tentu menjadi persoalan yang dilematis. Pada satu sisi, dunia industri tentu membutuhkan para pekerja yang terampil sebagai ujung tombak pergerakan industri. Namun, pada sisi lain para calon pekerja yang jumlahnya begitu melimpah tersebut ternyata kualitasnya tidak sesuai dengan kebutuhan di dunia industri. Maka, tidak asing lagi jika kemudian muncul fenomena baru bahwa posisi-posisi pekerjaan tidak diisi oleh pekerja-pekerja yang tidak kompeten di bidangnya. Bahkan, para lulusan SMK tersebut akan berbondong-bondong mencari berbagai peluang kerja sekalipun itu di luar bidang yang mereka pelajari di sekolah.

Selain itu, para lulusan SMK yang kualitasnya rendah tersebut tidak memiliki

posisi tawar lagi saat masuk ke dunia kerja. Dapat dikatakan bahwa ada yang mau mempekerjakan saja sudah untung; tidak perlu membayangkan memilih-milih jenis pekerjaan apalagi untuk melakukan negosiasi gaji. Ini sebuah preseden sekaligus sebuah citra yang buruk tentang pendidikan SMK jika tidak segera dibenahi kualitasnya.

Masih terkait dengan kualitas SMK dan lulusannya yang mengacu pada akreditasi KK, distribusi SMK yang berkualitas juga ternyata belum merata. Dari data BNSP tahun 2017, SMK yang terakreditasi A hingga B masih berlokasi seputar Jakarta. DKI Jakarta memiliki jumlah SMK terakreditasi A dan B sebanyak 68% dari seluruh KK yang dibuka; disusul oleh DI Yogyakarta dengan persentase jumlah SMK terakreditasi A hingga B sekitar 57% dari seluruh KK yang diselenggarakan di daerah tersebut. Dengan demikian, daerah-daerah lainnya menjadi daerah yang dari segi kuantitas memiliki sekolah SMK yang jauh lebih banyak, tetapi kualitasnya—yang diindikasikan dengan akreditasi—ternyata masih cukup rendah. Daerah-daerah dengan kuantitas sekolah tinggi dan kualitasnya rendah pada umumnya berada di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, fokus pemerataan kualitas pendidikan harus ditingkatkan lagi, khususnya untuk daerah-daerah di luar Pulau Jawa.

Indikator lainnya atas kualitas SMK dan lulusannya adalah capaian nilai akhir. Berdasarkan pengukuran nilai Ujian Kompetensi Kejuruan (UKK) (BNSP tahun 2017), rerata nilai tertinggi diperoleh oleh DI Yogyakarta dengan rata-rata UKK 76,43; menyusul daerah lainnya dengan rata-rata yang masih berdekatan, yaitu Bali yang memiliki rata-rata nilai UKK 76,25; Riau dan DKI Jakarta yang masing-masing memiliki rata-rata nilai UKK 74,58 dan 74,47. Sementara itu, di daerah-daerah lainnya terdapat SMK yang memiliki rerata nilai yang masih berdekatan dengan angka-angka tersebut, tetapi masih banyak daerah yang memiliki rata-rata nilai UKK yang terpaut cukup jauh dari DI Yogyakarta dan daerah lainnya yang telah disebutkan di atas.

Indikator berikutnya adalah rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SMK pada masing-masing daerah. Berdasarkan data Kemdikbud, nilai rata-rata UN SMK yang terdiri atas mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia tersebut memiliki distribusi yang tidak merata pada setiap daerahnya. Daerah yang memiliki rata-rata nilai UN SMK tertinggi adalah DI Yogyakarta dengan perolehan angka 53,62. Menyusul Jawa Tengah dan DKI Jakarta yang masing-masing

perolehan rata-rata nilai UN SMK-nya adalah 50,52 dan 50,54. Sementara itu—sama halnya seperti perolehan nilai pada rata-rata nilai UKK—beberapa daerah memiliki nilai yang masih dekat dengan nilai daerah unggulan dan terdapat pula daerah yang memiliki nilai yang sangat jauh di bawah.

Dua indikator nilai tersebut semakin menguatkan bahwa distribusi kualitas lulusan SMK masih jauh dari kata merata. Harus diakui bahwa kualitas lulusan masih bersifat Jawa sentris karena daerah-daerah di Pulau Jawa (khususnya DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) masih memiliki jaminan kualitas yang lebih baik apabila dilihat dari berbagai indikator. Pemerintah dapat mendorong daerah-daerah yang masih tertinggal untuk meningkatkan kualitasnya. Pemerataan kualitas SMK dan lulusan akan turut juga memajukan daerah tempat SMK tersebut berdiri. Tentu saja, hal ini berkorelasi langsung terhadap sistem penyerapan dunia kerja yang berimplikasi pada pendapatan personal dan pendapatan daerah.

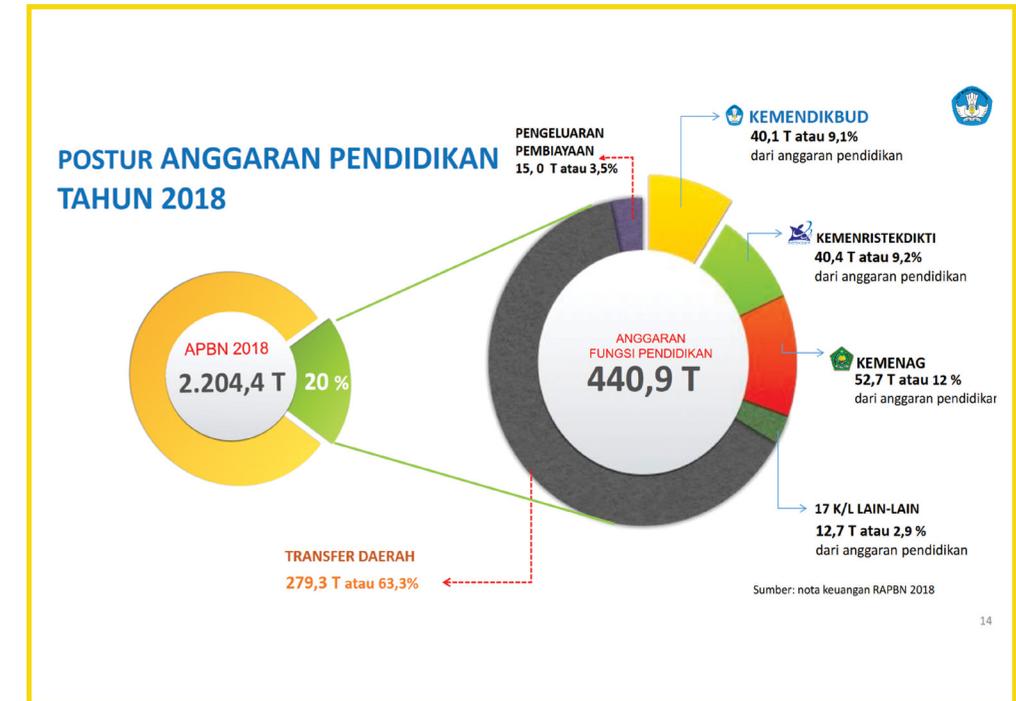
Masalah Anggaran

Tantangan terakhir untuk SMK saat ini—atau dapat dikatakan sebagai tantangan utama—adalah anggaran pendidikan yang terbatas. Bagaimana pun, untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan SMK, anggaran pendidikan memiliki pengaruh yang besar. Untuk meningkatkan sarana prasarana pendidikan, meningkatkan SDM pendidik, dan lain sebagainya, diperlukan alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran.

Jika dilihat dari fluktuasi anggaran pendidikan, pada tahun 2014 anggaran pendidikan nasional dialokasikan sebesar Rp6,288 miliar. Lalu pada tahun 2015, anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp9,009 miliar, tahun 2016 turun menjadi Rp6,309 miliar, tahun 2017 kembali turun menjadi Rp3,714, dan terakhir pada tahun 2018 sedikit meningkat menjadi Rp4,763 miliar. Fluktuasi anggaran pendidikan ini sedikit banyak menunjukkan inkonsistensi perhatian pemerintah terhadap pengembangan dunia pendidikan.

Anggaran pendidikan yang berasal dari sumber lainnya yaitu bersumber dari APBD, juga belum menunjukkan gejala yang menggembirakan. Hanya DKI Jakarta yang 'berani' menggelontorkan APBD dengan angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar 22,3% dari APBD. Sementara itu, daerah lainnya berada jauh di bawah

DKI Jakarta, misalnya Kalimantan Selatan sebesar 9,8%, DI Yogyakarta sebesar 9,7%, Kepulauan Riau sebesar 9,6%, dan Maluku Utara sebesar 9,2%. Selain itu, masih banyak daerah yang mengalokasikan APBD untuk pendidikan dengan amat kecil. Bahkan, beberapa daerah hanya menganggarkan sekitar 1% APBD untuk pendidikan.



Gambar 2.6 "Postur Anggaran Pendidikan Tahun 2018"

Tidak adil jika menuntut pemerataan kualitas lulusan SMK jika perhatiannya saja belum merata. Tidak adil jika menuntut lulusan SMK harus berkualitas sementara tempat praktik, gedung, sarana pendidikan lainnya, juga kualitas SDM pendidiknya tidak ditingkatkan. Agaknya, perlu ada gayung bersambut untuk sebuah sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah; perlu berkomitmen bersama-sama untuk membangun sektor pendidikan, khususnya SMK.

TANTANGAN SMK DI ERA DISRUPSI

Pada tahun 2030, Indonesia akan bubar. Sebagaimana Uni Soviet dan Yugoslavia, pada tahun itu, Indonesia akan berpredikat sebagai *failed state* 'negara gagal'. Tidak hanya itu, Amerika, Rusia, dan Tiongkok akan terlibat perang hebat. Peperangan itu akan berpengaruh ke negara-negara lainnya.

Namun, narasi di atas hanyalah fiksi; hanyalah cerita dari novel *Ghost Fleet* karya Peter W. Singer dan August Cole. Mereka merupakan pengamat militer dan kebijakan strategis global. Novel tersebut merupakan prediksi kedua penulis atas perubahan peta politik dunia. Di masa depan akan ada tiga kekuatan dunia, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Namun, di masa depan, menurut Peter W. Singer dan August Cole, perang bukan lagi memperebutkan wilayah atau sumber daya, melainkan memperebutkan pengaruh satu sama lain.

Demikianlah, secuplik cerita mengenai masa depan Indonesia. Tentu saja, itu hanya fiksi belaka. Apakah di masa depan Indonesia akan bubar? Tentu kita ingin menjawabnya dengan jawaban, "Tidak!" Oleh karena itu, generasi milenial harus mampu menjawab tantangan masa kini dan masa

depan dengan kerja keras mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain.

Pada saat ini, daya saing Indonesia masih berada pada peringkat ke-45 dari 140 negara. Hal itu merupakan tantangan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, khususnya lulusan SMK. Salah satu jawaban bagi tantangan itu adalah memperbanyak lulusan SMK yang terserap di dunia kerja yang diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong lulusan terserap di dunia kerja atau menjadi wirausaha (*entrepreneur*). Menurut Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, M. Nasir, SMK harus mampu menyiapkan lulusan yang mendukung penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada kenyataan saat ini, para pemberi kerja mengeluhkan bahwa para pekerja dari lulusan SMK tidak mempunyai *skills* yang memadai. Salah satu bukti hal tersebut tercantum dalam survei McKinsey Center for Government (2012), *Education to Employment: Designing a System that Works*.

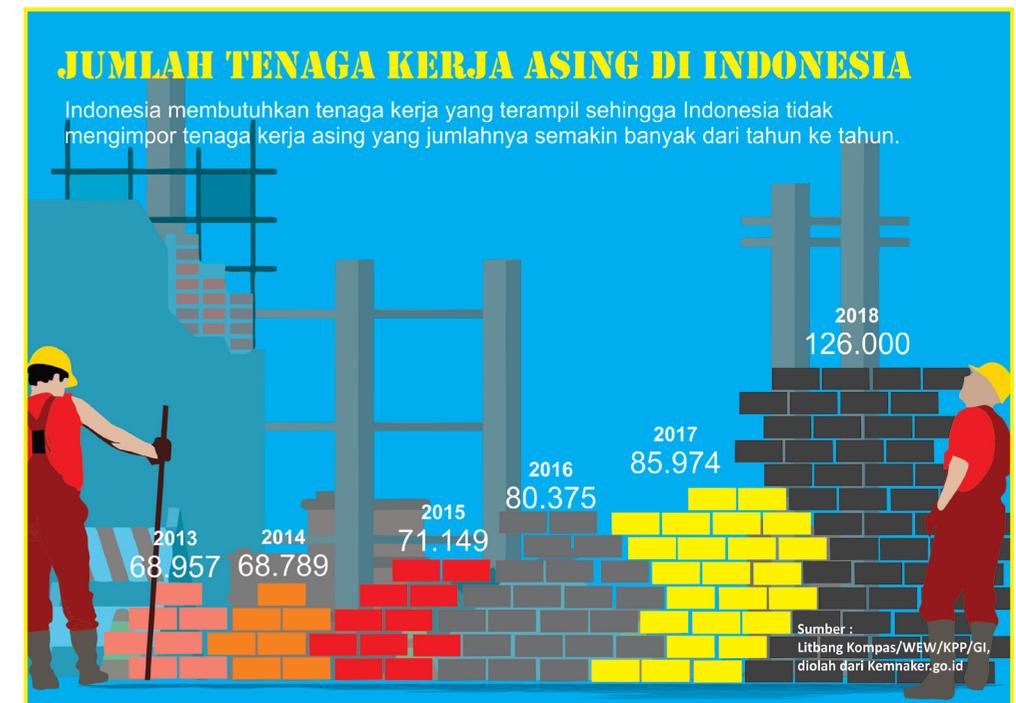
Di tengah era disrupsi teknologi revolusi industri 4.0, salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah VUCA world (VUCA yang merupakan singkatan dari *volatility* 'bergejolak', *uncertainty* 'tidak pasti', *complexity* 'kompleks', dan *ambiguity* 'tidak jelas'). US Army War College memperkenalkan premis VUCA untuk menggambarkan sifat rapuh di Afghanistan dan Irak setelah Perang Dingin. Uniknya, istilah tersebut kemudian digunakan dalam berbagai bidang.

Lebih jelasnya, *volatility* berarti sebuah perubahan dinamika yang sangat cepat dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi dan politik. *Uncertainty* bermakna sulitnya memprediksi isu dan peristiwa yang saat ini sedang terjadi. *Complexity* adalah adanya gangguan dan kekacauan yang mengelilingi setiap organisasi. *Ambiguity* didefinisikan sebagai beban berat realitas dan makna yang berbaur dari berbagai kondisi yang ada atau sebuah keadaan yang terasa mengambang dan kejelasannya masih dipertanyakan.

Selain perubahan teknologi baru yang mengakibatkan terjadinya VUCA di atas, persaingan tenaga kerja dengan tenaga kerja asing sudah dimulai bersamaan dengan perdagangan bebas dan masyarakat ekonomi regional (misalnya, MEA). Dengan demikian, tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja lulusan SMK, akan bersaing dengan pekerja asing.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, setiap tahunnya, jumlah

tenaga kerja asing meningkat. Padahal, pada tahun 2013 dan 2014, jumlah tenaga kerja asing sempat menurun, yakni 68.957 dan 68.789 orang. Pada tahun-tahun berikutnya, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia meningkat. Pada tahun 2015, tenaga kerja asing mencapai angka 71.149 orang. Dua tahun berikutnya, pada tahun 2017, tenaga kerja asing meningkat hingga 15 ribuan, yakni sebesar 85.974 orang. Pada tahun 2018, jumlah tenaga kerja asing meningkat tajam, yakni sebesar 126.000 orang. Keberadaan tenaga kerja asing akan mempersempit keterserapan tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja lulusan SMK. Jika tenaga kerja lulusan SMK tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dan tidak dapat bersaing dengan tenaga kerja asing, pengangguran yang berpendidikan SMK akan semakin meningkat.



Gambar 3.1 "Tenaga Kerja Asing di Indonesia"

Sejumlah langkah yang bisa dilakukan demi senantiasa mampu berkompetisi adalah menyiapkan institusi SMK agar mampu menghasilkan lulusan SMK yang dapat beradaptasi dengan munculnya teknologi baru. Kemunculan teknologi baru

ini yang mengakibatkan perubahan luar biasa di semua disiplin ilmu, ekonomi, dan industri.



Gambar 3.2 “Tenaga Kerja Indonesia Terserap Lapangan Pekerjaan”

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan akan membuka lapangan kerja untuk tenaga-tenaga kerja Indonesia yang terampil. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan siswa serta tenaga kerja lulusan SMK. Dalam tantangan ekonomi global dan pasar bebas, mereka (siswa dan tenaga kerja lulusan SMK) harus sadar atas kondisi tersebut dan menyiapkan diri untuk bersaing dengan tenaga kerja asing.

Ini menjadi tantangan yang serius. Pasalnya, pemerintah akan mempermudah perizinan tenaga kerja asing berdasarkan Perpres No. 20 Tahun 2018. Alasannya, pemerintah berpikir bahwa tenaga kerja asing akan menciptakan iklim investasi yang positif. Jika investasi meningkat, lapangan pekerjaan akan semakin luas. Hal tersebut terjadi karena selama ini investor kesulitan untuk mencari tenaga kerja asing. Bahkan, ada praktik pungutan liar untuk memuluskan masuknya tenaga

kerja asing. Untuk meminimalisasi hal-hal semacam itu, Perpres No. 20 Tahun 2018 diberlakukan; untuk memotong alur birokrasi yang rumit. Dengan demikian, sekali lagi, investor akan terdorong untuk berinvestasi di Indonesia. Logika ini yang digunakan pemerintah. Hal tersebut cukup berdasar jika melihat terbatasnya APBN. Jika hanya memanfaatkan APBN, lapangan kerja tidak akan terbuka secara maksimal.

Apakah hal ini akan menghambat keterserapan tenaga kerja Indonesia dengan masuknya tenaga kerja asing? Pertama, pemerintah telah menyiapkan skema agar tenaga kerja Indonesia tetap terserap dengan baik. Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja, lebih dari 2 juta tenaga kerja Indonesia terserap lapangan pekerjaan. Pada tahun 2014, sebanyak 2.654.305 tenaga kerja berhasil mendapatkan lapangan pekerjaan. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 2015, sebanyak 2.886.288 tenaga kerja dapat bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Pada tahun 2017, sebanyak 2.669.469 tenaga kerja berhasil ditempatkan untuk bekerja. Tentu saja, Kedua, pemerintah berpikir bahwa saat ini adalah momentum bagi masyarakat Indonesia, khususnya tenaga kerja lulusan SMK, untuk meningkatkan kapasitasnya. Pemerintah juga tengah mengembangkan pendidikan vokasi/kejuruan untuk meningkatkan SDM Indonesia agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Iklim persaingan ini penting untuk diciptakan agar terjadi peningkatan kapasitas. Dalam hal ini, sekali lagi, tentu saja ini menjadi tantangan yang serius bagi siswa dan lulusan SMK itu sendiri.

Selain bersaing dengan tenaga kerja asing, siswa dan lulusan SMK juga harus siap bersaing dengan teknologi. Setelah mengalami *digitalization era*, kini dunia sedang menghadapi era disrupsi. Kini, pekerjaan-pekerjaan yang biasa dikerjakan di masa lalu dengan cara manual dan membutuhkan sumber daya yang banyak sudah ditinggalkan. Misalnya, kita tidak perlu mengirim surat kepada kekasih kita di luar kota atau luar pulau. Kita hanya membutuhkan aplikasi atau surel untuk bertukar kabar. Mesin faksimili pun hanya menjadi barang berdebu di kantor kita. Kita tidak perlu pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kita hanya membutuhkan beberapa sentuhan jari kemudian barang yang kita inginkan akan datang.

Oleh karena itu, banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan di era disrupsi ini. Nokia dan Kodak menjadi contoh nyata perusahaan yang tidak mampu bertahan di era disrupsi ini. Kedua perusahaan tersebut tidak mampu berinovasi

dengan produknya sehingga kalah saing dengan perusahaan-perusahaan yang baru. Salah satu inovasi yang harus dilakukan perusahaan di era ini ialah dengan meningkatkan teknologi agar tercapai inovasi.

Namun, sebagaimana yang dijelaskan Rhenald Kasali, disrupsi bukan hanya sekedar mendinginkan layanan. Menurutnya, disrupsi merupakan penghematan biaya dalam proses bisnis; proses bisnis itu menjadi lebih simpel dan hemat. Ia juga menjelaskan bahwa disrupsi membuat kualitas produk menjadi lebih baik. Kemudian, disrupsi membuat pasar baru yang lebih terbuka—tidak lagi eksklusif. Selanjutnya, menurut Rhenald Kasali, disrupsi membuat produk/jasa menjadi mudah dicapai. Kemudian, disrupsi akan membuat sesuatu lebih pintar, akurat, serta hemat waktu dan tenaga.

Hal-hal di atas dapat kita analogikan seperti ini. Misalnya, kita ingin berlibur ke luar negeri. Kita tidak perlu pergi ke agen perjalanan untuk memesan tiket dan merencanakan liburan. Kita hanya perlu membuka aplikasi di ponsel kita dan membeli tiket dan merencanakan liburan kita dari sana.

Contoh di atas seolah menggambarkan bahwa disrupsi melulu terkait dengan layanan daring. Tentu saja, itu adalah anggapan yang tidak sepenuhnya tepat untuk menggambarkan disrupsi. Inti dari disrupsi ialah penyederhanaan proses kerja. Misalnya, pada masa lalu, untuk membuat sebuah mobil, dibutuhkan lima puluh orang. Namun, pada era disrupsi, untuk membuat sebuah mobil, hanya dibutuhkan 20 orang. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh 30 orang di masa lalu telah digantikan dengan teknologi. Dalam hal ini, industri telah mengalami otomatisasi. Hal ini tentu saja menjadi tantangan yang harus dihadapi siswa dan tenaga kerja lulusan SMK.

Dari sisi lapangan pekerjaan, jika sebagian besar perusahaan telah menyesuaikan dengan era disrupsi, perusahaan tersebut tidak lagi membutuhkan lapangan kerja yang banyak—di awal, bab ini menjelaskan bahwa di masa depan lapangan kerja akan terbuka luas, tetapi pada bagian ini dikatakan bahwa lapangan pekerjaan akan terbatas (bukan menyempit), tentu saja itu adalah persoalan yang agak berbeda.

Menurut Sudimin Mina, Director Microsoft Indonesia Software Asset Management & Compliance—sebagaimana yang ia kutip dari MSN, ada 21 profesi

yang akan digantikan oleh teknologi (robot). Profesi-profesi yang akan hilang itu adalah pekerjaan yang sifatnya repetitif (bersifat pengulangan) dan bernilai rendah. Profesi-profesi itu adalah akuntan, telemarketer, kasir, sopir, ahli masak, pekerja pabrik, ahli bedah, salesman, satpam, penggembala, petani, farmasi, wartawan, tentara, resepsionis, pekerja bangunan, pemandu wisata, *mixologist*, *barman*, pustakawan, administrator, dan guru. Sekali lagi, pekerjaan yang akan hilang, menurutnya, adalah pekerjaan yang bersifat pengulangan dan bernilai rendah.

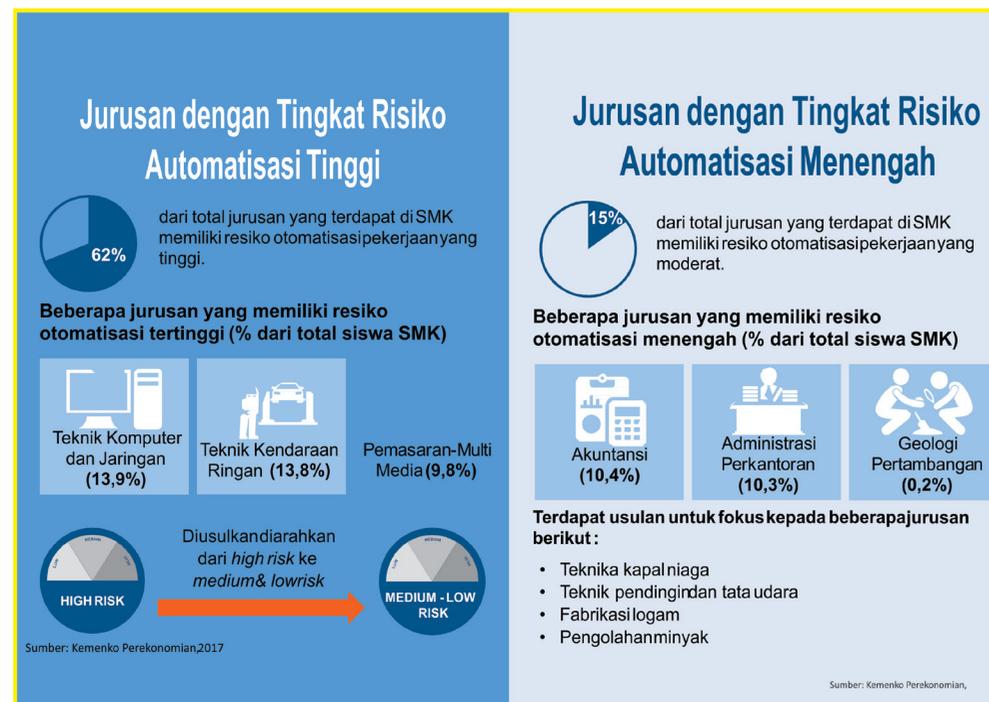
Namun, tidak semua pekerjaan-pekerjaan di atas sama sekali akan hilang. Misalnya, pemandu wisata yang akan hilang ialah pemandu wisata yang bertugas menunjukkan arah dan menjelaskan tempat wisata, sedangkan yang tidak akan hilang ialah pemandu wisata yang bertugas mempromosikan tempat wisata karena itu membutuhkan emosi. Demikian pula dengan ahli masak. Ahli masak yang akan hilang adalah ahli masak yang bertugas memotong atau memasukkan sayuran ke dalam wadahnya, bukan ahli masak yang memiliki seni dalam memasak. Hal yang perlu dicatat dalam hal ini ialah bahwa banyak lapangan kerja yang akan menyempit di masa depan; lapangan kerja tidak membutuhkan banyak pekerjaan karena telah mengalami otomatisasi atau digantikan dengan robot.

Baiklah, di masa depan lapangan pekerjaan akan terbatas dan inilah tantangan yang harus dihadapi siswa dan tenaga kerja lulusan SMK. Dalam hal ini, keahlian SMK yang terkait industri berisiko terkena otomatisasi karena industri telah menyesuaikan diri dengan era disrupsi. Sebagaimana data yang dirilis Kemendagri tahun 2017, terdapat 56% pekerjaan yang terkena risiko tinggi dari otomatisasi. Sebanyak 62% jurusan SMK berisiko tinggi terkena otomatisasi. Dengan demikian, ada 70% siswa SMK yang berisiko terkena otomatisasi. Kemendagri mengategorisasi jurusan yang berisiko terkena otomatisasi ke dalam tiga kategori, yakni (1) kategori jurusan dengan tingkat risiko otomatisasi tinggi, (2) jurusan dengan tingkat risiko otomatisasi menengah, dan (3) jurusan dengan tingkat risiko otomatisasi rendah.

Dari 62% jurusan yang berisiko terkena otomatisasi, terdapat tiga jurusan yang berisiko terkena otomatisasi tinggi, yakni jurusan teknik komputer, teknik kendaraan ringan, dan pemasaran multimedia. Sebanyak 13,9% siswa SMK (dari jurusan teknik komputer) akan berisiko terkena otomatisasi. Senasib dengan siswa

dari jurusan teknik komputer, sebanyak 13,8% siswa SMK dari jurusan teknik kendaraan ringan dan 9,8% siswa dari jurusan pemasaran multimedia akan berisiko terkena otomatisasi. Jurusan lain yang berisiko terkena otomatisasi ialah pemasaran multimedia sebanyak 9,8%. Dalam hal ini, pemerintah berusaha untuk menurunkan status kategori dari berisiko tinggi ke berisiko menengah atau bahkan rendah.

Dalam data Kemenko Perekonomian, terdapat 15% siswa dari total jurusan yang terdapat di SMK yang memiliki risiko otomatisasi pekerjaan yang moderat. Siswa di jurusan akuntansi menjadi jurusan dengan risiko otomatisasi paling tinggi pada kategori ini, yakni sebesar 10,4% siswa dari seluruh siswa SMK. Sementara itu, terdapat 10,3% siswa dari jurusan administrasi perkantoran akan berisiko terkena otomatisasi.



Gambar 3.3 "Tingkat Risiko Otomatisasi"

Dengan demikian, Kemenko Perekonomian mengusulkan beberapa jurusan yang bisa menjadi alternatif, yakni teknik kapal niaga, teknik pendingin dan tata udara, fabrikasi logam, dan pengolahan minyak. Sementara itu, kategori jurusan

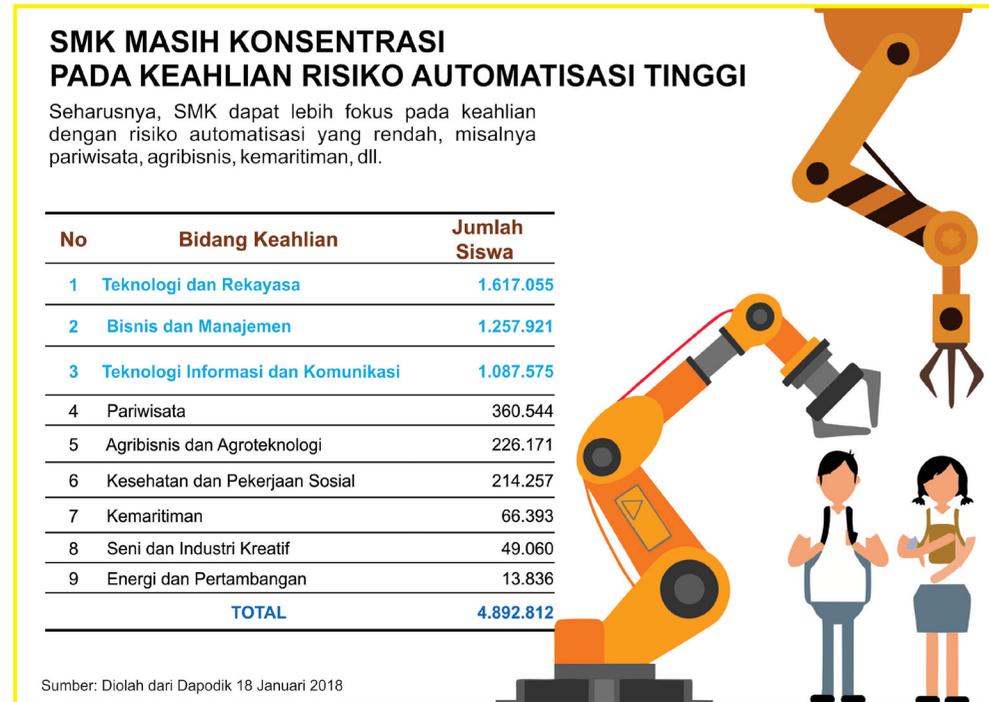
dengan tingkat risiko otomatisasi rendah berjumlah 23% dari semua jurusan di SMK. Dalam kategori ini, terdapat tiga jurusan yang cukup besar berisiko terkena otomatisasi (dengan kategori rendah), yakni jurusan keperawatan, jurusan farmasi, dan jurusan desain komunikasi visual. Siswa yang akan terkena otomatisasi rendah ini sebanyak 2,1% untuk jurusan keperawatan dan farmasi dan 0,2% untuk jurusan desain komunikasi visual.

Jika dilihat dari konsentrasi pada keahliannya, terdapat tiga rumpun keahlian yang memiliki risiko tinggi, yakni (1) keahlian teknologi dan rekayasa, (2) bisnis dan manajemen, dan (3) teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan data Dapodik periode 18 Januari 2019, ketiga rumpun keahlian tersebut adalah rumpun keahlian yang memiliki jumlah siswa paling banyak dari bidang keahlian lainnya yang ada di SMK. Untuk rumpun keahlian teknologi dan rekayasa, terdapat 1,6 juta siswa. Sementara itu, untuk rumpun keahlian bisnis dan manajemen, terdapat 1,2 juta siswa. Kemudian, sebanyak 1 juta siswa belajar di rumpun teknologi informasi dan komunikasi. Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwa jurusan-jurusan atau rumpun keahlian yang berisiko terkena otomatisasi tinggi ialah jurusan/keahlian yang populer di kalangan siswa. Jika otomatisasi kian masif dan lapangan pekerjaan semakin sempit, pengangguran lulusan SMK pada rumpun keahlian ini akan meningkat. Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah.

Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat harus mengalihkan fokus pada rumpun keahlian lainnya yang memiliki risiko otomatisasi rendah, misalnya konsentrasi pariwisata, agribisnis dan agroteknologi, kesehatan dan pekerjaan sosial, kemaritiman, seni dan industri kreatif, dan energi dan pertambangan. Sayangnya, rumpun keahlian tersebut masih jauh peminatnya daripada konsentrasi teknologi dan rekayasa, bisnis dan manajemen, dan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada rumpun keahlian pariwisata sendiri, hanya terdapat 360.554 siswa. Padahal, keahlian ini sangat dibutuhkan dunia kerja karena industri pariwisata di Indonesia tengah berkembang pesat. Terkait pula dengan rumpun keahlian pariwisata, rumpun keahlian seni dan industri kreatif masih sedikit peminatnya, yakni hanya 49.060 siswa. Padahal, bidang seni dan industri kreatif tengah gencar dibangun oleh pemerintah dan sangat terkait dengan industri pariwisata. Selain kedua rumpun keahlian tersebut, rumpun keahlian kemaritiman masih sedikit peminatnya,

yakni hanya 66.393. sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa saat ini pemerintah sangat gencar memaksimalkan potensi kelautan.



Gambar 3.4 “SMK Masih Konsentrasi pada Keahlian Risiko Otomatisasi Tinggi”

Pola pikir masyarakat pun harus berubah. Masyarakat harus memahami bahwa SMK bukan institusi yang berfokus pada rumpun keahlian teknologi atau bisnis dan manajemen semata. Namun, masih banyak jurusan-jurusan lain yang memiliki peluang kerja yang sangat luas. Pemerintah pun harus mengantisipasi agar jurusan yang berisiko tinggi terkena otomatisasi dapat ditekan risikonya. Selain itu, pemerintah harus membuka jurusan-jurusan lain yang “tidak populer” agar masyarakat memiliki pilihan untuk memilih jurusan-jurusan lain yang lebih potensial.

Selain itu, menurut Aswandi dalam artikelnya yang berjudul “Pendidikan Era Disruptif”, dalam menghadapi era disrupsi ini, keterampilan dan kompetensi peserta didik harus berfokus pada *associating skill*, *questioning skill*, *observing skill*, *experimenting skill*, dan *networking skill*. *Associating skill* yang dimaksud adalah peserta didik harus mampu memecahkan persoalan dengan menghubungkan disiplin

ilmu satu dengan lainnya dan menghubungkan masalah dengan ide. Kemudian, *questioning skill* adalah kemampuan bertanya dengan maksud untuk menstimulus cara berpikir kritis. *Observing skill* juga perlu dimiliki oleh peserta didik untuk mengubah mereka menjadi individu yang inovatif; mereka mampu mengamati hal-hal yang spesifik. Untuk menjadi seorang inovator di era disrupsi, seseorang harus memiliki *experimenting skill*. Kemampuan ini dibutuhkan untuk membuat seseorang mendapat pengalaman baru dan ide-ide baru. Kemudian, terakhir, seorang inovator harus memiliki jaringan (*networking skill*) untuk berdialog dengan lingkungan sosialnya dan bahkan menguji ide-ide mereka kepada orang-orang yang memiliki perbedaan perspektif. Ia dapat membagi idenya dan menginspirasi masyarakat melalui idenya.

Secara umum, pendapat Aswandi tentang lima kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik tentu saja tidak salah. Namun, secara khusus, ada empat kompetensi utama yang harus dimiliki siswa SMK atau tenaga kerja lulusan SMK. Kompetensi utama tersebut adalah *information, media, and technology skills*, *learning and innovation skills*, *effective communication skills*, *life and carrier skills*. Keempat kompetensi utama itu akan dibahas pada bab selanjutnya.

LULUSAN SMK DI ERA INDONESIA 4.0

“The more we think about how to harness the technology revolution, the more we will examine ourselves and the underlying social models that these technologies embody and enable, and the more we will have an opportunity to shape the revolution in a manner that improves the state of the world.”⁴

--Klaus Schwab

Dunia dengan segala dinamikanya terus bergerak maju, begitu juga dalam hal industri. Kita telah melewati berbagai tahapan dalam bidang industri dunia. Dengan terus bermunculan berbagai temuan teknologi di bidang informasi, mesin, transportasi, dan sebagainya, pada saat yang bersamaan, industri melesat begitu cepat. Kemudian kita sampai kepada era industri baru yaitu industri 4.0.

Kutipan Klaus Schwab seolah mendorong kita untuk berinovasi, memecahkan persoalan yang dihadapi dengan teknologi untuk kemajuan peradaban dunia. Inovasi teknologi yang diciptakan oleh manusia sesungguhnya untuk menaikkan

⁴Dalam *The Fourth Industrial Revolution* karya Klaus Schwab (2016).

peradaban, bukan untuk mengirim manusia ke dalam keterpurukan. Artinya, aktor utama sesungguhnya dalam revolusi teknologi ini adalah manusia. Namun, di saat yang bersamaan, pada umumnya, manusia kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan di era industri 4.0.

Industri 4.0 atau industri generasi keempat ini menuntut orang-orang di dalamnya untuk serba cepat dan serba instan. Jarak dapat dilipat, waktu dapat diperpendek, dan otomatisasi semakin menyentuh berbagai sendi kehidupan manusia. Jika masih berpedoman pada hal-hal yang sifatnya manual, jika masih memberikan toleransi pada kelambatan, kita akan tertinggal dalam gerak industri 4.0.

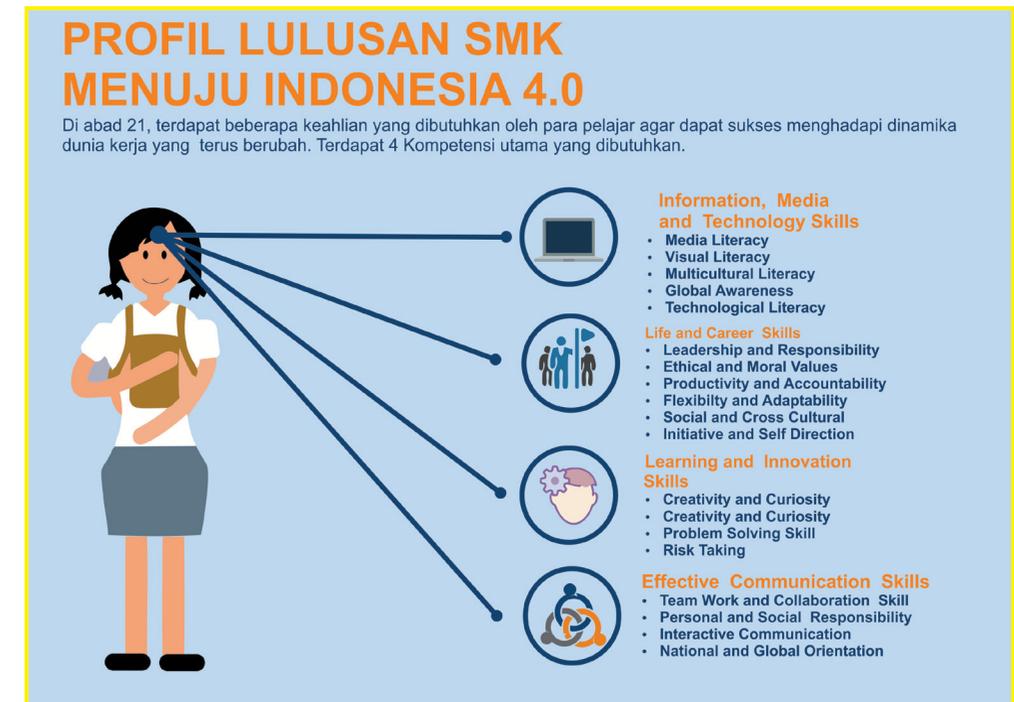
SMK, yang sejak awal sudah memiliki ikatan sangat erat dengan industri, menuntut para lulusannya untuk dapat terus mengimbangi berbagai perubahan dalam bidang industri. Ketika industri sudah mencapai revolusi yang keempat, para calon lulusan SMK pun harus dipersiapkan untuk dapat mengikuti arus 4.0 ini; atau lebih luar biasa lagi jika tidak hanya ikut arus, tetapi justru menjadi bagian pelaku dan penentu industri 4.0. Namun, hal yang terpenting adalah para lulusan SMK harus dapat terus beradaptasi.

Empat Kompetensi yang Harus Dimiliki Lulusan SMK

Kurikulum SMK harus membekali para lulusan agar dapat melakukan adaptasi tersebut. Profil lulusan SMK harus lebih dipertegas lagi untuk dapat membawa nilai-nilai kompetensi yang dibutuhkan oleh dinamisnya dunia kerja, khususnya dunia industri. Setidaknya, ada empat kompetensi yang harus dimiliki lulusan SMK masa kini, yaitu 1) keahlian bidang informasi, media, dan bidang teknologi; 2) keahlian dalam mengembangkan diri dan mampu berinovasi; 3) keahlian dalam berkomunikasi secara efektif; serta 4) keahlian dalam soal kecakapan hidup.

Untuk memiliki kompetensi yang pertama yakni keahlian bidang informasi, media, dan bidang teknologi, seorang lulusan SMK harus memerhatikan berbagai unsur bidang yang ada di dalamnya. Contoh unsur bidang tersebut adalah literasi media. Orang-orang yang tidak ingin tertinggal oleh revolusi industri keempat termasuk para lulusan SMK dituntut untuk menguasai literasi media. Disintesis dari berbagai sumber, literasi media adalah bentuk kompetensi dalam mengomunikasikan informasi melalui media dengan berbagai bentuknya seperti cetak, digital, dan

sebagainya. Selain mengomunikasikan juga dituntut untuk mampu mengakses, menganalisis, bahkan mengevaluasi.



Gambar 4.1 "Profil Lulusan SMK Menuju Indonesia 4.0"

Literasi media yang antara lain tersusun atas tiga unsur yaitu pembuat, media, dan penerima, dapat menjadi modal yang besar jika dikuasai oleh pihak-pihak yang terlibat dalam era industri ini. Dalam sudut pandang yang lain, ini adalah sebuah proses pengiriman pesan dengan tiga unsur di atas. Literasi media memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan di dalam konteks industri 4.0 ini seperti produsen, pemasar, distributor, penentu kebijakan, konsumen, dan lain sebagainya dapat terhubung satu sama lain tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan kata lain, ada arus informasi yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lainnya dalam berbagai lingkup.

Lulusan SMK dalam era ini tidak bisa menafikan tuntutan untuk menguasai bidang produksi saja yang secara garis besar memang ada di titik tersebut. Lulusan SMK harus juga menguasai literasi media. Dengan begitu, mereka dapat memahami

dinamika arus informasi di bidang industri misalnya cara pemasaran produk, cara mengiklankan produk dengan media digital dalam bentuk blog atau web. Kemudian, sebuah tulisan yang berisi pedoman penggunaan dalam sebuah produk juga membutuhkan keahlian ini. Bentuk lainnya adalah seorang lulusan SMK tidak hanya mengetahui, tetapi juga dapat mengkritisi dan mengendalikan arus informasi. Untuk melakukan hal tersebut, diperlukan pengetahuan dan wawasan yang luas sebagai dasarnya.

Berikutnya seorang lulusan SMK juga dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang literasi visual. Pada zaman dengan segala kemajuan di bidang teknologi ini, semua bidang dituntut untuk dapat beradaptasi. Komunikasi di bidang visual sebagai bentuk implikasi dari kemajuan teknologi telah merambah berbagai aspek, tidak ketinggalan adalah aspek industri. Seperti yang kita ketahui, kini, dalam memasarkan produk-produk industri, iklan dalam bentuk visual merupakan salah satu media yang sangat efektif. Dengan mengiklankan produk di televisi, misalnya, semua orang sebagai pangsa konsumen di seluruh Indonesia dapat menyaksikannya. Apalagi jika berbicara tentang persoalan jejaring sosial dan situs berbagi video maupun gambar, pemasar produk industri dapat mengiklankan produknya dengan disaksikan oleh siapa saja dan kapan saja di seluruh dunia.

Contoh di atas merupakan salah satu bentuk implementasi dari literasi visual. Seperti sudah dibahas sebelumnya tentang literasi yang di antara definisinya adalah bentuk mengomunikasikan atau mengirimkan pesan, literasi visual merupakan bentuk pengiriman pesan hanya saja dengan menggunakan media visual, yaitu objek yang dicitrakan baik berupa gambar maupun video.

Lulusan SMK pada era ini tidak luput dari tuntutan untuk memiliki kompetensi di bidang literasi visual. Kompetensi tersebut setidaknya terbagi menjadi dua, yaitu menafsirkan dan menciptakan bentuk visual. Menafsirkan dalam hal ini adalah memaknai setiap tanda yang diimplisitkan dalam sebuah pesan visual. Seorang lulusan SMK ketika melihat gambar atau video tertentu harus dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya sehingga dapat berinteraksi aktif dalam proses interaksi dalam wujud literasi visual yang sekarang ini mengelilingi dunianya.

Berikutnya adalah menciptakan bentuk pesan visual. Lulusan SMK harus dapat membuat kode pesan dalam bentuk visual dalam foto maupun video, yakni sebuah

pesan dengan makna tertentu seperti memengaruhi, memperingatkan, mengajak, mengimbau, dan sebagainya. Dengan teknologi berbasis komputer serta berbagai aplikasi yang mengikutinya, lulusan SMK dapat menuangkan kreativitasnya melalui media tersebut. Bentuk visual ini akan menjadi jembatan komunikasi di seputar dunia industri pada era 4.0 ini.

Untuk mengasah kemampuan di bidang literasi visual, setidaknya, ada dua tahapan yang harus dilalui calon lulusan. Tahapan pertama adalah input dan tahapan kedua adalah *output*. Pada tahapan input, calon lulusan harus menggali berbagai fenomena visual yang ada di sekitarnya. Kita Tidak dapat dimungkirkan bahwa perkembangan teknologi yang dinamis akan terus maju sehingga berimbas pada berbagai perubahan di bidang visual. Lulusan harus melihat perkembangan dunia visual seperti apa yang berafiliasi dengan perubahan budaya, pengetahuan, sosial, dan lain sebagainya. Misalnya, iklan yang tayang pada tahun 2018 secara visual akan sangat berbeda dengan iklan yang tayang pada lima hingga sepuluh tahun sebelumnya; begitu juga dalam bentuk visual lain baik yang berbentuk grafik, bagan, dan sebagainya yang terus berubah dari waktu ke waktu. Lulusan SMK harus terus mengikuti perubahan visual tersebut untuk dapat terus memaknai pesan yang ada di dalamnya.

Pada tahapan *output*, lulusan SMK harus dapat menciptakan produk visual yang sesuai dengan konteks perubahan zaman. Dengan berbagai masukan hasil pencarian pada tahapan *input* tadi, lulusan SMK sudah memiliki akumulasi bekal pengetahuan yang ada di dalam kepalanya. Pengetahuan tersebut yang kemudian dijadikan sebagai modal untuk menciptakan produk visual. Misalnya, saat diminta untuk menciptakan sebuah produk iklan dalam bentuk video, berdasarkan pengalaman sebelumnya, lulusan SMK harus telah mengetahui bentuk, teknologi, dan bentuk komunikasi iklan yang beredar.

Selanjutnya, lulusan SMK juga harus memiliki kompetensi di bidang literasi multikultural. Jauh sebelum memasuki periode industri 4.0, dunia sudah mengenal istilah globalisasi. Globalisasi ini, baik yang sifatnya sebenar-benar global maupun yang bersifat regional, adalah penyebaran nilai-nilai yang diharapkan sama penerimaannya oleh berbagai pihak penerima di wilayah bumi yang berbeda-beda. Penyebaran nilai-nilai (dipertegas menjadi penyamaan nilai) bahkan tidak dibatasi,

baik dari segi nilai sosial, ekonomi, pemerintahan, perdagangan, dan tentunya juga nilai kultural.

Ketika kita memasuki revolusi industri 4.0, nilai-nilai yang ada dalam globalisasi tersebut bukannya memudar melainkan lebih kuat. Arus informasi tidak lagi terbatas pada kawasan domestik atau regional, tetapi semakin luas dalam ruang lingkup global. Maka dari itu, seorang lulusan SMK harus menguasai bidang literasi multikultural yang menjadi sebuah bentuk peleburan diri terhadap arus komunikasi yang bersifat global tersebut. Lulusan SMK harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai peradaban dan budaya yang berbeda-beda sehingga tidak mengalami *culture shock*.

Jika literasi media dan literasi visual bersifat *tangible*, literasi multikultural — khususnya dari segi sifat — cenderung *intangibile*. Hal ini disebabkan oleh tuntutan yang ada di dalamnya didominasi oleh pemahaman terhadap pihak lain. Dalam pola arus informasi global ini, lulusan SMK akan dihadapkan dengan berbagai pihak yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Dengan demikian dalam setiap interaksi-komunikasi, harus ada upaya memahami perbedaan-perbedaan tersebut.

Hal yang lebih konkret adalah soal penguasaan bahasa. Dalam literasi multikultural, lulusan SMK harus menyadari bahwa interaksi yang akan dilakukan tidak terbatas pada orang-orang yang ada di Indonesia. Dengan demikian ada minimal kemampuan berbahasa yang dimiliki, yaitu *lingua franca*. Akan lebih baik lagi jika ada bahasa-bahasa lain yang dikuasai sebagai penunjang dalam melancarkan kegiatan literasi multikultural. Penguasaan minimal bahasa adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris saat ini digunakan oleh 1.75 miliar orang di seluruh dunia. Selain itu, juga kini makin banyak perusahaan multinasional menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi utama dalam menjalankan bisnis demi membangun komunikasi yang kuat antartim di berbagai negara.

Berikutnya, lulusan SMK juga harus melek teknologi. Arus informasi yang terjadi di bidang industri dari hulu ke hilir yaitu produksi, distribusi, hingga pemasaran tidak dapat lepas dari unsur teknologi baik yang berbentuk perangkat keras maupun berbentuk perangkat lunak. Produk teknologi selalu menjadi penggerak dalam bidang industri.

Literasi teknologi secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam

memanfaatkan teknologi, seperti menggunakan, mengelola, memahami, menganalisis, dan respons semacamnya terhadap teknologi. Dengan kemampuan literasi teknologi pula kemudian dapat dikomunikasikan pesan melalui produk teknologi tertentu.

Ketika membahas persoalan teknologi, ada satu hal yang selalu dikaitkan dengannya yaitu komputer. Bagaimana tidak, komputer seolah menjadi pemimpin dalam peradaban modern ini. Hampir semua bidang yang sejalan dengan kehidupan manusia modern selalu ada kata komputerisasi di dalamnya. Oleh sebab itu, lulusan SMK 4.0 harus menguasai komputer. Lulusan SMK harus dapat mengoperasikan komputer secara piawai, baik perangkat keras dan lunak. Seperti definisi di atas, mengoperasikan atau menggunakan adalah dasar karena harus disusul oleh kemampuan memahami, menganalisis, mengelola, serta menguasai seluk beluk komputer.

Lebih jauh lagi jika memasuki dunia internet sebagai bagian dari perkembangan teknologi, lulusan SMK tidak hanya menguasai tetapi harus dapat meleburkan diri di dalamnya. Pemahaman terhadap *Internet of Things* (IoT) menjadi hal dasar yang harus juga dikuasai. IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung dengan jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS (*global positioning system*). Cara kerjanya setiap benda yang terhubung dengan internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan ketika kita meninggalkan rumah dan ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya mengirim pesan ke rumah kita. Bahkan, bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang keadaan kondisi tubuh korban dan memberi kabar kepada keluarga atau kerabat terdekat.

Berbagai perkembangan dunia hari ini juga proyeksi di masa depan ada di internet, yang terwakili dalam komputer maupun gawai. Dunia dalam genggamannya, itu

yang sering dikatakan orang-orang. Jika lulusan SMK mampu menggenggam segala bentuk kemajuan teknologi, ia sedang menggenggam dunia.

Bagian terakhir dari kompetensi bidang informasi, media, dan bidang teknologi yang harus dimiliki lulusan SMK era industri 4.0 adalah kesadaran global. Kesadaran global merupakan sebuah bentuk kesadaran diri sebagai bagian dari penduduk global. Ada sebuah konsepsi tentang perspektif pengetahuan dan sebagainya yang berlaku secara global. Hal ini seperti pembahasan pada literasi multikultural bahwa dalam interaksi antara satu pihak dengan pihak lainnya di seluruh bagian bumi, berbagai pihak tersebut akan dipertemukan dengan keanekaragaman yang ada di luar dirinya. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kolaborasi di antara pihak-pihak yang dengan keanekaragaman yang kompleks dari segi etnis, agama, usia, jenis kelamin, budaya, kemampuan kognitif, pengalaman, dan gaya hidup. Bahkan mungkin masih banyak lagi jika disebutkan. Dengan demikian, kesadaran global tidak hanya sebuah pengetahuan tentang keanekaragaman. Kesadaran global adalah sebuah pengakuan sekaligus juga penghargaan terhadap kompleksitas keanekaragaman tersebut sehingga tidak menjadi sebuah hambatan dalam berinteraksi secara global.

Dalam konteks kesadaran global, lulusan SMK harus tetap menjunjung identitas dirinya bahwa dia Indonesia, dia Pancasila, karena itu yang akan menjadi ciri keluhuran diri dan bangsa dalam pergaulan internasional. Namun, pada saat yang bersamaan, mereka juga harus menyadari bahwa dia adalah bagian dari masyarakat dunia. Kanvas industri 4.0 tidak hanya diisi oleh putra-putra terbaik Indonesia, tetapi diisi oleh putra-putra terbaik dunia. Karena itu, lulusan SMK harus siap berkompetisi dengan orang-orang yang berasal dari mana pun.

Jika dibahas lebih konkret, ada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) yang berlaku sejak 2015. MEA atau AEC ini adalah sebuah bentuk perdagangan bebas di seputar wilayah negara-negara ASEAN. Perdagangan silang menjadi sebuah kegiatan yang tidak dapat dihindari lagi. Dengan begitu, berbagai industri yang menjadi kekuatan Indonesia khususnya yang melibatkan lulusan SMK di dalamnya, harus lebih memerhatikan lagi pangsa pasar yang lebih beragam.

Persoalan berikutnya adalah sumber daya manusia (SDM). MEA menuntut adanya peningkatan mutu SDM karena kompetisi akan semakin ketat. Lulusan SMK

harus memenuhi kualifikasi yang menjadi standar dalam kompetisi ini sehingga ketika ada arus SDM yang masuk ke Indonesia, lulusan SMK tetap dapat bertahan dari serangan arus tersebut. Kesadaran global dalam lingkup MEA ini juga harus dimaknai sebagai kesempatan emas oleh lulusan SMK.



Gambar 4.2 "Masyarakat Ekonomi ASEAN"
Sumber: hpn-pusat.org

Kita tidak semestinya terjebak dengan pikiran-pikiran negatif bahwa mencari pekerjaan sulit, lapangan kerja terbatas, dan jumlah pengangguran banyak. MEA justru menjadi tantangan untuk menempa diri sebaik-baiknya agar dapat berkompetisi dengan SDM dari negara-negara lain di ASEAN sehingga tidak menutup kemungkinan lulusan SMK dapat menempati posisi-posisi pekerjaan pada negara-negara tersebut. Dengan bekal kesadaran global itulah, lulusan SMK dapat beradaptasi dengan perbedaan yang ada di Negara tujuan serta menghargai perbedaan tersebut.

Sebagaimana MEA, kita akan menghadapi era perdagangan bebas. World Trade Organization (WTO) telah menetapkan bahwa tahun 2020 dan tahun berikutnya akan berlaku pasar bebas dunia. Pada tahun tersebut, akan berlaku globalisasi total. Dengan demikian, lulusan SMK harus lebih bersiap lagi untuk masuk ke arena yang lebih luas sehingga persiapannya harus lebih baik lagi. Dengan demikian, kesadaran global juga akan semakin terasa menjadi bekal untuk menghadapi keanekaragaman yang lebih kompleks lagi di seluruh dunia.

Kompetensi kedua yang harus dimiliki lulusan SMK era industri 4.0 adalah kemampuan untuk mengembangkan diri dan berinovasi. Kompetensi tersebut antara

lain diwujudkan oleh kreativitas dan rasa ingin tahu, keterampilan dalam pemecahan masalah, dan keberanian dalam mengambil risiko.

Rasa ingin tahu yang sering muncul dari seseorang sering dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu. Dalam bukunya yang berjudul *Aesthetics and Psychobiology*, D.E. Berlyne menjelaskan bahwa rasa ingin tahu merupakan sebuah bentuk motivasi dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan upaya eksplorasi terhadap rasa ingin tahunya tersebut dengan mempelajari sebuah ketidakpastian informasi. Tujuan dari eksplorasi ini untuk memperoleh pengetahuan tentang ketidakpastian informasi tersebut. Dengan begitu, rasa ingin tahu bukanlah sesuatu yang buruk melainkan harus ada dalam diri seseorang untuk dapat mencari hal-hal baru. Lulusan SMK era industri 4.0 harus memiliki keingintahuan tinggi khususnya terhadap berbagai perkembangan di sekitarnya. Sikap apatis justru akan memberikan jarak dengan kemajuan bidang industri. Sebaliknya, rasa ingin tahu akan menjadi stimulus yang mendorong dilakukannya hal-hal baru baik sebagai bentuk percobaan maupun implementasi pengetahuan.

Albert Einstein yang tingkat jeniusnya tidak perlu diragukan lagi pernah mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki bakat yang spesial. Dia hanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa orang sekelas Einstein menyadari sepenuhnya tentang pentingnya rasa ingin tahu. Sebuah keingintahuan yang diikuti oleh langkah-langkah eksplorasi serius akan menghasilkan hal-hal baru yang besar. Keingintahuan yang tinggi selanjutnya akan menghasilkan kreativitas tanpa batas.

Dunia telah mencatat bahwa mengembangkan keingintahuan akan membangun sebuah keterampilan dengan menghasilkan kreativitas yang tinggi. Abad 21 menjadi salah tonggak peradaban baru yang menunjukkan tingginya kreativitas manusia. Satu contoh adalah Facebook, perusahaan raksasa di bidang jejaring sosial yang mulai diluncurkan pada tahun 2004. Facebook bukanlah situs jejaring sosial yang disusun dengan perencanaan matang dan direalisasikan dengan estimasi bisnis yang sempurna oleh perusahaan besar. Sebaliknya, situs ini hanyalah buah dari rasa penasaran seorang mahasiswa tingkat dua Harvard bernama Mark Zuckerberg. Zuckerberg penasaran dengan kegagalan pada proyek pertamanya, yaitu Facemash yang merupakan salah satu proyek sebagai tugas dari kampus. Rasa penasaran tersebut yang kemudian mengantarkannya menemukan Facebook.



Gambar 4.2 "Mark Zuckerberg"
Sumber: Tubefilter.com

Facebook sekarang menjelma menjadi sebuah perusahaan raksasa bidang jejaring sosial serta menginspirasi berbagai bentuk kreativitas yang sejenis seperti Twitter pada tahun 2006, Tumblr pada tahun 2007, Path pada tahun 2010, Instagram pada tahun 2010, Pinterest pada tahun 2010, dan masih banyak lainnya. Bermunculannya jejaring sosial menjadi wajah baru bagi cara interaksi masyarakat dunia. Lulusan SMK harus dapat mengambil nilai dari contoh-contoh besar tersebut yakni mengedepankan rasa ingin tahu untuk diwujudkan menjadi sebuah eksplorasi kreatif. Kreativitas akan selalu lahir dari orang-orang yang memiliki rasa penasaran tinggi.

Berikutnya, lulusan SMK juga harus memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Setiap bidang memiliki dinamika permasalahannya sendiri termasuk bidang industri. Dalam dunia industri setiap harinya akan banyak permasalahan yang dihadapi, misalnya tahapan produksi. Ada bahan baku yang tidak sesuai kualifikasi, salah satu mesin tidak berfungsi dengan baik, kualitas produk di bawah standar. Permasalahan-permasalahan yang terjadi merupakan bagian dari pematangan *skill*. Seorang lulusan SMK harus memiliki kemampuan manajemen penyelesaian masalah.

Dalam kegiatan praktik di sekolah maupun ketika praktik kerja industri (prakerin), berbagai masalah sudah disuguhkan sebagai bahan latihan. Salah satu penyelesaian masalah yang ada di dalam praktik adalah menghadapi kendala-kendala yang biasa terjadi sesuai kurikulum berdasarkan kompetensi keahlian: *database web* yang rentan peretasan pada Teknik Komputer Jaringan, ketidaksinkronan suara dan tindakan animasi bergerak pada Multimedia, suhu fluktuatif yang sering menyebabkan kematian ikan pada Agribisnis Perikanan, memperbaiki kerusakan mesin kendaraan pada Teknik Mesin. Artinya, para lulusan SMK telah kenyang dengan permasalahan sehingga mereka terbiasa untuk menyelesaikan masalah.

Masalah yang ada dalam berbagai kegiatan praktik melalui perencanaan sehingga penyelesaiannya terkonsep dengan berbagai teori yang menyertainya. Namun, masalah yang ada di dunia kerja lebih kompleks lagi karena berada pada sebuah wilayah realitas yang dipenuhi berbagai dinamika. Ada sebuah ungkapan bahwa realitas dibangun oleh sebuah sistem dinamis yang bersifat kontinu. Dapat dipahami bahwa masalah yang muncul hari ini bisa jadi belum pernah muncul sebelumnya bahkan belum ada di dalam pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya. Lulusan SMK era industri 4.0 harus siap dengan berbagai masalah baru yang semakin menantang.

Tidak semua masalah merupakan persoalan matematis. Namun, lulusan SMK akan menghadapi berbagai persoalan di bidang industri yang harus diselesaikan dengan cara berpikir kritis. Jika menggunakan strategi George Poyla, ada empat tahap dalam melakukan pemecahan masalah, yaitu 1) memahami permasalahan, 2) menyusun rencana penyelesaian, 3) menyelesaikan masalah sesuai rencana yang tersusun, dan 4) melakukan evaluasi atas langkah penyelesaian yang telah dilakukan.

Terkait dengan masalah yang baru muncul, lulusan SMK harus mencari solusi-solusi alternatif bahkan di luar apa yang pernah dipikirkan. Solusi alternatif tersebut pada akhirnya dapat menjadi sebuah kreativitas. Namun, perlu dicatat bahwa dalam penyelesaian masalah perlu penggunaan yang seimbang antara penggunaan otak dan hati. Masalah yang tidak dapat diatasi hanya dengan menggunakan pikiran adakalanya dapat diatasi dengan melibatkan penggunaan perasaan.

Lalu lulusan SMK juga harus memiliki keberanian dalam mengambil risiko. Ini

terkait dengan bahasan sebelumnya yaitu tentang kreativitas dan mengatasi masalah. Berbagai kesuksesan besar datang dari orang-orang yang memiliki kreativitas tinggi tetapi tindakannya sarat risiko.

Para ahli menyatakan bahwa keberanian untuk mengambil risiko dapat menciptakan peluang. Pada sebuah perusahaan produksi ponsel misalnya, seorang karyawan perancang aplikasi mengusulkan untuk menambah fitur aplikasi baru dan menghilangkan beberapa fitur lama pada ponsel besutan terbaru mereka. Estimasinya, langkah ini akan menaikkan citra dari merek ponsel tersebut sehingga berimbas penjualan yang signifikan. Ada dua kemungkinan yang terjadi atas langkah tersebut. Jika pengembangan fitur-fitur aplikasi berjalan sesuai dengan rencana, karyawan tersebut akan mendapatkan apresiasi yang besar. Namun, jika gagal, karyawan tersebut dapat mengalami sanksi pemecatan.

Seperti itulah keberanian mengambil risiko, akan selalu memiliki dua dampak yaitu berupa risiko baik dan risiko buruk. Namun lulusan SMK era industri 4.0 harus berani mengambil risiko untuk dapat terus melebur di dalamnya. Era ini membutuhkan kreativitas dan keberanian mengambil risiko dari para pelakunya, sudah dibuktikan dengan berbagai penemuan terbaru seperti dicontohkan.

Kompetensi ketiga yang harus dimiliki oleh lulusan SMK era industri 4.0 adalah keahlian untuk berkomunikasi secara efektif yang diwujudkan dengan kemampuan kerja tim serta kolaborasi, tanggung jawab pribadi dan sosial, komunikasi interaktif, serta orientasi nasional dan global. Perlakuan di dalam industri era ini tidak bisa jika hanya bergerak sendiri dan terkungkung hanya di dalam dunianya sendiri.

Kemampuan untuk dapat bekerja sama dalam sebuah tim serta berkolaborasi menjadi tuntutan tersendiri dalam dunia industri. Ketika memproduksi sebuah kendaraan misalnya. Harus ada kesadaran diri sebagai bagian dari tim dan penghargaan terhadap kontribusi orang lain dalam tim tersebut. Dengan begitu, para pekerja di ruang produksi harus memiliki frekuensi yang sama agar perakitan kendaraan sesuai dengan prosedur baik dari segi estimasi waktu, presisi perakitan, ketepatan komponen, dan lainnya. Begitu juga pada level pemegang kebijakan. Harus ada kesepakatan tim antara perancang desain, insinyur teknis, penguji keselamatan, analis ekonomi, dan seterusnya hingga purnajual.

Seorang lulusan SMK tidak cukup hanya dengan mengandalkan kompetensi

di bidang keahliannya. Ia juga harus mampu berinteraksi secara efektif untuk dapat berfusi ke dalam setiap satuan unit kerja mana pun sehingga selalu siap menjadi unsur komposisi super tim.



Gambar 4.3 “Siswa SMK”
Sumber: psmk.Kemdikbud.go.id

Lulusan SMK pun harus memiliki rasa tanggung jawab pribadi dan sosial. Artinya, segala perilakunya secara umum menggambarkan apa yang hendak ditunjukkan tentang dirinya. Namun, di luar dirinya ada nilai-nilai sosial yang harus dipatuhi. Dalam konteks komunikasi yang efektif di lingkungan kerja misalnya, tanggung jawab pribadi dan sosial adalah sebuah kesadaran sikap untuk beretika bahwa setiap individu merupakan entitas yang dibatasi oleh kepentingan orang banyak di dalam lingkungan tersebut.

Lulusan SMK juga harus dapat berkomunikasi secara interaktif. Pada era ini, jika ada pihak yang pasif akan tertinggal. Dalam kegiatan berkomunikasi, tidak boleh hanya mengikuti dan hanya mendengarkan melainkan ikut aktif di dalamnya sehingga komunikasi yang berjalan berlangsung secara interaktif.

Komunikasi interaktif selalu berjalan dua arah baik itu ketika berhadapan dengan manusia, petunjuk manual, bahkan dengan mesin. Model komunikasi ini

memungkinkan pelaku di dalamnya tidak bersikap statis. Misalnya, saat menghadapi petunjuk manual yang tidak berterima, ada umpan balik tertentu sehingga arus informasi tetap dapat berjalan.

Selanjutnya, bahasan tentang orientasi nasional dan global sebetulnya sudah disinggung pada pemaparan tentang kesadaran global. Hanya saja, kesadaran terkait dengan sikap sementara orientasi nasional dalam global dalam cakupan ini adalah keefektifan dalam berkomunikasi. Lulusan SMK harus dapat berkomunikasi secara efektif baik dalam skala nasional maupun dalam skala global. Untuk itu, perlu ada upaya untuk mempelajari berbagai bahasa serta memahami keanekaragaman latar belakang dan budaya.

Kompetensi keempat yang harus dimiliki oleh lulusan SMK era industri 4.0 adalah kecakapan hidup yang ditunjukkan dengan bentuk kepemimpinan dan tanggung jawab, menjunjung etika dan moral, produktivitas dan akuntabilitas, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi, lintas budaya dan sosial, serta inisiatif dan pengarahannya diri. Kecakapan hidup merupakan sebuah kompetensi yang bersifat personal sebagai hasil menempa diri dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Kecakapan hidup terkait dengan kepemimpinan dan tanggung jawab selalu relevan dengan setiap perubahan zaman, juga pada zaman industri 4.0 ini. Lulusan SMK akan menempati berbagai posisi, misalnya pekerja biasa maupun sebagai petinggi perusahaan saat tiba waktunya. Namun, kepemimpinan dan tanggung jawab tidak hanya berlaku bagi petinggi, justru dimulai dari pekerja.

Kepemimpinan dan tanggung jawab bukanlah tentang jabatan melainkan tentang sebuah karakter yang harus melekat pada setiap pekerjaan dengan posisi apa pun. Jika karakter tersebut telah melekat, apa pun posisinya akan ada sebuah tanggung jawab terhadap setiap hal yang dilakukan juga ada kemauan untuk memimpin; utamanya adalah memimpin diri sendiri agar tidak dikendalikan ego.

Selain itu, keahlian dalam menjunjung etika dan moral merupakan keahlian yang penting. Ketika memasuki dunia kerja, tidak hanya berlaku aturan-aturan tertulis semisal SOP dan prosedur kerja lainnya. Namun, ada pula aturan-aturan yang tidak tertulis yakni etika dan moral. Lulusan SMK harus dapat menjaga etika dan moralnya karena itulah yang akan menunjukkan nilai dirinya, bukan kecerdasan pikirannya semata.

Produktivitas dan akuntabilitas adalah keahlian lain yang harus dimiliki. Produktivitas adalah kemampuan lulusan dalam membuat berbagai produk sesuai dengan bidang keahliannya. Ada keterkaitan erat antara produktivitas dengan akuntabilitas. Ketika produk dalam proses pembuatan hingga selesai, harus ada tanggung jawab atas kualitas akhir yang dihasilkan. Pada titik inilah akuntabilitas berperan.

Berikutnya, lulusan SMK harus memiliki sifat fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Fleksibilitas di lingkungan kerja memungkinkan pekerja untuk tidak menjadi robot. Sifat fleksibilitas ini dapat terbentuk seiring dengan kemampuan beradaptasi untuk menghadapi berbagai situasi kerja yang berbeda.

Bahasan lintas budaya dan sosial juga sudah disinggung pada literasi multikultural. Perbedaannya, jika literasi multikultural berfokus kepada arus informasi yang merambah keanekaragaman, lintas budaya dan sosial adalah cara seorang menempatkan diri sebagai individu yang merupakan bagian dari proses terjadinya perlintasan budaya dan sosial karena industri 4.0 melibatkan unsur-unsur yang sangat kompleks. Dengan demikian, tidak akan ada persoalan jika bekerja dengan orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda.

Terakhir adalah inisiatif dan pengarahan diri. Kecakapan ini merupakan kecakapan hidup yang mengarahkan kemampuan diri untuk menetapkan sasaran dari kegiatan yang dilakukan. Kecakapan ini membuat lulusan ketika bekerja tidak harus selalu diawasi. Tanpa pengawasan dia akan bekerja secara prosedural dengan mengedepankan langkah-langkah inisiatif.

Reorientasi Lulusan SMK

Keempat bidang kompetensi yang harus dimiliki lulusan SMK pada era industri 4.0 ini dengan penjabaran luas di atas, tidak bisa begitu saja dimiliki. Harus ada langkah konkret dari berbagai pihak terkait untuk mewujudkannya. Paradigma pendidikan SMK harus diubah dari *push* 'mendorong' menuju *pull* 'menarik'. Dalam paradigma mendorong, lembaga pendidikan SMK menarik para calon peserta didik sebagai 'bahan mentah' yang kemudian diolah sehingga menjadi produk yang siap dipasarkan. Semakin banyak bahan mentah yang diambil, akan semakin banyak pula produk untuk dikonsumsi tersebut. Persoalannya timbul belakangan bahwa produk

siap konsumsi ini semakin banyak sementara peminatnya terbatas maka akan terjadi kelebihan stok.

Paradigma menarik berlaku sebaliknya. Bahan mentah yang sudah disiapkan tidak diolah dahulu sebelum dikaji kebutuhan konsumen seperti apa. Konsumen membutuhkan produk dengan kriteria tertentu maka pengolahan yang dilakukan akan dilakukan dengan standar tertentu agar memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh konsumen.

Industri 4.0 membutuhkan lulusan SMK dengan empat bidang kompetensi di atas. Empat kompetensi inilah yang kemudian menjadi fokus utama lembaga pendidikan SMK agar lulusannya nanti sesuai dengan kriteria tersebut. Namun, lembaga pendidikan SMK tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi dari semua pihak sebagai satuan pendidikan yang dimulai dari penilaian dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemegang kebijakan. Kurikulum pendidikan dan cara penyampaiannya pun harus disesuaikan, kemudian guru dan infrastruktur di sekolah juga harus diadaptasi dengan tuntutan tadi. Selain itu, manajemen sekolah juga harus turut menyesuaikan.

Tidak boleh terlewat pihak lainnya yang harus terlibat secara sinergis adalah keluarga dan masyarakat secara luas. Bagaimanapun keluarga adalah lingkungan pertama dan utama. Sebaik apa pun pengajaran dan kegiatan praktik yang dilaksanakan di sekolah, jika lingkungan keluarga tidak kondusif, akan ada dampak psikologis yang diterima oleh peserta didik di SMK. Begitu juga masyarakat luas yang merupakan bagian lain dari lingkungan peserta didik idealnya sudah siap bahkan mendukung adanya transformasi menuju industri 4.0.

Pembentukan empat kompetensi sebagai kebutuhan industri 4.0 berkaitan erat dengan proses globalisasi yang sudah lama berlangsung, juga harus dikaitkan dengan isu-isu nasional yang tidak boleh terabaikan. Salah satu hal yang memiliki keterkaitan dengan proses globalisasi adalah lahirnya generasi Z, yaitu generasi yang lahir pada rentang 1995 hingga tahun 2014. Generasi inilah yang sedang, telah, dan akan menjadi lulusan SMK berkriteria 4.0, dikenal juga dengan generasi instan sehingga predikat tersebut harus juga menjadi bahan perhatian.

Era industri 4.0 yang membutuhkan empat kompetensi yang di antara pengupayaannya adalah mengubah paradigma mendorong ke menarik, juga harus

ada perubahan arah dinamika SMK. Sebelumnya, kurikulum yang diterapkan untuk orientasi nasional-global. Dari analisis, orientasi ini memiliki kelemahan karena fokusnya terlalu luas. Dengan demikian, harus ada perubahan dari kurikulum lokal-global. Dengan kurikulum ini, pendidikan di SMK dapat mengangkat berbagai kearifan lokal yang ada untuk kemudian diangkat menuju kancah global.

Perubahan orientasi kurikulum ini akan berimplikasi pada lulusan yang dicetak SMK. Kurikulum nasional-global tadi akan menghasilkan lulusan yang siap kerja, atau para pencari kerja. Selain bekerja, lulusan SMK memiliki peluang untuk melanjutkan studi ke politeknik atau akademi komunitas. Bahkan, dengan orientasi kurikulum lokal-global, lulusan SMK diproyeksikan untuk menjadi wirausaha atau menciptakan lapangan kerja. Kurikulum ini dapat merangsang kemampuan untuk mengeksplorasi berbagai potensi lokal yang dijadikan untuk berwirausaha sehingga memenuhi kualifikasi untuk masuk ke pasar global.

BAB 5

PEMBARUAN SMK BERKELANJUTAN

Setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, setelah Perang Dunia II dimenangkan oleh sekutu, Jepang yang hancur saat itu segera memperbaiki diri. Salah satu hal pertama yang mengalami perbaikan ialah pendidikan. Sebelum Perang Dunia II, pendidikan Jepang berorientasi pada kaisar. Kaisar sebagai contoh bagi masyarakat Jepang. Nilai-nilai yang dianut ialah nilai-nilai kesetiaan dan kepatuhan. Setiap warga Jepang harus hidup secara harmonis dan sederhana, patuh dan setia kepada keluarga, dan menjunjung rasa kasih sayang antar-sesama manusia. Seni juga menjadi hal yang harus dijiwai oleh masyarakat Jepang kala itu.

Namun, saat akhir Perang Dunia II, Jepang sampai pada keterpurukan, kondisi Jepang telah berubah pada titik terendah. Seketika mereka bergegas membangun diri melalui pendidikan. Mereka sadar bahwa kondisi telah berubah. Pada tanggal 3 November 1946, Jepang mengubah kebijakan pendidikan mereka yang berbasis hak asasi manusia. Dalam haluan yang baru, pendidikan menjamin kebebasan seseorang untuk berpikir, memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan. Dengan model pendidikan tersebut, kini Jepang dikenal sebagai negara yang maju, baik

sumber daya manusianya sebagai hasil dari pendidikan maupun industrinya sebagai hasil dari kerja keras bangsa Jepang.

Hal yang dapat kita ambil dari ilustrasi di atas ialah perubahan. Saat zaman telah berubah, pendidikan pun harus berubah karena tantangan pada zaman ini akan berbeda dengan tantangan pada zaman sebelumnya. Seperti yang telah disebutkan di bab sebelumnya, saat ini Indonesia telah berkembang sedemikian rupa dari segi ekonomi. Dunia industri telah memasuki era disrupsi. Dengan demikian, kebutuhan dunia kerja pun berubah. Untuk menyesuaikan hal itu, ada empat kompetensi yang harus dipenuhi oleh lulusan dalam menghadapi iklim baru dunia industri, yakni (1) *information, media, and technology skills*, (2) *learning and innovation skills*, (3) *effective communication skills, life and carrier skills*, (4) *Life and Career Skills*. Tentu saja, untuk mencapai tujuan/kompetensi tersebut pemerintah harus membuat strategi-strategi, salah satunya dengan menyelaraskan kurikulum.

Penyelarasan Kurikulum

PERUBAHAN JUMLAH BIDANG, PROGRAM, DAN KOMPETENSI KEAHLIAN

Pada mulanya, kurikulum SMK mengacu pada SK Dirjen No. 4678/D/KEP/MK/2016. Surat Keputusan Dirjen tersebut mengatur berbagai hal, di antaranya jumlah bidang, program, dan kompetensi keahlian dan komposisi jam pelajaran. Kemudian, pada tanggal 7 Juni 2018, Perdirjen No.06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) disahkan. Perubahan yang terjadi ada pada aturan mengenai jumlah bidang, program, dan kompetensi keahlian dan komposisi jam pelajaran.

No	Bidang	Program	Kompetensi	Program Pend.	
				3 th	4 th
7	Bisnis dan Manajemen	7.1. Bisnis dan Pemasaran 7.4. Logistik	7.1. Retail 7.2. Manajemen Logistik 7.4. Manajemen Logistik		v
8	Pariwisata	8.1. Perhotelan dan Jasa Pariwisata	8.1. Hotel dan Restoran		v
9	Seni dan Industri Kreatif	9.8. Seni Broadcasting dan Film	9.8. Produksi Film		v

Gambar 5.1 "Perubahan Jumlah Bidang, Program, dan Kompetensi"

Untuk jumlah bidang, program, dan kompetensi keahlian, perubahan terjadi pada bidang Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, dan Seni dan Industri Kreatif. Dalam SK Dirjen No. 4678/D/KEP/MK/2016, Bidang Bisnis Manajemen hanya memiliki tiga program keahlian kemudian pada perat dirjen yang baru, ditambah satu program keahlian, yakni Program Keahlian Logistik. Selain itu, pada SK Dirjen, bidang Bisnis dan Manajemen hanya memiliki lima kompetensi keahlian. Kelima kompetensi keahlian tersebut ditempuh selama tiga tahun. Sedangkan, pada Perdirjen yang baru, ada penambahan kompetensi keahlian dalam bidang Bisnis dan Manajemen, yakni Kompetensi Keahlian Retail dan Kompetensi Keahlian Manajemen Logistik. Dua kompetensi keahlian baru itu harus ditempuh masing-masing selama tiga tahun (Retail) dan empat tahun (Manajemen Logistik). Seperti yang telah disebutkan, perubahan ini juga terjadi pada bidang Pariwisata dan Seni dan Industri Kreatif. Pada bidang Pariwisata, terdapat tambahan satu kompetensi keahlian yang harus ditempuh selama empat tahun, yaitu Kompetensi Keahlian Hotel dan Restoran. Sementara itu, dalam bidang Seni dan Industri Kreatif, terdapat satu kompetensi keahlian baru yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tiga tahun, yakni Kompetensi Keahlian Produksi Film.

Penambahan-penambahan yang terjadi tentu saja ditujukan untuk menjawab kebutuhan industri, misalnya, pada bisnis retail. Penjualan ritel modern ditaksir menembus Rp256 triliun pada 2019, atau tumbuh sekitar 10% dari realisasi tahun lalu. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyatakan bahwa proyeksi tahun 2019 tersebut terbilang moderat, tetapi masih lebih baik jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan bisnis ritel modern pada 2017 yang hanya 3,7%. Berdasarkan data Aprindo, nilai penjualan ritel modern pada 2016, 2017, dan 2018 berturut-turut mencapai Rp205 triliun, Rp 212 triliun, dan Rp233 triliun.

Kinerja industri ritel modern pada 2019 dan ke depan akan dipengaruhi oleh tren belanja konsumen yang cenderung menggunakan belanja elektronik, sehingga persaingan dengan pelaku perdagangan elektronik akan semakin ketat. Jadi, belanja elektronik ini cukup kuat memengaruhi pola berbelanja masyarakat. Transaksi secara luring akan sedikit mengalami hambatan pertumbuhan. Mengutip data McKinsey, nilai transaksi dagang-el RI diprediksi menyentuh US\$55 miliar—US\$65 miliar pada 2022, alias tumbuh delapan kali lipat dari realisasi 2017 yang mencapai US\$8 miliar.

Ridho Marpaung, dalam artikelnya yang berjudul “Memanfaatkan Momentum Besar Sektor Ritel 2018”, menjelaskan bahwa pada tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya bisnis retail akan berkembang. Menurutnya, pada dasarnya, perusahaan retail tidak pernah mengalami kerugian, hanya penurunan keuntungan. Jika suatu perusahaan dapat mengombinasikan pemasaran dan penjualan melalui media daring dan luring, perusahaan tersebut akan memiliki kekuatan.

Selain bisnis retail, kini, bisnis logistik pun tengah berkembang. Sejak tahun 2016, pemerintah telah melakukan infrastruktur konektivitas yang ditandai dengan pembangun 27 pelabuhan komersial. Artinya, akan terdapat puluhan atau bahkan ratusan lapangan kerja baru di bidang ini. Jika akses banyak dibuka ke daerah-daerah, bisnis logistik akan semakin berkembang. Selain itu, tenaga kerja logistik sangat dibutuhkan pasar pada era disrupsi ini, saat bisnis berbasis daring tengah berkembang pesat.

Sebagaimana dilansir Bisnis.com, Direktur Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Imam Gandhi, mengatakan bahwa kini banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil di bidang logistik. Kekurangan tenaga kerja selama ini ialah dalam hal keterampilannya. Mahasiswa yang mempelajari ilmu logistik hanya diajarkan secara teoretis, tidak sampai pada praktik sehingga dibutuhkan waktu untuk mempelajari lebih dalam mengenai logistik. Sedangkan, perusahaan tidak memiliki dana untuk mengadakan pelatihan kepada karyawan baru; perusahaan sangat membutuhkan pekerja yang siap pakai. Tentu saja, ini adalah peluang kerja bagi lulusan SMK bidang logistik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tenaga kerja yang terampil dalam bidang logistik masih sangat minim. Di Amerika, Biro Tenaga Kerja Amerika memperkirakan lapangan kerja yang akan terbuka dalam bidang transportasi/logistik pada tahun 2030 akan meningkat sebanyak 22%. Kebutuhan perusahaan atas tenaga kerja logistik semakin meningkat seiring dengan berkembangnya perusahaan. Hal-hal di atas terjadi pula pada bidang Hotel dan Restoran.

Kini, hotel dan restoran semakin besar seiring dengan bertambahnya tujuan wisata baru di Indonesia. Menurut Akuino dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata (Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran) di Kota Batu”, Sektor pariwisata, khususnya hotel dan restoran, berperan

dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran berpengaruh terhadap keterserapan tenaga kerja di Kota Batu. Ia mengatakan, jika PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran meningkat sebesar 1%, akan terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut sebesar 43%.

Seperti yang dilansir harian Analisa, menurut Direktur Eksekutif Hotel Indonesia, Eva Christina Ginting, bisnis dan restoran semakin meningkat karena kondisi ekonomi di Indonesia sedang stabil. Namun, ia mengakui bahwa terjadi persaingan yang ketat untuk sektor perhotelan. Hal yang sama juga dikatakan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sebagaimana dilansir Marketeers.com. Menurut PHRI, sektor perhotelan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2017, perkembangan sektor perhotelan hanya mencapai angka 7%–8%. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya rumah yang dijadikan hotel (hotel berbasis aplikasi) sebagai dampak dari sharing economy. Kondisi ini, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat juga disebut dampak dari era disrupsi.

Kini, pembangunan hotel di kota-kota besar memang sedang meningkat. PHRI mencatat, terdapat 290 ribu kamar dari 2.300 hotel berbintang yang dibangun. Sementara itu, menurut data BPS, terdapat 285 ribu kamar dari hotel non-bintang di Indonesia. Jika ditotal, jumlahnya bisa mencapai 600 kamar. Sedangkan, permintaan dari konsumen tidak sebesar itu.

Selain itu, seperti yang dilansir oleh Republika, Wakil Ketua PHRI DI Yogyakarta mengatakan, sektor perhotelan kini tengah kekurangan tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi. Dalam kondisi ini, justru tenaga kerja SMK yang terampil dapat mengambil peran. Dengan diisi oleh tenaga kerja yang terampil dari lulusan SMK di bidang hotel dan restoran, pelayanan hotel akan meningkat. Dengan demikian, hotel akan dapat bersaing dengan hotel berbasis aplikasi.

Selain membuka kompetensi keahlian baru di atas, kompetensi keahlian film pun dibuka. Dalam ini, film memiliki peluang bisnis dan peluang kerja yang baik. Jika Indonesia memiliki 2.000 bioskop, bisnis ini akan banyak menyerap banyak tenaga kerja. Kini, memang masih banyak kota yang belum memiliki bioskop; pada tahun 2011, dari 498 kota, hanya 433 kota saja yang memiliki bioskop. Artinya, jumlah layar di Indonesia akan meningkat sehingga produksi film pun akan meningkat pula.

Persaingan dalam bidang ini masih amat ringan. Tenaga kerja akan terserap lebih besar apabila produksi film sudah ada di Indonesia.

Dalam hal ini, film tentu saja bukan hanya terbatas pada film yang ditayangkan di bioskop, film televisi atau sinetron pun masuk dalam bidang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa industri film Indonesia semakin berkembang. Stasiun televisi baru banyak berdiri; secara otomatis kebutuhan atas tayangan film pun semakin meningkat. Selain televisi, banyak platform baru yang bermunculan, misalnya Youtube dan televisi daring. Platform bioskop, televisi, dan media daring (Youtube dan televisi daring) semakin bertumbuh, dengan demikian semakin bertumbuh pula industri film. Sementara itu, tenaga kerja yang terampil dalam bidang ini tidak terlalu banyak. Tenaga-tenaga kerja yang telah ada, pada umumnya, tidak menempuh pendidikan film. Hal ini dikarenakan sekolah film yang terbatas, khususnya pada jenjang sekolah lanjutan tingkat atas. Kondisi ini menjadi peluang tersendiri bagi siswa dan tenaga kerja lulusan SMK.

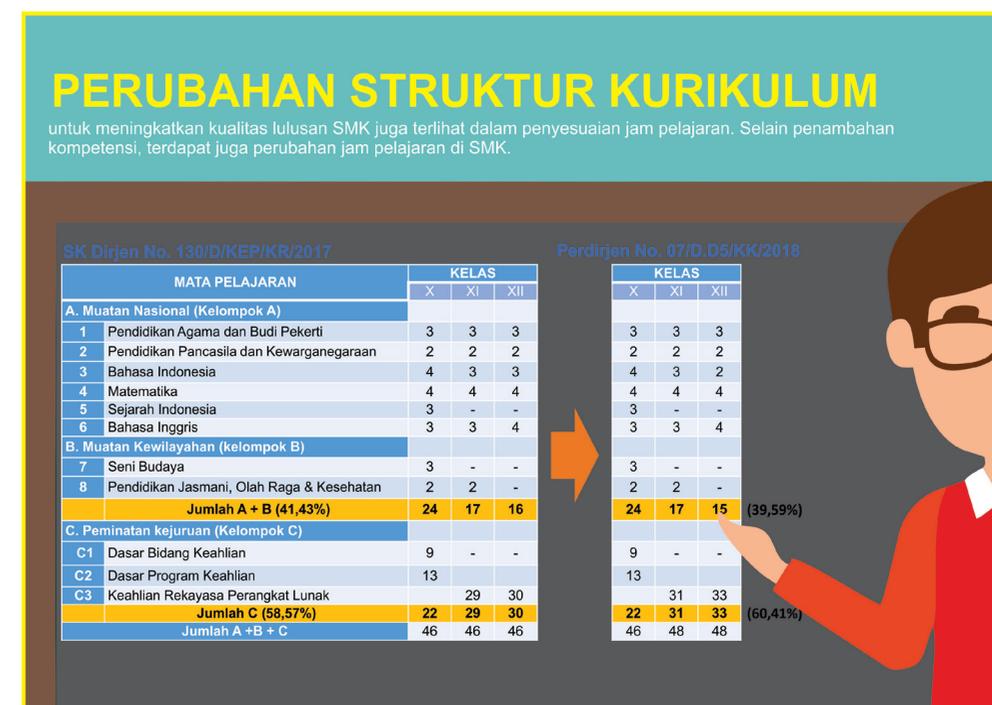
Pembaruan Sistem

Ikhtiar untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK juga terlihat dalam penyesuaian jam pelajaran. Selain penambahan kompetensi, terdapat juga perubahan jam pelajaran di SMK. Dalam hal ini, jam pelajaran peminatan kejuruan berubah di kelas XI; semula hanya 29 jam menjadi 31 jam. Selain kelas XI, jam pelajaran peminatan kejuruan kelas XII pun berubah menjadi lebih banyak atau bertambah; semula 30 jam menjadi 33 jam. Di kelas XII, terdapat pula penyesuaian jam pelajaran, yakni 4 jam pelajaran.

Dalam Surat Edaran Direktur PSMK No. 4540/D5.3/TU/2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan, dijelaskan siswa kelas XII akan mendapatkan 4 jam pelajaran bahasa asing. Sekolah dapat menentukan porsi 4 jam pelajaran itu. Sekolah dapat menggunakan 4 jam pelajaran itu untuk pelajaran Bahasa Inggris saja atau 2 jam pelajaran untuk pelajaran Bahasa Inggris dan 2 jam pelajaran lainnya untuk pelajaran bahasa asing lainnya atau 4 jam pelajaran tersebut digunakan untuk pelajaran bahasa asing lainnya. Jenis bahasa asing yang dapat dipelajari ialah bahasa Jepang, Korea, China, Arab, Jerman, dan Prancis.

Selain itu, mata pelajaran yang mendapat penyesuaian ialah mata pelajaran

Bahasa Indonesia. Pada mulanya, mata pelajaran ini mendapat porsi tiga jam pelajaran untuk kelas XII. Kemudian, peraturan dirjen menyesuainya menjadi dua jam pelajaran saja untuk kelas XII. Jam-jam yang hilang itu akan dialokasikan untuk mata pelajaran lainnya, misalnya mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan (PKK). Mata pelajaran PKK ini mendapat penambahan yang cukup banyak. Pada mulanya, mata pelajaran PKK mendapat 5 jam pelajaran di kelas XI dan XII serta delapan jam pelajaran di kelas XIII. Pada kurikulum yang baru, mata pelajaran ini mendapat tambahan, yakni 7 jam pelajaran di kelas XI, 8 jam pelajaran di kelas XII, dan 10 jam pelajaran di kelas XIII.



Gambar 5.2 "Perubahan Struktur Kurikulum"

Di dalam pembelajaran, tentu saja terdapat perubahan-perubahan. Mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan (PKWU) berubah menjadi mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan (PKK). Perubahan ini berimpas pada guru. Guru yang semula mengajar PKWU harus berganti menjadi pengajar PKK.

Pada mulanya PKWU adalah mata pelajaran adaptif, kemudian setelah berganti menjadi PKK menjadi mata pelajaran produktif. Artinya, guru harus mengikuti

program keahlian ganda. Selain itu, guru yang memiliki keahlian produktif dapat mengajar mata pelajaran ini dan tentu saja dibantu guru kewirausahaan.

Ada beberapa alternatif untuk menghadapi perubahan ini. Pertama, guru PKWU dapat mengajar seluruh jam pelajaran pada program keahlian yang bersangkutan. Alternatif yang kedua adalah dengan cara membagi dua rombongan belajar dalam satu kelas. Setiap rombongan praktik diampu oleh satu guru PKWU dan/atau guru produktif pada program keahlian yang bersangkutan. Alternatif yang ketiga adalah dengan membagi rombongan belajar menjadi kelas teori dan kelas praktik. Kelas teori diampu oleh satu orang guru PKWU. Sementara itu, kelas praktik diampu oleh guru produktif. Porsi antara teori dan praktik adalah 30% untuk teori dan 70% untuk praktik.

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, pada saat ini, SMK juga diarahkan untuk berwirausaha, selain menjadi pekerja atau masuk politeknik. Melalui kurikulum lokal-global, lulusan SMK diproyeksikan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, siswa/lulusan SMK dapat mengembangkan potensi lokal menjadi produk global. Di wilayah inilah fokus wirausaha yang akan dilakoni oleh siswa/lulusan SMK. Ini menjadi daya tawar produk SMK untuk memasuki pasar global.

Tahap itu dimulai dari perubahan kurikulum yang telah dijelaskan di atas. Dengan ditambahkan jam pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan, diharapkan siswa dapat menghasilkan produk yang inovatif. Faktanya, telah banyak produk kreatif yang telah dihasilkan oleh siswa SMK.

Dalam kegiatan Young Technopreneur Expo 2019 yang diselenggarakan selama dua hari pada tanggal 22 s.d. 23 Februari 2019 di Jakarta, hasil karya kewirausahaan yang dimiliki masing-masing sekolah dipamerkan. Kegiatan ini diikuti sebanyak 30-an Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Pulau Jawa, dengan Bidang wirausaha yang dipamerkan, di antaranya, farmasi, tata boga, dan otomotif. Hal tersebut di atas merupakan hasil sebuah proses pembelajaran Teaching Factory (TEFA). Model pembelajaran tersebut berbasis produksi/jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. Pelaksanaan teaching factory menuntut keterlibatan mutlak pihak industri sebagai pihak yang relevan menilai kualitas hasil pendidikan di SMK.

Selain itu, sejak tahun 2018, pemerintah telah meluncurkan Program Sekolah Pencetak Wirausaha. Program ini merupakan model pengembangan pembelajaran berdasarkan praktik usaha berbasis omset pemasaran. Program ini dilaksanakan dengan metode pendampingan secara terpadu dengan pola jarak jauh menggunakan TIK dan dilaksanakan melalui integrasi mata pelajaran kejuruan SMK, yaitu Simulasi dan Komunikasi Digital dan Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Program ini bertujuan mencari solusi melalui pengayaan praktikum yang membiasakan siswa dalam mengasah penalaran dan kreativitas berbasis nilai ekonomi.

SMK dan Sertifikasi

Selain mengubah kurikulum, untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK, pemerintah melaksanakan sertifikasi lulusan SMK. Dasar hukum sertifikasi itu adalah Instruksi Presiden (Inpres) No.9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Dalam hal ini, BNSP mendapatkan tugas untuk (1) mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK; (2) mempercepat sertifikasi kompetensi bagi peserta didik dan tenaga pendidik SMK; (3) mempercepat pemberian lisensi bagi SMK sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi pihak pertama.

Pelaksanaan sertifikasi ini dilakukan secara nasional. Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Sertifikat bagi Siswa SMK, kegiatan sertifikasi akan dilakukan pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Berdasarkan pedoman pelaksanaan, terdapat empat pilihan pola untuk pelaksanaan sertifikasi bagi lulusan SMK. Pola pelaksanaan sertifikasi oleh LSP P-1 SMK hanya untuk siswa dari SMK yang bersangkutan dan siswa SMK yang ditetapkan menjadi jejaring kerja (networking) sertifikasi kompetensi LSP,P1 SMK ditetapkan oleh Direktorat Pembina SMK dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi. Pola Pelaksanaan Sertifikasi oleh LSP P2 hanya untuk siswa dari SMK-SMK yang belum memiliki LSP P1 dan berada dalam sektor dan/atau lingkup wilayah tertentu. Pola pelaksanaan sertifikasi oleh LSP P3 hanya untuk siswa dari SMK yang memiliki kesamaan skema sertifikasi dengan LSP P3 tetapi belum memiliki LSP P1 dan LSP P2 pada wilayah tertentu. Pola pelaksanaan sertifikasi oleh Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK) hanya untuk siswa SMK pada wilayah tertentu dan karena pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh BNSP dan Direktorat Pembina SMK dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi.

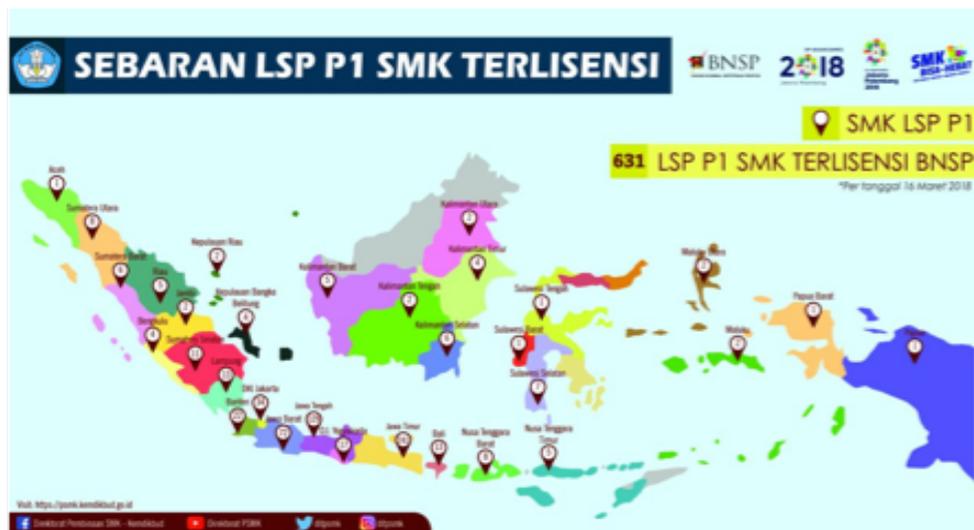
Selama ini sertifikasi telah dilaksanakan. Berdasarkan data Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud, telah diselesaikannya 81 skema sertifikasi; 78 skema sertifikasi di antaranya merupakan skema baru, sementara itu 3 skema sertifikasi lainnya merupakan skema pembaharuan. Pada tanggal 18 April 2019, dilaksanakan acara pengesahan 81 skema sertifikasi untuk LSP P1 SMK. Dengan disahkannya 81 skema sertifikasi tersebut, infrastruktur sertifikasi kompetensi bagi LSP P1 SMK bertambah menjadi 142 skema sertifikasi kompetensi. Skema yang baru tersebut dapat segera digunakan oleh SMK pendirian LSP P1 SMK ataupun penambahan ruang lingkup LSP P1 SMK. Dengan semakin meningkatnya akses sertifikasi melalui LSP P1 SMK, diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas SMK untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.

Selama ini, telah cukup banyak sekolah yang telah terlisensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1. Berdasarkan Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud, sampai dengan bulan Maret 2019, 861 LSP P1 SMK telah mendapatkan lisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dari jumlah tersebut, telah ditetapkan jumlah jejaring kerja LSP P1 SMK sebanyak 4.773 SMK yang mampu memberikan akses sertifikasi sekurang-kurangnya bagi 1.174.764 siswa SMK.

Untuk meningkatkan akses sertifikasi kompetensi bagi peserta didik SMK, maka Kemdikbud berupaya untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur sertifikasi kompetensi di SMK antara lain dengan mengembangkan Skema Sertifikasi KKNI Level II yang dapat digunakan oleh LSP P1 SMK.

Kerja sama antara Kemdikbud dan BNSP untuk menyusun skema sertifikasi telah dilakukan sejak tahun 2015; terdapat 64 skema sertifikasi yang telah digunakan oleh LSP P1 SMK. Skema sertifikasi merupakan pengemasan paket kompetensi dan persyaratan lain yang berkaitan dengan kategori jabatan dan keterampilan tertentu.

Dengan perubahan-perubahan yang dilakukan pada kurikulum dan sistem sertifikasi, diharapkan kualitas lulusan SMK dapat meningkat. Mereka menjadi lulusan yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau menjadi tenaga kerja yang terampil dan bersertifikat. Bahkan, mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Hal ini menjadi langkah nyata bagi SMK untuk menuju perubahan yang berkelanjutan.



Gambar 5.3 “Sebaran LSP P1 SMK Terlisensi”

SMK 4.0

Penemuan mesin uap pada abad ke-18 menandai revolusi industri pertama di dunia: revolusi industri 1.0. Dengan ditemukannya mesin uap, dinamika industri pun berubah pula. Mesin uap membuat industri menjadi lebih produktif, misalnya sebuah pabrik tekstil di Inggris yang menggunakan mesin uap untuk memproduksi produk tekstil. Pada saat itu, pendapatan per kapita negara-negara Eropa meningkat sebesar enam kali lipat.

Pada tahun 1900-an, revolusi industri 2.0 terjadi; ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik dan motor pembakaran dalam. Pada periode ini, muncul penemuan-penemuan baru, misalnya mobil, pesawat terbang, pesawat telepon, dsb. Revolusi industri 2.0 ini memengaruhi industri yang terdapat di Indonesia, misalnya agro industri dan pertambangan.

Kemudian, revolusi industri 3.0 terjadi pada periode 1970-an hingga 1990-an; ditandai saat otomatisasi dilakukan di industri padat karya. Selain itu, pada periode ini, internet telah bekerja secara efektif memangkas jarak, ruang, dan waktu. Manusia dapat berkomunikasi secara lebih mudah.

Kini, revolusi industri 4.0 berlangsung. Revolusi ini terkait dengan efisiensi

mesin dan manusia yang terkoneksi dengan internet. Revolusi ini terkait juga dengan otomatisasi dan pertukaran data. Revolusi industri 4.0 ditandai juga dengan disrupsi yang terjadi di berbagai sektor industri. Terjadi perubahan dinamika yang signifikan dalam industri 4.0. Banyak perusahaan yang gagal bertahan dalam era ini. Keruntuhan perusahaan-perusahaan itu terjadi karena mereka tidak dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Dengan demikian, revolusi industri 4.0 menuntut perubahan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan.

Industri 4.0 yang menuntut adanya berbagai perubahan di dalam implementasi pengajarannya mendorong adanya perubahan bidang manajemen. Manajemen lembaga-lembaga pendidikan SMK harus beralih menuju manajemen berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK). TIK menjadi sebuah keniscayaan karena merupakan rangka dari zaman modern.

Integrasi TIK pada Sekolah secara Konsisten



Gambar 6.1 "Fasilitas TIK di SMK"
Sumber: methodist8.sch.id

Integrasi TIK pada sekolah harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya pemenuhan tuntutan yang sekadarnya atas perubahan orientasi pendidikan. Integrasi

TIK akan mengalami evaluasi panjang pada tahun-tahun yang diproyeksikan sebagai tahun yang menjadi capaian beberapa level pengembangan TIK.

Telah dirancang *roadmap* yang menjadi proyeksi untuk pengembangan level tersebut. *Roadmap* integrasi TIK pada SMK disusun menjadi empat satuan waktu dengan masing-masing pencapaiannya, yaitu *available* 'tersedia', *useable* 'dapat digunakan', *reliable* 'dapat diandalkan', dan *continuous movement* 'perbaikan berkelanjutan'. Pencapaian-pencapaian tersebut menunjukkan tingkatan target atas integrasi TIK. Pada masing-masing tingkatan, akan ada pembagian level yang menunjukkan tingkat kematangan *stakeholder* berdasarkan ukuran predikat pada level tersebut.



Gambar 6.2 "Integrasi TIK pada Sekolah"

Pada tahun 2016–2018, integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMK baru sebatas tersedia. Lembaga-lembaga pendidikan SMK yang dipelopori oleh pusat kebijakan sedang gencar-gencarnya melakukan berbagai pengadaan tentang sarana prasarana untuk kesiapan TIK serta melakukan pelatihan-pelatihan untuk SDM agar mengenal sarana prasarana tersebut.

Pada rentang tahun ini, integrasi TIK baru masuk ke level 1 dan level 2. Level 1 merupakan revitalisasi infrastruktur TIK pusat, yakni tahapan yang paling awal ditandai dengan berbagai bentuk pengadaan. Sarana prasarana utama maupun penunjang dipersiapkan secara optimal pada rentang ini. Level 2 adalah mengenal sistem. TIK adalah komposisi perangkat yang terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak; dimulai dari pengadaan infrastruktur, instalasi, pengoperasian, hingga pemeliharaan. Semua proses tersebut memerlukan keterampilan. Maka, level 2 yang merupakan level mengenal sistem berfokus terhadap keterampilan yang harus dimiliki SDM terkait khususnya dalam menelaah cara kerja sistem. SDM yang ditunjuk harus mampu menguasai cara mengintegrasikan dengan penyelenggaraan pendidikan SMK yang telah disesuaikan kurikulumnya.

Capaian lanjutan dari tersedia adalah dapat digunakan. Capaian dapat digunakan akan berlangsung pada rentang tahun 2019–2020. Lembaga pendidikan SMK dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar serta berbagai aktivitas birokrasi, manajemen, dan lainnya sudah mulai mengimplementasikan sistem TIK. Integrasi sistem TIK di SMK membuat arus informasi utamanya bidang pengajaran menjadi lebih efektif.

Capaian dapat digunakan memiliki dua level yakni level 3 dan level 4. Level 3 diberi predikat partisipasi. Pada level ini, diharapkan ada peran aktif dari berbagai pihak untuk berpartisipasi. Secara umum, memang sudah dilakukan pengadaan infrastruktur dan dapat digunakan. Namun, terjadi persoalan muncul di lapangan. Walaupun kebijakan sudah dicanangkan dari atas, ada pihak-pihak yang mau menjalankan dan ada juga yang tidak. Dengan demikian, tingkat partisipasi perlu perhatian agar pihak-pihak di lapangan, yakni lembaga pendidikan SMK untuk berpartisipasi.

Level 4 diberi predikat *awareness* 'kesadaran'. Artinya, pihak-pihak di lapangan bukan lagi berpartisipasi, melainkan sudah naik ke tingkat kesadaran yakni memaknai hakikat integrasi TIK dalam penyelenggaraan pendidikan SMK. Kesadaran tersebut akan diikuti berbagai tindakan sebagai bentuk implementasi sikap tersebut.

'Dapat diandalkan' merupakan capaian ketiga yang berada pada rentang tahun 2021–2022. Rentang ini menunjukkan integrasi TIK di sekolah sudah dapat diandalkan dengan ditandai oleh berjalannya TIK sebagai sebuah sistem yang

menjadi dasar operasional. Berbagai kegiatan yang dimulai dari urusan administrasi hingga pembelajaran sudah berbasis TIK dan sama sekali meninggalkan sistem lama.

Pada capaian 'dapat diandalkan' ini, ada level 5 dengan predikat 'mampu memanfaatkan'. Predikat itu sendiri merupakan penguatan dari capaian, yaitu memanfaatkan TIK yang terintegrasi di sekolah sebagai sebuah sistem yang menjadi dasar operasional. Pemanfaatan TIK dilakukan di semua lini, yaitu oleh para siswa, guru, bagian tata usaha, hingga kepala sekolah.

Pada rentang tahun 2023–2024, capaian keempat atau capaian terakhir pada *roadmap* harus dilakukan, yakni 'perbaikan berkelanjutan'. TIK sudah betul-betul terintegrasi dengan sekolah dan dijalankan sebagai sendi kegiatan. Namun, perlu upaya yang terus-menerus untuk melakukan perbaikan.

Capaian ini memiliki level 6 dengan predikat transformasi menjadi kinerja. Predikat tersebut menunjukkan bahwa TIK yang sebelumnya sebatas dimanfaatkan sebagai sebuah fasilitas kemudian bertransformasi menjadi ukuran kinerja. Setiap lini di lembaga-lembaga SMK dapat menjadikan ini sebagai sebuah ajang menunjukkan prestasi.

Penerapan Online Platform

Integrasi TIK dengan sekolah yang telah dilakukan secara konsisten berdasarkan *roadmap* di atas dapat dilanjutkan ke dalam berbagai program yang lebih konkret lagi. Program tersebut merupakan *online platform* sebagai perwujudan dari integrasi tadi. Ada empat program yang harus dijalankan yakni Majestik SMK, Vicon SMK, Medsos SMK, dan VRLab SMK.

Majestik adalah akronim dari Manajemen SMK Berbasis TIK. Istilah manajemen memiliki makna, "Penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran." Dengan menggunakan istilah manajemen, artinya, ada upaya untuk melakukan pengelolaan berbasis TIK secara menyeluruh atas unsur-unsur yang terlibat di dalamnya.

Majestik SMK terdiri atas delapan sistem informasi, yakni sistem informasi profil sekolah, manajemen dan administrasi personalia (SISILIA), manajemen kesiswaan

sekolah terpadu, manajemen sarana dan prasarana, manajemen kegiatan akademik, administrasi dan pengelolaan keuangan sekolah, layanan sekolah dan masyarakat, serta sekolah bimbingan kerja karier. Kedelapan sistem informasi ini akan terjabar sebagaimana berikut ini.



Gambar 6.3 "Majestik"

Pertama adalah sistem informasi profil sekolah. Sistem informasi profil sekolah memberikan gambaran secara umum tentang sekolah. Informasi ini akan diakses oleh para calon siswa sekolah tersebut. Selain itu para pengamat pendidikan SMK dan stakeholder lainnya dapat menggali informasi umum setiap lembaga SMK dengan adanya sistem informasi profil sekolah. Manfaatnya antara lain digunakan untuk pemetaan juga penilaian.

Kedua adalah sistem informasi manajemen dan administrasi. Sistem informasi manajemen dan administrasi personalia memberikan informasi tentang tata kelola SMK dan sistem kepegawaian di SMK. Informasi tentang manajemen akan memberikan gambaran sekolah tersebut berkaitan dengan strategi sekolah tersebut

menghadapi hari ini dan mempersiapkan tantangan di masa yang akan datang. Informasi tentang administrasi personalia juga memberikan gambaran tentang distribusi pegawai berdasarkan kompetensi dan kualifikasinya.

Ketiga adalah sistem informasi manajemen kesiswaan sekolah terpadu. Sistem ini merupakan sebuah sistem informasi yang memuat ihwal pengelolaan kesiswaan mulai dari kegiatan belajar reguler, kegiatan ekstrakurikuler, program peningkatan prestasi siswa, pembinaan kedisiplinan siswa, dan lain sebagainya. Informasi seputar kesiswaan sebagai dasar bagi pihak luar sekolah untuk mengetahui kegiatan rutin para siswa selama berada di sekolah baik terkait kegiatan akademik maupun non-akademik.

Keempat adalah sistem informasi manajemen sarana dan prasarana. Sistem ini menampilkan pemaparan tentang berbagai infrastruktur yang ada di sekolah. Bagi calon siswa, informasi tersebut akan menjadi penting karena menjadi parameter sejauh mana *skill* para siswa akan dilatih dengan menggunakan pendekatan praktik berdasarkan infrastruktur yang tersedia. Semakin lengkap infrastruktur dan relevan dengan tuntutan perubahan zaman, semakin meyakinkan lembaga SMK sebagai tempat bagi para siswa untuk menempa ilmu di SMK tersebut. Begitu juga untuk stakeholder, adanya sistem informasi manajemen sarana dan prasarana dapat menjadi gambaran untuk menjadikan penilaian sekaligus evaluasi.

Kelima adalah sistem informasi manajemen kegiatan akademik. Sistem ini menyajikan serangkaian informasi tentang pokok-pokok kegiatan dasar berdasarkan kurikulum. Sistem informasi ini akan menyampaikan tentang capaian dari pembelajaran per semester, capaian pembelajaran selama tiga tahun. Akan disampaikan juga model-model pembelajaran sesuai kurikulum terbaru yang sasarannya adalah para siswa dapat menjadi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Keenam adalah sistem informasi administrasi dan pengelolaan keuangan sekolah. Sistem ini menyajikan informasi tentang asal dan penggunaan dana secara transparan. Terlepas status SMK apakah negeri atau swasta yang berimplikasi pada perbedaan asal dana yakni dari pemerintah dan dana masyarakat, tetap harus ada sebuah sajian informasi yang transparan tentang pengelolaan dana tersebut. Dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan, masyarakat tidak akan bertanya-tanya tentang dana yang digunakan.

Ketujuh adalah sistem informasi layanan sekolah dan masyarakat. Sistem ini akan menyajikan informasi juga layanan secara daring. Melalui platform ini, siswa tidak disibukkan dengan persoalan birokrasi jika memiliki kepentingan tertentu dan harus mengurusnya. Begitu juga ketika siswa berada di luar sekolah dan membutuhkan layanan tertentu, layanan berbasis daring dalam kemasan sistem informasi ini akan memudahkan kedua pihak, baik sekolah sebagai penyelenggara maupun siswa sebagai pihak yang harus dilayani. Tidak hanya siswa, masyarakat pun dapat memanfaatkannya ketika ada kepentingan untuk kepengurusan tertentu. Masyarakat pada titik ini adalah dalam arti luas, yakni semua pihak yang memiliki kepentingan dengan sekolah, termasuk juga alumni yang biasanya masih memiliki kepentingan tertentu dengan sekolah terkait dengan pemberkasan.

Kedelapan, sistem informasi sekolah bimbingan kerja karier. Sistem ini menyajikan informasi tentang dunia kerja yang akan dimasuki para siswa. Dalam platform ini, bukan hanya informasi yang disajikan, melainkan juga bentuk pelayanan bahkan secara teknis. Dimulai dari bimbingan dalam lingkup sekolah, siswa dapat dibekali pengetahuan tentang dunia kerja termasuk segala dinamikanya dan berbagai tuntutan oleh kemajuan teknologi. Siswa juga dibekali pengetahuan tentang apa saja yang harus mereka persiapkan untuk memasuki dunia kerja baik dalam bentuk soft skill maupun hard skill. Kemudian secara teknis siswa juga akan diarahkan untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan keahlian dan peminatan serta sesuai dengan fluktuasi permintaan di dunia industri yang informasinya akan terus diperbaharui.

Platform Majestik dengan penjabaran di atas cukup kompleks untuk merepresentasikan kebutuhan arus informasi dan pelayanan baik yang sifatnya akademis maupun non-akademis. Namun, platform ini belum memperlihatkan secara konkret keterlibatan orangtua dalam penyelenggaraan sekolah yang terintegrasi dengan TIK tersebut. Tentu saja, persoalan ini menjadi masukan dan perbaikan untuk langkah selanjutnya.

Platform berikutnya sebagai bentuk integrasi TIK dengan sekolah adalah Vicon SMK. Vicon SMK menjadi platform teknologi untuk penyebaran informasi secara terintegrasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan SMK yang memiliki brand murah, efektif, dan efisien. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam setiap lini pendidikan termasuk SMK menjadi sebuah tuntutan. Para guru dituntut untuk memperbaharui

pengetahuannya; meningkatkan keahliannya, serta berserikat dalam kesamaan profesi. Tuntutan tersebut akan menimbulkan konsekuensi logis berupa pengeluaran biaya dan keuangan waktu.

Oleh karena itu, ketika guru harus berangkat untuk memperbaharui pengetahuan atau meningkatkan keterampilannya, yang sering menjadi alasan adalah biayanya mahal, tempatnya jauh, dan tidak ada waktu. Platform Vicon SMK-lah yang kemudian menjadi jawaban dari persoalan tersebut dengan brand murah, efektif, dan efisien tadi.

Terdapat empat fasilitas dalam Vicon SMK, yaitu rapat daring, seminar daring, bimtek daring, dan sosialisasi daring. Rapat daring adalah fasilitas untuk internal sekolah maupun eksternal. Untuk internal, rapat daring dapat digunakan sebagai bentuk penyampaian pendapat bersama-sama antarguru maupun antara para guru dengan kepala sekolah.



Gambar 6.4 "Video Conference"

Dalam penyelenggaraan sekolah, selalu ada momen tertentu yang menuntut adanya agenda untuk melakukan rapat, berkumpul bersama sebagai wujud

penyamaan persepsi. Namun, upaya ini sering terkendala akibat para guru memiliki tugas masing-masing sehingga pada saat yang bersamaan berada pada tempat yang berbeda-beda. Dengan adanya fasilitas rapat daring, rapat tetap dilaksanakan walaupun tidak berkumpul di satu tempat.

Akan lebih sulit ketika rapat akan dilakukan tetapi anggotanya berasal dari instansi yang berbeda-beda, misalnya rapat kepala sekolah dalam distrik tertentu. Harus ada perencanaan waktu dan tempat yang matang agar rapat dapat dihadiri oleh seluruh kepala sekolah. Namun, fasilitas daring memberikan peluang yang besar untuk terjadinya penyelenggaraan rapat di mana saja dan kapan saja.

Seminar daring sebagai fasilitas yang kedua juga memudahkan para guru untuk memperbaharui ilmu pengetahuan. Belakangan ilmu pengetahuan berkembang semakin pesat dan para guru yang memiliki tugas untuk mencerdaskan, juga harus bergerak cepat. Jika tidak, guru bisa tertinggal informasi bahkan oleh siswanya. Namun, terdapat persoalan yang dilematis karena dengan segala aktivitasnya yang padat di sekolah, guru terkendala untuk mengikuti berbagai seminar yang diadakan. Fasilitas seminar daring ini memungkinkan guru untuk memperbaharui pengetahuannya tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.

Fasilitas ketiga adalah bimtek daring. Fasilitas ini memberikan kemudahan para guru untuk memperbaharui keterampilan. Belakangan, selain mengajar guru juga diwajibkan untuk memenuhi tugas-tugas lainnya seperti penelitian atau pelaksanaan suatu program. Bimbingan teknis daring menjadi solusi lainnya atas kebutuhan untuk memperbaharui keterampilan guru.

Kemudian, sosialisasi daring sebagai fasilitas yang keempat juga memberi kemudahan bagi para guru. Selain itu, para pemerintah tidak harus bekerja ekstra keras untuk melakukan sosialisasi. Pada era terdahulu, sosialisasi menjadi persoalan tersendiri dalam arus informasi di sekitar dunia pendidikan, khususnya SMK. Wilayah kepulauan di Indonesia dan tidak meratanya tingkat kemajuan teknologi menjadi persoalan tersendiri. Jika pemerintah ingin melakukan sosialisasi tentang suatu program kemudian sosialisasi itu telah berjalan, tidak semua sekolah di daerah di Indonesia dapat mengikutinya secara tepat waktu. Bisa jadi sekolah yang ada di daerah pelosok terpencil baru mendapatkan informasinya, sementara sekolah lain yang ada di wilayah perkotaan justru telah memulai program tersebut sejak

berbulan-bulan lalu. Hal tersebut menjadi sesuatu yang tidak mustahil mengingat berbagai daerah pelosok di Indonesia sangat sulit untuk dijangkau dengan cara manual. Namun, adanya sosialisasi daring ini memungkinkan berbagai isu baru di dunia pendidikan SMK akan langsung diterima oleh sekolah yang telah menjalankan platform Vicon SMK, baik sekolah yang ada di kota besar maupun sekolah yang ada di daerah terpencil.

Sampai dengan tahun 2019, Vicon SMK telah diimplementasikan pada 9.874 SMK di seluruh Indonesia. Terdapat 34 provinsi yang telah mengimplementasikannya. Namun, pengimplementasian tersebut masih didominasi oleh Pulau Jawa, yakni 22,9% di Jawa Timur, 21,9% di Jawa Tengah, dan 19,6% di Jawa Barat. Sisanya implementasi Vicon SMK di sekolah-sekolah provinsi lain masih berada di bawah 5%. Ini tentu menjadi sebuah tantangan sekaligus tanggung jawab untuk diselesaikan agar aplikasi platform ini merata di seluruh SMK di Indonesia.

Platform berikutnya adalah Medsos SMK. Platform ini memanfaatkan media yang sudah merebak di kalangan remaja khususnya remaja SMK yaitu media sosial. Pada zaman ini, dapat dipastikan bahwa tidak ada siswa SMK yang tidak memiliki akun media sosial. Namun, alih-alih memberikan manfaat yang signifikan, media sosial justru secara umum digunakan untuk kegiatan bersosialisasi antarsesama yang identik dengan kesenangan semata.

Dengan menjadikan Medsos SMK sebagai sebuah platform pendidikan, ada upaya untuk mengintegrasikan media sosial sebagai dunia remaja (siswa SMK) dengan dunia pendidikan. Medsos SMK menjadikan ajang publikasi, kreativitas, dan unjuk kemampuan bagi para siswa SMK. Penggunaan platform ini diinisiasi oleh Direktorat Pembinaan SMK yang memiliki berbagai akun media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Youtube. Akun ini kemudian menyebarkan 'virus' prestasi. Akun Direktorat Pembinaan SMK pada media-media sosial kemudian secara konsisten dan berkesinambungan mengunggah konten-konten tentang prestasi, kreativitas, dan unjuk kemampuan anak SMK sehingga unggahan tersebut yang akan beresonansi terhadap para pengikut di media sosial yang pada akhirnya menciptakan iklim prestasi di dunia media sosial.

Platform terakhir yaitu VR Lab atau virtual reality. Virtual reality merupakan teknologi yang menciptakan dunia rekaan yang merepresentasikan keadaan

sebenarnya dari apa yang direka tersebut. Pengguna teknologi virtual reality seolah-olah sedang berhadapan dengan dunia tersebut karena semuanya terlihat begitu nyata.

VR Lab SMK sebagai sebuah bagian dari integrasi TIK dengan sekolah SMK merupakan bentuk media pembelajaran kejuruan SMK menggunakan simulator. VR Lab SMK memiliki fitur penjelasan teori, praktik, dan penilaian. Untuk mempraktikkan VR Lab SMK, hardware yang digunakan adalah seperangkat komputer dengan spek gaming, Oculus Rift CV1, controller, dan monitor. Keunggulan platform ini antara lain siswa SMK dapat praktik kejuruan beberapa kali, lebih menghemat biaya praktik, lebih menarik karena merupakan sebuah teknologi yang kekinian, mudah pengoperasiannya, dan aman.



Gambar 6.5 "VRLAB SMK"

Penggunaan VR Lab SMK yang paling umum adalah berbentuk kacamata yang pemasangannya membuat mata hanya berfokus kepada sebuah lingkungan pemandangan baru (lingkungan sesuai dengan yang dikonsep). Lingkungan tersebut dikonsep dengan berbagai kegunaan dari VR Lab SMK itu sendiri yaitu teknologi simulasi, latihan, teknik keamanan, pendidikan, pengujian, dan permainan.

Teknologi simulasi merupakan sebuah konsep *virtual reality* untuk mengemas sebuah realitas ke dalam lingkungan baru di dalam kacamata. Ketika siswa

menggunakan kacamata VR Lab, kita akan mewakili lingkungan baru sebagai representasi dari aslinya. Misalnya, kita ingin belajar mengoperasikan sebuah mobil, lingkungan yang ditampilkan di dalam kacamata tersebut adalah interior sebuah mobil dan sudut pandang dari posisi pengemudi. Maka, ketika pengguna VR Lab dengan simulator, ia seolah memundurkan mobil; memajukan mobil; membelokkan; lingkungan di dalam kacamata VR Lab tersebut akan bergerak sesuai dengan arahan simulasi karena merupakan gambaran lingkungan yang sebenarnya.

Pada konsep latihan, VR Lab menggambarkan lingkungan tempat latihan tersebut. Jika latihan ini disimulasikan dalam sebuah pesawat terbang, VR Lab akan menampilkan lingkungan di dalam kabin pesawat terbang dengan berbagai kelengkapan panel dan instrumen yang ada di dalamnya. Siswa akan merasakan suasana di dalam pesawat terbang tersebut dan ketika melakukan kontrol-kontrol perintah, lingkungan di dalam simulasi kabin pesawat terbang tersebut akan sesuai dengan perintah. Begitu juga dengan berbagai panel instrumen yang dioperasikan dalam pesawat akan memberikan respons sesuai dengan pengoperasian panel instrumen tersebut.

Konsep teknik keamanan akan menggambarkan berbagai prosedur tentang keselamatan kerja. Lingkungan di dalam VR Lab akan menunjukkan berbagai kelengkapan keselamatan kerja serta berbagai fungsinya saat digunakan. Selain itu, akan ditampilkan prosedur keselamatan kerja menggunakan kelengkapan yang sudah tersedia yakni tahapan-tahapannya termasuk ketika terjadi kecelakaan kerja akan ditampilkan prosedur penyelamatannya.

Kemudian, dalam konsep pendidikan, VR Lab digunakan untuk menggambarkan sebuah lingkungan pendidikan yang ideal bagi siswa SMK. Lingkungan pendidikan tersebut merupakan sebuah lingkungan yang tidak ditemuinya dalam aktivitas sehari-hari di sekolah. Ada berbagai fasilitas istimewa yang merupakan fasilitas penunjang dengan berbagai keunggulan baik dari segi teknologi maupun penggunaannya. Simulasi pendidikan dalam VR Lab ini akan membuat semangat belajar baru bagi siswa karena dia memasuki lingkungan pendidikan yang baru.

VR Lab dapat juga digunakan sebagai simulasi pengujian. Misalnya, sebuah kendaraan yang akan diuji tabrak, secara visual dapat digunakan VR Lab untuk menampilkan gambaran visual kendaraan yang dilakukan uji

tabrak tersebut. Contoh lainnya adalah ketika sebuah sepeda motor sebagai produk baru yang memiliki desain dan dimensi baru akan dioperasikan, VR Lab akan menggambarkan keadaan ketika sepeda motor tersebut dioperasikan.

Terakhir adalah VR Lab yang digunakan untuk permainan. *Game* atau permainan merupakan bagian lain dari produk TIK yang cukup digandrungi. Siswa SMK selain gandrung sebagai pemain juga harus berpikir untuk menciptakan *game* tersebut. Ketika *game* diciptakan, VR Lab dapat digunakan untuk menampilkan gambaran visual sebagai hasil dari pembuatan game tersebut, yakni ketika gambaran visual ketika game sedang dimainkan. VR Lab akan menciptakan sebuah lingkungan pengoperasian *game* baru yang memindahkan layar komputer ke dalam sebetuk kacamata.

Demikianlah, revolusi industri 4.0 mengharuskan setiap orang yang terlibat untuk menyesuaikan diri. Revolusi industri 4.0 telah mengubah ekosistem industri. Dengan demikian, berubah pulalah ekosistem dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan harus menyesuaikan diri agar pendidikan tidak tertinggal dari kemajuan dunia industri.

BAB 7

SMK DAN WIRAUSAHA

Setelah lulus SMK, hampir putus asa dalam menjalani hari-hari sebagai pengangguran. Seperti yang diberitakan Jawapos.com, setelah lulus SMK, pekerjaan Ikha adalah mencari pekerjaan. Namun, nasibnya kemudian berbalik arah setelah kawannya mendorongnya untuk berbisnis jasa pengiriman barang. Saat itu, Ikha ditugaskan untuk mengirim mutiara melalui jasa PT Pos atau JNE. Saat itu pula, Ikha berpikir bahwa tugas ini dapat dijadikan lahan bisnis. Idenya tersebut berangkat dari pemikiran bahwa orang-orang kota sangat menghargai waktu sehingga mereka tidak berminat untuk menghabiskan waktunya di antrean jasa pengiriman barang.

Ide sederhananya itu ia realisasikan. Ia pun membuat jasa antar kirim dengan nama Fast Courier. Ia pun mengerjakan usahanya secara profesional. Berangsur-angsur usahanya berkembang. Akhirnya, ia dapat merekrut orang untuk bekerja kepadanya. Bahkan, banyak sarjana yang mengirim lamaran pekerjaan kepadanya. Pada tahun 2017, karyawannya telah mencapai 55 orang. Lima orang bertugas dalam hal administratif, sementara lainnya bertugas mengirimkan barang. Cara kerjanya fleksibel dan tidak terikat waktu. Hal itulah yang membuat orang-orang

berminat untuk bekerja bersama Ikha. Insentif yang besar menjadi alasan utama. Bahkan, ada pekerja yang mendapat hingga Rp 4 juta per bulan.



Gambar 7.1 "Ikha Dewi"
Sumber: psmk.kemdikbud.go.id

Usahanya semakin berkembang. Ia berencana untuk berekspansi ke jasa housekeeping yang ia labeli dengan nama Fast Clean. Hingga saat ini, perusahaannya memiliki tiga layanan, yaitu Fast Courier, Fast Food, dan Fast Mart. Ia juga telah bekerja sama dengan 35 resto di Mataram. Untuk satu kali pengiriman, Ikha mematok tarif Rp 10 ribu; Rp 15 ribu untuk perusahaan yang belum menjalin kerja sama. Dalam sehari, Ikha dapat meraup keuntungan Rp 1,5 juta sampai Rp 3 juta.

Setali tiga uang dengan Ikha Dewi, Ahmad Anggoro memulia usahanya dari nol. Ahmad Anggoro pindah ke Jakarta dari Kediri setelah lulus SMK. Seperti yang dilansir Maxmanroe.com, di Jakarta, Ahmad bekerja sebagai buruh di pabrik kayu. Kemudian, ia berganti pekerjaan yakni menjadi penjaga warnet dan digaji sebesar Rp 700 ribu per bulan. Ia sadar bahwa ia memiliki kemampuan menggambar yang ia asah di SMK. Akhirnya, kemampuannya itu ia jadikan modal pertamanya untuk

menjadi pengusaha kaos. Modal finansial pun ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari uang gajinya. Ia pun mencari tukang sablon untuk mencetak gambar-gambarnya, sembari belajar cara menyablon.

Rintangan sudah tentu ia hadapi. Sekali waktu, uang modalnya dicuri oleh sahabatnya. Selain itu, ia pun harus menghadapi persaingan yang sengit dengan produk serupa. Namun, tantangan itu malah menjadi semangat bagi Ahmad. Ia pun membuat sejumlah inovasi pada gambar kaos yang diproduksi agar terlihat lebih kekinian, modern, dan simpel. Pada tahun 2011, produknya pun mulai dilirik konsumen. Omzet yang ia dapat semakin tinggi. Ia banderol dengan harga Rp 100 ribu untuk setiap kaosnya, padahal ia hanya bermodal Rp 30 ribu sampai Rp 40 ribu per kaosnya. Alhasil, ia mampu mengembangkan bisnisnya; bermula dari menjual kaos, kini ia mampu menjual tas, dompet, celana, dll. Omzetnya tentu saja fantastis. Dalam sebulan, Ahmad bisa meraup keuntungan hingga Rp 100 juta.

Ikha Dewi dan Ahmad Anggoro masih menjadi pengusaha berskala lokal. Namun, ada pula lulusan SMK yang mampu menjadi pebisnis berskala global. Ia adalah Arfi'an Fuadi.

Arfi'an Fuadi merupakan lulusan SMK di Salatiga, Jawa Tengah. Sejak SMK ia memiliki kemampuan dalam desain 3D. Seperti yang dilansir Detik.com, sejak awal, ia memang berminat pada dunia desain dan engineering. Lantas, minatnya itu ia jadikan bisnis. Bisnisnya cukup "sederhana". Ia dan adiknya (yang juga lulusan SMK) bertugas untuk merealisasikan ide orang-orang yang ingin membuat suatu produk. Dalam merealisasikan ide itu, ia dan adiknya memulai dengan menganalisis awal; mendesain produk; menganalisis pasar dan kompetitor hingga membuat prototipe. Pada tahun 2009, mereka memulai bisnis itu.

Modalnya hanya komputer bekas dan modem. Mereka juga menjadi pekerja lepas untuk mengumpulkan modal lebih banyak lagi. Setelah modal terkumpul, mereka pun mencari klien. Akhirnya, mereka mendapat klien pertama.

Inti dari bisnis yang mereka jalani ialah keberanian. Mereka berani mengambil proyek-proyek sulit. Walaupun mereka belum pernah mengerjakan proyek sulit itu, mereka mengaku menyanggupinya. Banyak proyek yang telah mereka kerjakan. Misalnya, *chasing* iPhone, *merchandise* perusahaan multinasional, desain jet engine bracket (yang memenangkan kompetisi Global 3D Printing

Desain Quest yang diselenggarakan oleh General Electric), pulpen eksklusif.



Gambar 7.2 "Arfi'an Fuadi"
Sumber: dictio.com

Omzet yang diterima sudah pasti bukan dalam bentuk rupiah, melainkan dalam bentuk dollar. Misalnya, untuk produk pulpen eksklusif, mereka bisa mendapat keuntungan US\$ 39—49. Modal produksi untuk produk itu hanya berkisar Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu. Harga produk pulpen eksklusif itu pun naik menjadi US\$ 75 dan mereka bisa meraup untung sebanyak Rp 150 juta.

Dari cerita Ikha Dewi, Ahmad Anggoro, dan Arfi'an Fuadi, kita dapat melihat kemampuan dan kegigihan dari lulusan SMK. Tiga orang itu memiliki kemampuan yang telah mereka dapatkan di SMK: kemampuan teknis (desain, misalnya), kemampuan manajerial, dan kemampuan dalam melihat peluang (bisnis). Kemampuan itulah yang seharusnya dimiliki oleh lulusan SMK. Kemampuan itu menjadi modal awalnya untuk berwirausaha. Kemudian, mereka memiliki kegigihan. Kegigihan ini sudah pasti dimiliki oleh setiap wirausahawan. Kita dapat melihat tantangan dari bisnis yang mereka rintis. Kini, mereka tidak bergantung kepada orang lain atau perusahaan orang lain. Bahkan, merekalah orang yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Pada kenyataannya, masih banyak pihak (bahkan lulusan SMK itu sendiri) yang menganggap SMK adalah institusi yang mencetak tenaga kerja. Akhirnya, justru banyak pengangguran yang "dicetak" oleh SMK. Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa pengangguran dari lulusan SMK sangat besar, yakni 87,5 persen. Hal ini tentu saja memprihatinkan karena seyogianya SMK menjadi institusi yang mencetak tenaga kerja terampil.

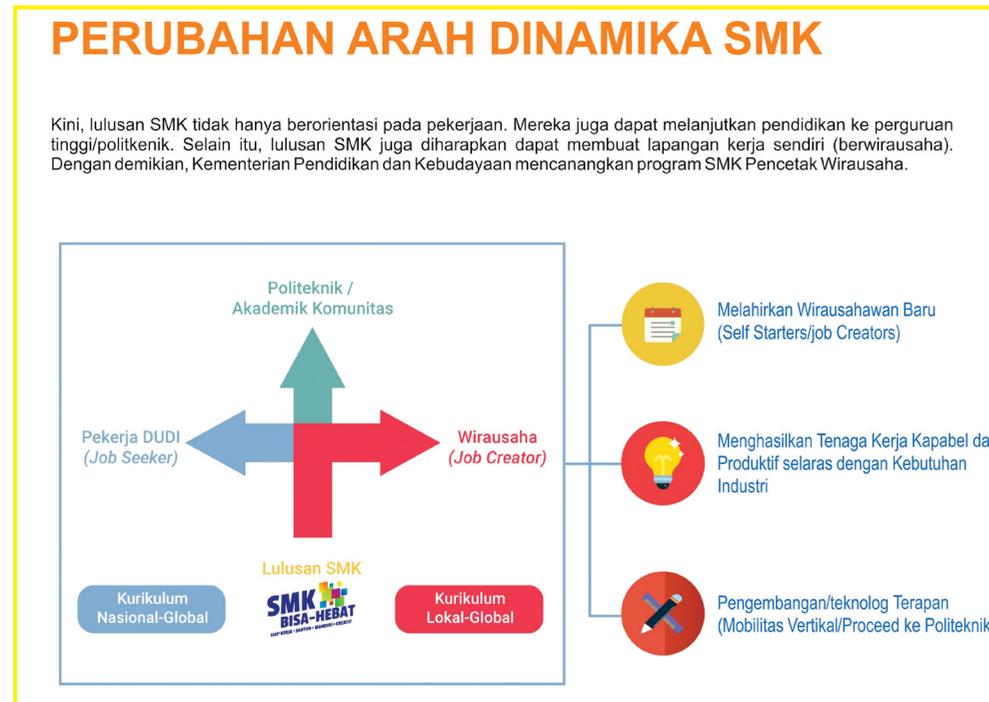
Ada pun lulusan SMK yang langsung mendapat pekerjaan, tetapi tidak menemui nasib, misalnya Putra. Seperti yang dilansir Tirto.id, Putra langsung diterima di perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia setelah ia lulus SMK. Namun, saat usianya menginjak 22 tahun, ia mengalami pemutusan hubungan kerja karena kontraknya tidak diperpanjang. Cerita Putra tersebut bukan menjadi bukti bahwa bekerja setelah lulus SMK adalah pilihan yang buruk, melainkan menjadi contoh bahwa ada perusahaan yang menerapkan sistem seperti itu; setelah pekerja berusia 22 tahun, perusahaan akan mengganti pekerja itu dengan pekerja yang baru—lulusan SMK yang baru. Dari cerita Putra, kita dapat melihat bahwa bekerja bukanlah satu-satunya pilihan saat seseorang lulus SMK.

SMK Pencetak Wirausaha

Pada dasarnya, SMK menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang terampil. Namun, selain itu, sebenarnya ada tiga pilihan yang dapat dipilih oleh lulusan SMK, yakni (1) menjadi tenaga kerja DUDI (job seeker); (2) berkuliah di politeknik; (3) menjadi wirausaha (job maker). Pilihan ketiga ini—menjadi wirausaha—merupakan pilihan didorong oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah sadar bahwa lulusan SMK sangat berpotensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau berwirausaha. Hal tersebut dikarenakan lulusan SMK banyak berinteraksi dengan dunia industri dan memiliki keterampilan hidup yang dapat digunakan untuk membuat usaha sendiri.

Oleh sebab itu, sebagai langkah nyata, melalui Perdirjen No. 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan (PKK) ditambah jam pelajarannya. Pada mulanya, mata pelajaran PKK hanya mendapat 5 jam pelajaran di kelas XI dan XII serta 8 jam pelajaran di kelas XIII. Pada kurikulum yang baru,

mata pelajaran ini mendapat mata pelajaran ini mendapat tambahan, yakni 7 jam pelajaran di kelas XI, 8 jam pelajaran di kelas XII, dan 10 jam pelajaran di kelas XIII. Hal ini dilakukan untuk mendorong siswa memiliki keterampilan dalam berwirausaha.



Gambar 7.3 “Perubahan Arah Dinamika SMK”

Selain penambahan jam pelajaran, terjadi pula perombakan dalam mata pelajaran ini. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa mata pelajaran ini semula ialah Prakarya dan Kewirausahaan. Kemudian, melalui Perdirjen tahun 2018, mata pelajaran ini berganti menjadi PKK. Guru yang terlibat dalam mata pelajaran ini bukan hanya guru kewirausahaan, melainkan juga guru produktif. Dengan demikian, luaran dari mata pelajaran ini dapat lebih nyata atau terkait dengan kebutuhan industri.

Pada bab sebelumnya telah disebutkan beragam produk yang lahir dari kreativitas siswa SMK. Pada umumnya, mereka memanfaatkan bahan lokal khas daerah mereka untuk dijadikan produk, misalnya produk pangan dan kerajinan. Tentu saja hal ini merupakan hasil yang positif jika dikaitkan dengan kurikulum SMK secara

umum, yakni local to global; memanfaatkan produk lokal menjadi komoditas global.

Agar kemampuan siswa SMK dalam bidang wirausaha semakin mantap, Direktorat Pembinaan SMK bekerja sama dengan Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO) membuat kelas modeling untuk SMK, yaitu program kelas 4 SMK berbasis produk dan penjualan melalui program kewirausahaan. Program yang diberi nama SMK Pencetak Wirausaha merupakan integrasi dari konsep bekerja, melanjutkan studi, dan wirausaha. Program ini bertujuan menyeleksi siswa yang berpotensi dalam bidang kewirausahaan. Kemudian, siswa tersebut akan difasilitasi sesuai potensinya dan kemampuannya menciptakan dan menghasilkan produk dan keuntungannya. Dalam program ini, Direktorat Pembinaan SMK akan memberikan bantuan, yakni bimbingan teknis dan pembiayaan.



Gambar 7.4 “SMK Pencetak Wirausaha”

Selain itu, pihak sekolah dan pihak luar (sekolah) pun tentu saja dilibatkan secara aktif. Guru kewirausahaan yang memiliki bisnis juga dilibatkan sebagai mentor siswa. Selain itu, berbagai pengusaha sukses pun akan didatangkan untuk mengajar dan memberikan pengalamannya dalam mengembangkan bisnis. Program ini mengintegrasikan mata pelajaran kejuruan dengan Simulasi dan Komunikasi Digital, Produk Kreatif dan Kewirausahaan, dan SMK Program 4 Tahun. Direktorat

Pembinaan SMK Kemdikbud menargetkan 150 SMK untuk mengikuti program SMK Pencetak Wirausaha.

SMK Citra Medika Sragen salah satu sekolah yang terpilih dalam program SMK Pencetak Wirausaha. Sekolah tersebut termasuk dalam 114 sekolah yang terpilih mengikuti SMK Pencetak Wirausaha angkatan pertama ini. Dalam realisasi program tersebut, SMK Citra Medika Sragen langsung meluncurkan Klinik Komplementer dan Apotek Pendidikan pada tanggal 27 April 2018. Menurut Kepala SMK Citra Medika Sragen, Nano Priyanto, sebagaimana dilansir oleh Joglosemarnews.com, apotek tersebut ditujukan untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh di ruang kelas. Selain melatih jiwa kewirausahaan, klinik tersebut dimaksudkan untuk mengejawantahkan program Teaching Factory.

Klinik Komplementer dan Apotek Pendidikan itu memberikan berbagai layanan kesehatan, misalnya cek tensi, perawatan keluarga, jasa akupunktur, akupresur, bekam, dan penjualan obat. Dengan adanya program tersebut, SMK Citra Medika Sragen diharapkan akan menghasilkan 4—5 persen lulusan yang menjadi wirausahawan. Selama ini, mayoritas lulusan SMK Citra Medika Sragen terserap di dunia industri. Sedangkan, lulusan yang berwirausaha hanya mencapai 2 persen. Melalui program ini, lulusan yang menjadi wirausahawan diharapkan bertambah. Selain SMK Citra Medika Sragen, ada sejumlah SMK lainnya yang memiliki program kewirausahaan, salah satunya SMK Negeri Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya.

Mereka memiliki program wirausaha yang disebut Smekarprenuer. Program ini bertujuan untuk melatih dan membimbing siswa agar siswa memiliki keterampilan dalam berwirausaha dan memiliki daya saing. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, mereka menyelenggarakan beberapa program pembimbingan dan pelatihan kewirausahaan, yakni Bank Tani,

Produk Unggulan Daerah dan Produk Kreatif. Pada program pembimbingan dan pelatihan Bank Tani, siswa diberikan pembekalan mengenai produksi pertanian dan pengembangan produk kreatif dan kewirausahaan. Program Bank Tani itu sendiri berfokus pada manajemen pengelolaan pemasaran hasil produksi praktikum mata pelajaran produktif pertanian.

Program ini dibuat agar hasil praktikum yang telah dilakukan memiliki nilai ekonomis. Secara teknis, anggota/peserta diberi pinjaman modal berupa sarana

produksi, misalnya benih, polybag, dan pupuk. Setelah panen, pinjaman modal tersebut dapat dilunasi dengan cara dicicil. Anggota yang mengikuti program ini harus menanam komoditas yang sama agar panen dapat dilakukan dengan skala yang besar dan menghemat biaya pemasaran.

Banyaknya komoditas lokal yang belum dipasarkan secara maksimal mendorong SMK Negeri Karangjaya membuat program Produk Unggulan Daerah. Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengangkat produk unggulan daerah, misalnya gula aren dan galendo. Melalui program ini, gula aren dan galendo diharapkan dapat bersaing di pasar dan menjangkau pasar yang lebih luas lagi.



Gambar 7.5 "Program Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH) SMK Negeri Karangjaya Kabupaten Tasikmalaya
Sumber: smknkarangjaya.sch.id

Selain Bank Tani dan Produk Unggulan Lokal, SMK Negeri Karangjaya juga membuat program Produk Kreatif. Dalam program ini, siswa dituntut untuk dapat mengembangkan sebuah produk agar produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Produk tersebut adalah produk yang dibuat sendiri, *repacking*, atau

rebranding. Kategori produk kreatif yang ada di Smekarprenneur ialah camilan herbal, camilan kekinian, aksesoris, kerajinan, dll.

Selain kedua SMK tersebut, terdapat pula SMK lainnya yang telah menjalankan program ini. Misalnya, SMK Negeri 1 Kutasari, Prov. Jawa Tengah. SMK ini melibatkan 16 siswanya untuk berwirausaha. Bisnis yang dijalankan siswa SMK Negeri 1 Kutasari ialah bisnis knalpot, makanan, elektronik, tata busana, toko daring, dll. Hal yang sama juga dilakukan oleh SMK Muhammadiyah Kudus. Sebanyak 29 siswa SMK Muhammadiyah Kudus mengikuti program SMK Pencetak Wirausaha. Mereka merintis bisnis dari makanan (roti, makanan ringan, gorengan), jasa (servis dan perakitan lampu, servis sepeda motor, dan las listrik), tata busana (reseller pakaian), desain, dll.

Pada dasarnya, program SMK Pencetak Wirausaha ini menekankan kepada siswa untuk memanfaatkan bisnis berbasis daring dalam praktik wirausaha. Hal tersebut untuk mempermudah siswa dalam berpraktik dan meminimalisasi modal. Bisnis model daring ini tentu saja sangat relevan dengan era industri 4.0. Seperti yang telah kita ketahui bahwa banyak cara untuk menjadikan wirausaha sebagai pembelajaran di sekolah. Saat itu, pada era digital ini, banyak aplikasi yang dapat dimanfaatkan dengan mudah, bahkan oleh siswa itu sendiri. Siswa dapat memanfaatkan *e-commerce* sebagai platform berdagang. Dengan menggunakan berbagai platform *e-commerce*, modal akan dapat diminimalisasi sehingga siswa dapat berfokus pada produk dan pemasaran saja.

Salah satu platform *e-commerce* yang sedang masyhur saat ini ialah PayTren. Seperti yang dilansir oleh Pebisnisdigital.com, PayTren merupakan aplikasi pembayaran daring. PayTren dapat dimanfaatkan sebagai peluang bisnis. Keunikan dari PayTren adalah cashback yang ditawarkan. Setiap transaksi yang terjadi ada cashback yang akan didapat. Keuntungan dalam bisnis ini salah satunya terletak pada *cashback*. Tentu saja, aplikasi ini dapat digunakan secara pribadi maupun dapat digunakan sebagai bisnis jasa. Semakin banyak transaksi yang dilakukan, semakin banyak keuntungan dan cashback yang didapat, tentu saja. Jika pengguna PayTren mengajak orang lain untuk menggunakan PayTren, ia akan mendapat keuntungan yang lebih besar. Kemudian, ia akan mendapatkan pemasukan pasif dan aktif setiap minggu. Selain berbisnis, pengguna PayTren pun dapat beramal. Setiap transaksi

yang dilakukan ada nominal yang dikeluarkan untuk sedekah yang akan disalurkan kepada santri penghafal Alquran.

SMK TI Pembangunan Cimahi merupakan yang mengikuti program SMK Pencetak Wirausaha. Mereka adalah salah satu sekolah yang memanfaatkan aplikasi PayTren sebagai mitra usaha. Mereka memanfaatkan PayTren sebagai platform untuk berwirausaha. Upaya ini dimulai oleh Tresi Tiara Intania Fatimah, guru SMK TI Pembangunan Cimahi. Ia mengajak 22 siswanya untuk menjadi mitra PayTren pada tanggal 16 Januari 2018. Tentu saja, 22 siswa tersebut mendapatkan pelatihan. Terbukti, para siswa antusias dalam pelatihan tersebut.

Hasilnya, sebanyak 7,66% siswa atau 26 siswa (dari 399 siswa peserta program kewirausahaan) mendapat omzet minimal sebesar 5 juta rupiah per bulan. Tresi Tiara Intania Fatimah, guru SMK TI Pembangunan Cimahi mendorong mereka untuk mencapai target tersebut. Menurutnya, seperti yang dilansir Rmoljabar.com, siswa harus “dipaksa” untuk mencapai target tersebut. Siswa disodorkan kontrak belajar bahwa mereka akan mendapatkan penundaan nilai apabila omzet mereka tidak mencapai 500 ribu rupiah per bulan. Siswa juga dituntut untuk berpikir dan mengubah pola pikirnya untuk mengatasi masalah yang ada di dalam dirinya dalam menjalankan usaha. Dengan usaha itu, akhirnya, Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud dan SEAMEO memberikan sertifikat elektronik kepada kepala sekolah, guru, dan siswa program pendidikan kewirausahaan.

Pada dasarnya, program SMK Pencetak Wirausaha ingin mengajarkan siswa untuk belajar wirausaha dengan cara yang terbaik. Belajar langsung di lapangan merupakan cara terbaik untuk belajar berwirausaha. Siswa dapat merasakan kesulitan saat mencari modal; mengelola modal tersebut; memasarkan produk bahkan mengalami kerugian; bangkit dari keterpurukan; memulai lagi dari awal kemudian memetik hasil yang maksimal. Hal-hal itu hanya dapat dialami apabila siswa tersebut terjun langsung ke lapangan; bukan berdiam diri di kelas dan mendengarkan guru yang sedang menjelaskan teori pemasaran.

Jika siswa ingin menekuni agribisnis, mereka harus turun langsung ke kebun. Mereka harus mengetahui cara pembudidayaan komoditas. Kemudian, mereka harus mengetahui cara memasarkannya. Jika mereka ingin menjadi “pengusaha milenial” yang memanfaatkan teknologi, mereka harus melakukan hal-hal yang

dilakukan para “pengusaha milenial” itu. Artinya, program SMK Pencetak Wirausaha berusaha mendorong siswa untuk belajar di pasar, bukan di kelas. Meski masih dalam tahap belajar, mereka harus tahu medan yang akan mereka hadapi saat menjadi wirausahawan yang sesungguhnya.

Keterlibatan Pihak Swasta

Selain pemerintah, pihak swasta pun memiliki andil dalam peningkatan kemampuan siswa dalam berwirausaha. PT Astra Honda Motor (AHM) menggelar Astra Honda Motor Best Student (AHMBS) 2018 untuk mengembangkan potensi siswa melalui wirausaha. Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 15 kali dan telah menjadi kompetisi bergengsi antarpelajar SLTA di seluruh Indonesia. Seleksi dimulai dari wilayah dealer utama. Kemudian, peserta yang lolos seleksi atau kompetisi tingkat wilayah berhak untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional.



Gambar 7.6 “Astra Honda Motor Best Student (AHMBS) 2018 Regional Jambi”

Pada tahun 2018, AHMBS mengambil tema “The Millennials Race of Young Entrepreneur.” Tema tersebut lahir atas kondisi hari ini; persaingan antargenerasi milenial berlangsung sangat ketat. Oleh sebab itu, peserta didorong untuk memaksimalkan kreativitas. Dalam hal ini, peserta juga dituntut untuk dapat memanfaatkan dunia digital dalam mengembangkan usahanya.

Menariknya, pemenang pertama kompetisi ini ialah siswa SMK, yakni Azizatus Sa’diyah Prasetyo dari SMK Turen Malang. Dalam kompetisi tersebut, ia memperkenalkan produknya yang diberi nama D’wizal Lampion. Ia membuat produk lampu lampion yang terbuat dari limbah kaca. Limbah tersebut diolah sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang unik dan fungsional. Ilmunya dalam membuat lampion tersebut ia tularkan kepada warga sekitar. Hal inilah yang membuatnya menjadi *best of the best student* dalam AHMBS 2018. Selain Azizatus Sa’diyah Prasetyo, terdapat dua siswa SMK lainnya yang berhasil menjadi yang terbaik dari 26 siswa yang mengikuti proses penjurian final. Dua siswa SMK tersebut ialah Sahrul Hikam dari SMK Jaya Buana Tangerang (*runner up 2*) dan Jenal Asikin dari SMK Negeri 1 Bulakamba Brebes (*runner up 4*).

Dalam hal ini, pihak swasta memiliki peran besar dalam peningkatan kemampuan siswa SMK dalam berwirausaha. Hal ini harus direspons oleh pemerintah agar semakin banyak perusahaan swasta yang terlibat dalam meningkatkan dan mengembangkan wirausaha di SMK. Salah satu perusahaan yang penting untuk dirangkul dalam rangka mengembangkan kemampuan wirausaha siswa SMK ialah perusahaan-perusahaan *starup*.

Bisnis *starup* (bidang teknologi) menjadi bisnis yang amat relevan di era ini. Bahkan, pemerintah telah menyadari bahwa bisnis *starup* adalah bisnis yang mungkin dilakukan dan dapat sangat berkembang di era ini. Oleh sebab itu, ia menargetkan untuk melahirkan 1.000 *starup* baru di Indonesia. Orang-orang yang ada di dalamnya adalah para lulusan SMK. Dalam hal ini, SMK dapat menjadi tulang punggung perkembangan *starup* di Indonesia.

CEO Cyber Park, Dedi Yudiant, seperti yang dilansir Liputan6.com, mengatakan bahwa lulusan SMK dapat menjadi sumber daya manusia utama dalam bisnis *starup*. Lulusan SMK merupakan lulusan yang siap pakai dan dibutuhkan untuk mewujudkan visi ekonomi digital yang diinginkan pemerintah. Lulusan SMK dapat mengisi posisi-

posisi penting, misalnya operator, admin, atau developer web. Namun, menurut Dedi, kurikulum SMK saat ini belum relevan pada kebutuhan industri teknologi. Oleh sebab itu, pemerintah atau pihak sekolah secara inisiatif perlu bersinergi dengan perusahaan-perusahaan startup.

Arkademy merupakan *startup* digital internal milik Telkom. Arkademy menjadi tempat belajar siswa SMK. SMK Telkom Malang menjadi salah satu mitra sekolah yang dimiliki Arkademy. Beberapa siswa dari SMK Telkom Malang menjalani kursus di Arkademy. Menurut guru SMK Telkom Malang, seperti yang dilansir Detik.com, Arkademy mampu memberikan pemahaman kepada siswa mengenai konten *Internet of Things* (IoT) dan bahasa pemrograman yang sesuai kebutuhan industri. Kemitraan ini sangat berguna bagi siswa itu sendiri sebagaimana yang diakui oleh guru SMK Telkom Malang. Menurut Chief Marketing Officer Arkademy, Arfiyah Citra Eka Dewi, seperti dilansir Detik.com, kerja sama tersebut akhirnya menghasilkan empat tim inti di BOD, sembilan *engineer officer*, empat *content and product officer*, dan dua *marketing officer*.

Kerja sama semacam itu penting untuk dilakukan karena terbukti telah membuahkan hasil. Selain lulusan kursus yang berkualitas dan terserap oleh lapangan kerja, kursus ini menjadi penghubung gap kompetensi antara lulusan SMK dengan kebutuhan dunia industri. Kemudian, manfaat lain dari kursus ini ialah siswa dapat mengerjakan proyek dari perusahaan. Hasil proyek tersebut dapat menjadi portofolio siswa itu sendiri. Tentu saja, pengerjaan proyek itu tidak didapatkan di sekolah padahal proyek seperti ini dapat dijadikan portofolio bagi siswa dan ini sangat penting dalam dunia kerja.

Ketika telah terbentuk sinergitas—*link and match*—antara sekolah dengan perusahaan startup, pendidikan tentang dunia startup dapat dimulai sedini mungkin di kelas. Dengan demikian, kurikulum di sekolah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Jika hal itu terwujud, lulusan SMK dapat dengan mudah terserap lapangan kerja. Bahkan, tidak menutup kemungkinan siswa dapat membuat perusahaan startup sendiri. Tentu saja, itu akan lebih baik.

BAB 8

PEMBENTUKAN EKOSISTEM BILINGUAL DI SMK

“Anak-anak memperoleh bahasa melalui *exposure* dengan cara melihat, meraba, mendengar, dan menyaksikan penggunaan bahasa tersebut.⁵”

--Mimin Ninawati (2012)

Dari kutipan di atas, Mimin Ninawati berpendapat bahwa pembelajaran bahasa asing seharusnya dimulai pada usia anak atau sedini mungkin. Hal itu dilakukan karena pada usia muda, seseorang cenderung ingin mencoba hal yang baru dan ia tidak takut untuk salah. Sebaiknya, pembelajaran bahasa asing bukan hanya terbatas pada ruang-ruang formal (di kelas), melainkan juga dipraktikkan dalam ruang-ruang informal (di kantin, ruang guru, masjid, dsb.). Dengan demikian, siswa akan memiliki pengalaman dalam belajar, sehingga pembelajaran bahasa asing menjadi lebih efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut, sekolah harus membuat ekosistem yang memungkinkan siswa untuk belajar bahasa asing dengan

⁵Dalam “Kajian Dampak Bilingual terhadap Perkembangan Kognitif Anak Sekolah Dasar” karya Mimin Ninawati (2012).

lebih efektif.

Ekosistem bilingual merupakan sebuah komunitas yang terdiri atas orang-orang dengan memiliki dua kemampuan bahasa. Dalam lingkungan SMK, menciptakan ekosistem bilingual adalah membuat sebuah kondisi di sekolah yang mengharuskan para siswa menggunakan dua bahasa yaitu bahasa asli mereka dan bahasa asing secara berdampingan di lingkungan sekolah.

Kemampuan bahasa asli yaitu bahasa Indonesia sudah diterapkan sejak pendidikan dasar sehingga pada tataran SMK siswa diharapkan sudah menguasai aturan penggunaan ejaan, gramatika bahasa, serta tata bahasa baku bahasa Indonesia. Namun, penguasaan bahasa asli ini untuk memasuki era industri 4.0 tidak cukup. Dalam dunia kerja nantinya, para siswa SMK tidak akan berhadapan dengan orang-orang atau pekerja yang berasal dari Indonesia saja, tetapi juga orang dari berbagai belahan dunia lainnya. Dengan demikian, siswa SMK harus memiliki kemampuan bilingual, yakni dua bahasa termasuk bahasa aslinya.

Selain bahasa asli ada bahasa pendamping yang menjadi *lingua franca* atau sebuah bahasa pergaulan untuk menyatukan anggota masyarakat yang memiliki asal berbeda-beda. Orang Filipina yang hanya menguasai bahasa Tagalog tidak bisa memaksakan bahasa tersebut saat berkomunikasi dengan orang Belanda. Demikian juga orang Belanda yang hanya bisa berbahasa Belanda tidak bisa memaksakan penggunaan bahasa tersebut saat berkomunikasi dengan orang Filipina. Dengan demikian, bahasa pergaulan internasional dapat menyatukan keduanya.

Dalam pergaulan internasional beberapa dekade terakhir, terjadi sebuah kesepakatan bahwa *lingua franca* yang digunakan adalah bahasa Inggris. Oleh karena itu, secara masif, pengajaran dan penggunaan bahasa Inggris dilakukan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Saat memasuki dunia kerja bidang industri dalam kancah perdagangan global, lulusan SMK dituntut untuk dapat menguasai bahasa Inggris. Oleh karena itu, ekosistem bilingual harus diciptakan di lingkungan sekolah SMK. Namun, bukan hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, melainkan bahasa asing lainnya dapat dipelajari oleh pembelajar bilingual (siswa).

Pembelajar bilingual setidaknya akan mendapat sepuluh keuntungan. Keuntungan pertama adalah melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda; membuat pembelajar bilingual memiliki pandangan yang lebih luas; tidak sempit pada dunianya

sendiri. Keuntungan yang kedua adalah menguasai tugas ganda atau multitasking. Seseorang yang terbiasa memiliki fokus terhadap satu hal saja akan sulit untuk membagi konsentrasi dengan hal lainnya. Dengan kemampuan multitasking ini, pada saat yang bersamaan, seseorang dapat menyelesaikan dua hal atau lebih sehingga menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan menjadi lebih efisien. Keuntungan ketiga adalah meningkatkan kesehatan mental. Pembelajar bilingual akan memiliki kemampuan mengingat yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang hanya berfokus kepada satu bahasa saja. Seperti diketahui, kemampuan mengingat berhubungan erat dengan kondisi psikologis seseorang.

Keuntungan keempat adalah mendapatkan lebih banyak uang. Orang yang belajar lebih dari satu bahasa secara matematis akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapat kesempatan sumber penghasilan. Misalnya, ketika ditempatkan di objek wisata untuk memandu wisatawan, siswa SMK pariwisata yang memiliki kemampuan berbahasa asing akan mendapat penghasilan yang lebih besar daripada siswa yang hanya memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Siswa SMK yang mampu berbahasa asing tersebut tidak hanya berpeluang memandu turis lokal, tetapi juga turis asing.

Keuntungan kelima adalah tergabung dalam komunitas yang besar. Dengan menjadi pembelajar bilingual, siswa SMK akan mendapatkan komunitas baru berdasarkan bahasa yang dipelajarinya tersebut. Keuntungan keenam adalah lebih mudah menghilangkan kebisingan. Seorang siswa SMK yang belajar bilingual terbiasa untuk mendengarkan berbagai kosakata baru di luar pengetahuannya sehingga potensi kebisingan yang sifatnya mengganggu tidak akan dialami lagi ketika terbiasa mendengar istilah-istilah atau ungkapan asing. Keuntungan ketujuh adalah memiliki ingatan yang lebih baik—seperti yang sudah dibahas. Keuntungan kedelapan adalah menjadi pemecah masalah yang lebih baik karena dengan terbiasa mempelajari bahasa-bahasa baru, siswa akan terbiasa pula mengatasi persoalan dalam proses pembelajaran tersebut. Keuntungan kesembilan adalah menyebut sebuah penilaian dengan lebih tepat. Maksudnya adalah bahwa seorang pembelajar bilingual tidak hanya mempelajari bahasa asing secara leksikal, tetapi ia juga akan memahami budaya asing. Sering kita jumpai bahwa istilah di dalam satu bahasa kemudian ditranslasikan ke dalam bahasa lain dengan makna serapan yang

tidak sesuai. Namun, seorang pembelajar bilingual akan memahami bahwa translasi bahasa tidak sebatas makna leksikal, tetapi juga ada makna budaya di dalamnya sehingga ketidaktepatan penyebutan istilah dapat dihindari. Keuntungan terakhir adalah memiliki kemampuan mendengar yang luar biasa. Siswa SMK pembelajar bilingual akan terbiasa mendengar istilah-istilah yang asing sehingga memerlukan konsentrasi penuh untuk dapat memahaminya. Kebiasaan tersebut kemudian akan menimbulkan kemampuan mendengar yang luar biasa. Keuntungan-keuntungan di atas menjadi bekal yang bagus bagi lulusan SMK saat memasuki dunia industri.

Kondisi Kemampuan Berbahasa Asing di SMK

Kemampuan berbahasa asing harus dimiliki oleh siswa maupun guru, terutama kemampuan berbahasa Inggris. Namun, data statistik menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa asing oleh siswa SMK juga oleh guru SMK belum menunjukkan keadaan yang memuaskan.

Salah satu program untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing di SMK adalah dengan mengadakan Program Sertifikasi TOEIC (*Test of English for International Communication*) Nasional untuk SMK. Program ini sudah berjalan selama tiga tahun mulai dari tahun 2016 dan terakhir 2018. Program tidak serta-merta diselenggarakan, tetapi melalui proses seleksi terlebih dahulu. Pada tahap awal, calon peserta berasal dari 32 Provinsi yang terdiri atas 215 kota dan kabupaten. Ada 1.454 SMK yang telah mengikuti seleksi program ini dengan jumlah siswa mencapai 217.182 orang.

Setelah dilakukan seleksi, peserta program ini menjadi 29 provinsi yang terdiri atas 185 kota dan kabupaten. Jumlah SMK yang dapat mengikuti adalah 634 SMK dengan jumlah total siswa 21.850 orang. Kemudian, output dari program sertifikasi ini adalah 21.850 siswa SMK dan 1.400 guru SMK lolos sertifikasi.

Rincian *output* program ini pada tahun 2018 yaitu level 1 (*novice*) sebanyak 154 siswa, level 2 (*elementary*) sebanyak 6.449 siswa, level 3 (*intermediate*) sebanyak 12.610 siswa, level 4 (*basic working proficiency*) sebanyak 3.478 siswa, level 5 (*advanced working proficiency*) sebanyak 784 siswa, dan level 6 (*general professional proficiency*) sebanyak 98 siswa. Angka-angka pencapaian tersebut dengan dominasi atau angka tertinggi (12.610 siswa) hanya mencapai level 3 adalah

sebuah indikator bahwa harus ada upaya yang lebih optimal lagi dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa SMK. Begitu juga tingkat kemampuan berbahasa Inggris para gurunya dengan capaian yang tidak begitu signifikan perbedaannya.



Gambar 8.1 "Ekosistem Bilingual di SMK"

Komitmen Manajer Sekolah

Sekolah melalui manajemennya harus berkomitmen dalam menjaga

kondisi bilingualisme di sekolah. Komitmen dari sekolah akan mengakibatkan kondisi tersebut menjadi sebuah suasana yang kondusif dan berkelanjutan.

Sekolah merupakan sebuah lingkungan yang ideal untuk terjadinya pembelajaran bahasa asing. Hal ini dikarenakan sekolah sebagai institusi akademik memiliki kekuatan untuk dapat mengendalikan para siswa. Ketika para siswa mengetahui bahwa menjadi pembelajar bilingual adalah sebuah kewajiban, para siswa akan mengikutinya. Berbeda ketika para siswa diminta belajar sendiri, mereka cenderung tidak akan terkontrol.

Dalam penerapan ekosistem bilingual ini, manajemen SMK harus membuat berbagai langkah taktis yang harus diterapkan terhadap semua lini di sekolah. Selain sebagai pembelajar, siswa SMK adalah peniru. Maka, manajemen sekolah harus membuat kebijakan pertama kali tentang pemberlakuan bilingual untuk para guru.

Seperti ditunjukkan oleh sampel pengambilan data bahwa kemampuan berbahasa asing guru SMK masih rendah. Hal tersebut menuntut adanya kebijakan yang diterapkan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing mereka. Langkah yang dapat diambil sebagai kebijakan adalah mewajibkan para guru untuk mengikuti pelatihan bahasa asing dan mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut dalam berbagai bidang, seperti mewajibkan para guru untuk berkomunikasi lisan dengan berbahasa asing di antara sesama mereka, mewajibkan para guru untuk menulis karya ilmiah di dalam bahasa asing, serta mewajibkan para guru untuk menyimak berbagai tampilan audio visual dalam bahasa asing kemudian menulis laporan dari hasil menyimak tersebut.

Penerapan bilingual SMK di Indonesia cukup terlambat jika dibandingkan program pendidikan bahasa Inggris yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Thailand. Di Thailand, semua mata pelajaran seperti bahasa Thai, undang-undang, sosiologi, kebudayaan, tradisi Thailand diajar dalam bahasa Thai. Sedangkan, semua mata pelajaran sisanya diajarkan dengan bahasa Inggris. Program pengajaran dengan bahasa Inggris sudah dilaksanakan sejak tahun 2002 sesuai dengan instruksi Kementerian Pendidikan Thailand. Para guru haruslah orang Inggris atau guru Thailand yang sudah mencapai taraf keguruan dan bahasa Inggris tinggi. Program ini menciptakan syarat untuk menghimpun para guru Thailand di mata pelajaran, seperti ilmu pengetahuan, matematika, informatika yaitu para guru yang dulu

mengajar bahasa Thai berkesempatan mendapat pendidikan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam mengajar. Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menggunakan bahasa Inggris secara lebih permanen. Tujuan mereka adalah mempersenjatai kemampuan bahasa asing yang baik kepada para guru dan pelajar Thailand untuk berkomunikasi dalam lingkungan ASEAN pada masa depan, tempat di mana bahasa Inggris menjadi bahasa integrasi ekonomi.



Gambar 8.2 "Program Sertifikasi TOEIC Nasional"

Sejak tahun 2002, Pemerintah Thailand mulai menerapkan program pengajaran dwibahasa Inggris-Thai di beberapa mata pelajaran di sekolah negeri di berbagai tingkat. Menurut data-data dari Komite Pendidikan Swasta Thailand pada bulan Juni 2016, ada 166 sekolah internasional yang menggunakan 100% bahasa Inggris sebagai bahasa pengajaran utama dan 3.513 sekolah swasta yang punya 50% jumlah mata pelajaran yang menggunakan bahasa Inggris.

Setiap pagi hari, misalnya di Sekolah Dasar (SD) Phraya Prasert Suntrasai

(Kota Bangkok), semua pelajar antre dan mengeja kata mana pun dalam bahasa Inggris di depan para guru Inggris. Ini merupakan salah satu di antara aktivitas-aktivitas sekolah tersebut untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa Inggris para pelajarnya. Selain itu, pada setiap pekan, sekolah ini juga mengadakan kursus-kursus ekstrakurikuler bagi semua pelajar. Para pelajar akan secara bergilir memperkenalkan satu negara ASEAN dengan bahasa Inggris setelah setiap jam belajar. ASEAN mengkonektivitaskan sepuluh negara anggota di semua bidang, dari kebudayaan, pendidikan sampai ekonomi. Kalau para pelajar mengerti konektivitas intra kawasan pada latar belakang setiap negara ASEAN memiliki perbedaan yang khas, mereka akan mudah menyesuaikan diri dengan proses integrasi ekonomi pada khususnya dan Komunitas ASEAN pada umumnya.

Ketika guru SMK sudah mahir menggunakan bahasa asing, kemahiran tersebut kemudian diterapkan juga kepada para siswa SMK. Selain pembelajaran bahasa asing secara reguler, salah satu metode pembelajaran bahasa asing dalam kerangka bilingual adalah menjadikannya sebagai bagian dari konten pembelajaran. Pembelajaran bahasa asing tidak harus dilakukan hanya pada mata pelajaran khusus, tetapi pada mata pelajaran lainnya. Ketika semua guru mata pelajaran telah mahir menggunakan bahasa asing, mereka tidak akan menemui sulit untuk dapat menyampaikan materi dari masing-masing mata pelajaran tersebut menggunakan bahasa asing. Hanya saja penggunaan bahasa asing pada mata pelajaran-mata pelajaran tersebut tidak setiap pertemuan, frekuensinya diatur oleh regulasi manajemen sekolah atau ada aturan yang lebih tinggi untuk mengatur persoalan tersebut.

Penerapan ekosistem bilingual sebagai bagian dari manajerial sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab manajemen. Ini harus menjadi perhatian juga oleh siswa, guru, kepala sekolah, orangtua, serta pemangku kebijakan seperti disampaikan oleh Peeter Mehisto dalam hasil penelitian disertasinya yang berjudul "Navigating management and pedagogical complexities in bilingual education: An Estonian Case Study". Siswa—walaupun menjadi objek dari penerapan kebijakan sekaligus program ekosistem bilingual—juga memiliki tanggung jawab sesuai peran dan kapasitasnya. Peran dan tanggung jawabnya antara lain dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh para guru. Sesuai dengan capaian ekosistem bilingual, para guru

akan memberikan tugas-tugas dari berbagai mata pelajaran dalam bentuk bahasa asing. Oleh karena itu, para siswa memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut dan jangan merasa bosan karena akan begitu banyak yang harus diselesaikan.

Kemudian, kepala sekolah sebagai lokomotif penggerak lembaga pendidikan SMK jelas memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem bilingual di SMK karena kepala sekolah merupakan unsur sentral. Selain itu, kepala sekolah juga menjadi bagian inti dalam manajemen yang akan menelurkan berbagai kebijakan terkait dengan penciptaan ekosistem bilingual di SMK. Oleh karena itu, harus ada kebijakan yang implementasinya sebagai menguatkan dan memberikan sebuah konsep yang berkesinambungan atas ekosistem bilingual ini.

Lalu, orangtua juga menjadi pihak yang juga bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem bilingual bagi siswa SMK. Langkah paling konkret adalah dengan membantu para siswa saat berada di rumah dalam berlatih bahasa asing. Hal ini memiliki peluang untuk dilakukan jika orang tua siswa memiliki kompetensi di bidang tersebut. Namun, jika kompetensi itu tidak dimiliki, langkah yang paling dekat adalah menciptakan iklim rumah yang kondusif untuk para siswa melakukan aktualisasi diri di bidang penguasaan bahasa asing serta memberikan dukungan dan dorongan untuk aktualisasi di lingkungan sekolah.

Terakhir adalah *stakeholder* atau pemegang kebijakan pendidikan SMK. Jika hanya mengacu kepada manajemen sekolah, hanya sekolah yang memiliki manajemen baik yang akan mampu meningkatkan kapasitas penguasaan bahasa asing oleh guru dan terutama siswa. Sementara, sekolah yang memiliki manajemen kurang baik akan tertinggal jauh. Untuk itu pemegang kebijakan juga harus mengeluarkan ketentuan yang menjadi regulasi pada lembaga-lembaga pendidikan SMK. Ketika telah menjadi sebuah regulasi, setiap SMK mau tidak harus menjalankan ketentuan tersebut sehingga hasilnya adalah pemerataan ekosistem bilingual di seluruh SMK.

Komitmen Dimulai Sejak dari Gerbang Sekolah

Komitmen penciptaan kondisi bilingual harus dimulai sejak gerbang

sekolah. Artinya, dimulai dari siswa melewati gerbang sekolah, dia sudah harus mengikuti aturan bilingual yang ada di dalam lingkungan sekolah

Sekolah harus menjadi tempat yang membuat para siswa merasa nyaman untuk belajar bahasa asing. Kenyamanan itulah yang kemudian akan membuat para siswa tidak merasa bahwa belajar bahasa asing bukan merupakan sebuah kewajiban melainkan sebuah kebutuhan yang harus mereka persiapkan sebelum memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, upaya penyadaran tentang kondisi tersebut perlu dilakukan secara masif.



Gambar 8.3 "Program No English, No Service"

Salah satu metode untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembelajaran bahasa asing pernah diterapkan oleh sebuah sekolah adalah program No English, No Service. Dalam program itu, sekolah mewajibkan seluruh warga sekolah untuk menggunakan bahasa Inggris pada hari tertentu. Jika siswa ke kantin dan memesan makanan, siswa harus menggunakan bahasa Inggris. Siswa tersebut tidak akan dilayani jika menggunakan bahasa selain bahasa Inggris. Begitu juga ketika siswa

akan membutuhkan pelayanan untuk memfotokopi, berbincang dengan guru, meminjam alat pembelajaran, dan sebagainya, mereka hanya akan dilayani jika menggunakan bahasa Inggris.

Demikianlah hal-hal yang harus dilakukan setiap SMK ketika berkomitmen untuk menciptakan ekosistem bilingual di lingkungan sekolah. Sejak memasuki gerbang sekolah, siswa SMK harus menggunakan bahasa asing untuk menjadi kata kunci agar dapat akses masuk ke sekolah. Begitu juga ketika siswa akan memasuki ruangan, bercengkerama dengan teman sekelas, apalagi bercengkerama dengan guru, siswa harus dikondisikan untuk menggunakan bahasa asing. Kemudian, pada hari itu, siswa harus menggunakan bahasa Inggris pada berbagai aktivitas lainnya di sekolah sampai para siswa pulang.

Agar menjadi sebuah kesenangan, upaya menciptakan ekosistem bilingual harus juga dikolaborasikan dengan bidang keahlian di SMK. Siswa memiliki alasan tertentu untuk memilih kompetensi keahlian yang kemudian mereka masuki. Alasan yang paling dominan mendasari pemilihan kompetensi keahlian adalah kesukaan siswa terhadap kompetensi keahlian tersebut. Ketika siswa memilih kompetensi keahlian otomotif, itulah yang menjadi kesenangan siswa. Jika kompetensi keahlian tersebut dikolaborasikan dengan pembelajar bilingual, siswa tidak akan terbebani.

AKTIVASI KARAKTER BEKERJA SISWA SMK

“Kecakapan literasi dasar dan kecakapan perpustakaan yang efektif adalah kunci bagi masyarakat yang literat dalam menghadapi derasnya arus informasi teknologi.”

--Konvensi PBB, Praha tahun 2003

Pada periode industri 4.0, informasi tersebar secara sporadis. Bahkan, kita kesulitan untuk menyaring informasi yang kita konsumsi sehari. Jika seseorang tidak memiliki kecakapan literasi dasar, ia akan mudah terbawa arus informasi yang barangkali akan merugikan dirinya sendiri. Kecakapan literasi dasar itu sendiri sangat dipengaruhi oleh infrastruktur, salah satunya adalah perpustakaan. Sekolah adalah salah satu tempat yang memungkinkan kedua hal itu (kecakapan literasi dasar dan kecakapan perpustakaan) dikembangkan. Sebagaimana konvensi PBB di Praha pada tahun 2003, kecakapan literasi dasar dan kecakapan perpustakaan menjadi fondasi untuk menghadapi derasnya arus informasi.

Literasi menjadi salah satu program yang tengah digalakkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini berangkat dari rendahnya tingkat literasi Indonesia. Banyak lembaga penelitian yang menilai bahwa minat baca anak Indonesia masih berada pada level yang sangat rendah. Programme for International Student Assessment (PISA) menyebutkan bahwa minat baca anak Indonesia berada di urutan ke 57 dari 65 negara yang diteliti. Berdasarkan hasil survei, indeks minat baca anak hanya menempati poin 0,002. Artinya, dari dua ribu anak, hanya satu yang rajin membaca.⁶



Gambar 9.1 “Angka Buta Huruf di Indonesia”

Kemudian, menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat buta huruf di Indonesia semakin menurun; sebesar 97.93 persen penduduk Indonesia telah berhasil diberaksarakan. Dengan begitu, hanya tinggal 2,07 persen atau sebanyak 3.387.035 jiwa yang mengalami buta huruf. Indonesia telah membuktikan keberhasilan dengan mencapai prestasi melebihi target; 23 provinsi sudah berada di bawah angka nasional masyarakat buta aksaranya. Meski mengklaim berhasil mengurangi tingkat buta

⁶Sumber <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/07/13/oa9bbm365-survei-minat-baca-pelajar-kota-bogor-rendah>

huruf, tetapi harus diakui bahwa beberapa daerah di Indonesia masih terbelenggu masalah buta huruf yang tinggi. Setidaknya, terdapat 11 provinsi dengan angkanya di atas angka nasional, yaitu Papua (28,75 persen), NTB (7,91 persen), NTT (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 persen), Sulawesi Selatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,90 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah (2,20 persen).

Pada dasarnya, hal tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat kemelekan huruf di Indonesia sudah membaik. Hal ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Namun, permasalahannya adalah tingkat literasi yang baik bukanlah soal tingginya angka kemelekan huruf, melainkan minat baca. Angka kemelekan huruf yang tinggi akan percuma bila minat baca masyarakat Indonesia kurang.

Namun, perlu dipahami bahwa literasi bukan melulu persoalan membaca dan menulis, melainkan pula kemampuan berpikir dan memanfaatkan segala media dan sumber untuk menggali pengetahuan. Menurut Ferguson (dalam Bibliotech. us), literasi dibagi menjadi lima komponen, yakni *basic literacy* ‘literasi dasar’, *library literacy* ‘literasi perpustakaan’, *media literacy* ‘literasi media’, *technology literacy* ‘literasi teknologi’, dan *visual literacy* ‘literasi visual’. Kelima komponen tersebut ialah cara-cara memanfaatkan sumber-sumber pengetahuan, misalnya literasi dasar.

Literasi dasar adalah kemampuan seseorang dalam menganalisis, yakni membaca, mendengarkan, berbicara, menulis, dan menghitung. Kelima kemampuan tersebut berelasi dengan kemampuan analisis untuk menyerap informasi, memperhitungkan sesuatu, mengomunikasikan informasi, dan menggambarkan informasi. Seseorang harus memiliki kemampuan ini ketika ia menyerap atau mendapat informasi. Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki kemampuan ini memiliki daya kritis saat mendapatkan informasi. Dengan demikian, ia akan dapat menangkal hoaks.

Selanjutnya, literasi perpustakaan adalah kemampuan berikutnya dalam menggali informasi. Literasi perpustakaan sangat berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan sebagai media penyedia informasi. Seseorang yang memiliki kemampuan ini—selain mengetahui dan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi—dapat membedakan berbagai jenis buku. Selain literasi perpustakaan,

seseorang juga harus “melek” literasi media. Literasi media adalah kemampuan untuk mengetahui dan memanfaatkan berbagai media (media cetak, elektronik, dan media digital) sebagai alat untuk menggali informasi. Selain mengetahui dan memanfaatkan media, seseorang juga harus mengetahui tujuan penggunaan media. Saat ini, notabene, media digunakan sebagai alat hiburan padahal media memiliki manfaat untuk menggali informasi dan menambang pengetahuan yang positif.

Literasi teknologi menjadi kemampuan lainnya yang harus dimiliki oleh seorang terpelajar. Literasi teknologi ialah kemampuan memahami teknologi, misalnya peranti keras, peranti lunak, dan etika pemanfaatan teknologi. Seseorang harus dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan dirinya. Misalnya, ia harus bisa mengoperasikan komputer (menyalakan dan mematikan), mengolah data, dan menggunakan perangkat lunak yang ada di dalamnya. Dengan demikian, seseorang bukan hanya dapat mengonsumsi informasi, melainkan mengelola dan membuat informasi yang positif.

Kemudian, kemampuan yang terakhir, menurut Ferguson, ialah literasi visual. Literasi visual adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi. Kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan materi visual dan audio-visual secara kritis. Pada kenyataannya, setiap hari kita disuguhkan berbagai tampilan visual dan audio-visual di berbagai media (televisi, radio, internet, reklame, dll.). Seseorang haruslah memiliki kemampuan untuk memahami hal yang dilihat dan didengarkannya setiap hari. Ia harus menyadari manipulasi yang hadir dalam segala media yang ia konsumsi.

Gerakan Literasi Sekolah

Untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa, pada tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan kebijakan Gerakan Literasi Sekolah (GLS). Gerakan ini diharapkan mampu mendorong siswa untuk membaca dan menulis dengan cara yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Menurut Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SMK, GLS bertujuan (1) menumbuhkan budi pekerti siswa. Siswa akan mendapat pelajaran yang berharga melalui buku yang ia baca. Selain itu, semakin siswa memiliki pengetahuan, siswa akan semakin memiliki karakter.



Gambar 9.2 “Gerakan Literasi Sekolah”
 Sumber: pt.scribd.com

Tujuan lain GLS adalah (2) membangun ekosistem literasi sekolah di SMK. Ekosistem literasi di sekolah sangat penting dalam mendukung aktivitas belajar

siswa. Siswa akan terpicu untuk mengembangkan dirinya saat ia membaca. Jika suatu sekolah tidak memiliki ekosistem literasi yang baik, siswa tidak akan terpicu untuk membaca. Dalam hal ini, peran sekolah menjadi signifikan dalam penciptaan ekosistem literasi di sekolah. Tujuan GLS berikutnya adalah (3) mempraktikkan kegiatan pengelolaan pengetahuan. Pada dasarnya, sebelum sekolah menjadi pengelola pengetahuan, sekolah juga harus (4) menjadi organisasi pembelajar. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah merupakan sumber pengetahuan; di sana pengetahuan diproduksi dan didistribusikan/dipublikasikan. GLS memiliki peran dalam pengelolaan pengetahuan tersebut. Dengan adanya GLS, sekolah menjadi medium yang baik bagi penyebaran ilmu pengetahuan itu. Selain itu, GLS juga bertujuan (5) menjaga keberlanjutan budaya literasi di SMK. Seperti yang kita ketahui, banyak kalangan yang menganggap bahwa budaya literasi di SMK sangat lemah karena pendidikan SMK lebih menekankan pada praktik. Memang, pada dasarnya, pendidikan SMK lebih menekankan pada praktik sehingga teori-teori yang diajarkan bersifat praktis. Namun, perlu dipahami bahwa praktik-praktik itu adalah literasi juga. Kita harus menyadari bahwa literasi bukan hanya persoalan membaca buku, melainkan “melek” terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, memang benar bahwa proses membaca di SMK harus ditingkatkan agar siswa menjadi lebih berkembang.

Dalam menciptakan ekosistem yang literat, sarana mutlak harus dibuat. Sekolah perlu memajang karya peserta didik di berbagai sudut sekolah, misalnya koridor, ruang kepala SMK, ruang guru, ruang administrasi, ruang BK, dan ruang kelas atau praktik kejuruan. Tentu saja, setiap siswa akan mendapat giliran untuk memajang karyanya sehingga semua karya siswa dapat diakomodasi. Selain itu, siswa akan menjadi lebih semangat dalam berkarya.

Sekolah juga perlu membuat pojok bacaan di berbagai tempat. Hal ini dapat menstimulus siswa untuk membaca di berbagai tempat. Selain itu, sekolah juga harus menyediakan internet untuk menunjang kegiatan membaca dan menulis. Ketika sekolah menyediakan sarana internet, artinya, sekolah juga harus menyediakan sarana komputer atau materi bacaan lainnya.

Peran warga sekolah sangat berpengaruh dalam penciptaan ekosistem literat. Kepala sekolah memiliki peran untuk berinteraksi dengan siswa mengenai materi

bacaan yang mereka baca. Guru pun memiliki peran untuk memotivasi siswa untuk terus membaca. Selain itu, guru bertugas mengontrol capaian membaca siswa. Dalam penerapan GLS di SMK, pustakawan memiliki pengaruh yang besar. Jika sekolah tidak memiliki pustakawan, GLS akan terhambat. Oleh sebab itu, peran pustakawan sangat penting dalam penerapan GLS.



Gambar 9.3 “Pojok Bacaan di SMK Latanro Enrekang”
Sumber: edukasi.rakyatku.com

Selain sarana yang telah disebutkan di atas, sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang literat dari segi sosial dan afeksi. Sebagaimana yang tertuang di dalam Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SMK, siswa yang memiliki capaian akademik dan non-akademik harus diberi penghargaan secara rutin, baik mingguan atau bulanan. Upacara hari seni dapat menjadi media yang baik untuk memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi tersebut agar siswa lainnya termotivasi untuk mencapai hal yang sama, yakni prestasi. Kemudian, kepala sekolah juga memiliki peran dalam membimbing siswa untuk mengembangkan literasi. Kepala sekolah dapat memperkenalkan etika perilaku dan hukum dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Bukan hanya kepala sekolah dan guru,

melainkan staf harus memiliki peran dalam penciptaan lingkungan yang literat secara sosial dan afektif. Staf dapat berkolaborasi dengan guru dalam mengembangkan program literasi sekolah. Misalnya, staf dan guru dapat berkolaborasi membuat bahan kaya teks atau media literasi lainnya. Staf dan guru juga dapat memilih cara dan jenis literasi-el yang tepat untuk proses pembelajaran, produksi pengetahuan, dan penyebaran pengetahuan. Dengan demikian, staf sekolah juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program literasi.



Gambar 9.4 "Gerakan Literasi Sekolah di SMK Negeri 1 Jepara"
Sumber: smk1jepara.net

Penciptaan lingkungan yang literat dapat juga dilakukan pada saat perayaan hari besar nasional. Misalnya, di Hari Pahlawan, siswa dapat membaca sejarah atau biografi para pahlawan. Pada hari besar nasional, pihak sekolah dapat mengadakan berbagai lomba yang berkaitan dengan kegiatan literasi, misalnya lomba menulis dan membaca puisi atau lomba debat.

Di lingkungan akademik, sekolah harus menyediakan waktu khusus untuk

pembelajaran dan pembiasaan literasi, misalnya membaca dalam hati (*sustained silent reading*), membaca terpadu (*guided reading*), diskusi buku, bedah buku, presentasi, menghadirkan pakar sebagai guru tamu (misalnya penulis). Kegiatan membaca ini dapat dilakukan lima belas menit sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Dalam hal ini, peserta didik bukan hanya membaca secara individual, melainkan membaca secara komunal. Guru dan peserta didik harus membudayakan membaca bersama-sama. Hal ini dapat menciptakan persebaran ilmu pengetahuan. Dalam pada itu, guru, sebagai pembimbing atau pengawas, dapat membuat daftar buku yang telah selesai dibaca, khususnya membaca karya sastra—dalam GLS, karya sastra menjadi bacaan yang wajib dibaca oleh siswa.

Kemudian, peserta didik dapat dimotivasi untuk mengunggah hasil karyanya melalui laman SMK atau blog guru/siswa. Pihak sekolah juga perlu menyediakan bahan bacaan yang cukup banyak; di antara bahan bacaan itu, ada bahan bacaan yang wajib dibaca oleh siswa dan warga sekolah lainnya. Dalam penyediaan bahan bacaan, pihak sekolah dapat meminta bantuan kepada orangtua/wali siswa untuk menyediakan sekurang-kurangnya satu buku nonfiksi atau fiksi sebagai bahan literasi anaknya. Setelah selesai dibaca, buku itu wajib direSENSI dan diberikan kepada siswa yang lain, sehingga siswa dapat membaca berbagai macam buku tanpa harus membelinya. Pihak sekolah pun akan terbantu dengan diterapkannya sistem ini.

Dalam pelaksanaan program ini, pihak sekolah dapat bekerja sama dengan pihak lain, misalnya perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, perpustakaan daerah, atau sekolah lain. Kolaborasi semacam ini dapat menciptakan ekosistem literasi yang baik. Siswa bukan hanya berinteraksi dengan warga sekolah, melainkan dapat berinteraksi dengan pihak luar sekolah, sehingga siswa tidak merasa bosan dan sekolah memiliki beragam kegiatan yang berbeda-beda.

Kegiatan literasi yang dilaksanakan di sekolah tersebut diharapkan dapat membentuk siswa yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan di abad ke-21 ini, yakni keterampilan 4C menurut The Four Cs 21st Century Skills. Pertama, *critical thinking* adalah kemampuan yang harus dimiliki siswa saat ia menghadapi masalah. Siswa harus dapat menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi. Agar peserta didik mampu menjadi *critical thinker*, peserta didik dapat dilatih dengan cara diberi masalah dan pembelajaran kemudian ia dipancing untuk bertanya dan

berupaya untuk memecahkan masalah tersebut. Kedua, peserta didik harus memiliki kemampuan *communicator*. Peserta didik harus dapat mengomunikasikan idenya. Selain itu, ia harus dapat mengembangkan idenya menjadi gagasan-gagasan. Ketiga, *collaborator* merupakan kemampuan yang harus dimiliki peserta didik agar ia mampu bekerja dalam tim. Dengan kolaborasi, peserta didik juga dapat bertukar gagasan dengan peserta didik lain yang memiliki bidang keahlian yang berbeda. Dalam berkolaborasi, mereka dapat menggunakan teknologi. Teknologi memungkinkan seseorang untuk berinteraksi satu sama lain dan kemudian membuat suatu produk secara bersama-sama. Keempat, kemampuan *creator* harus dimiliki oleh siswa. Setelah lulus, siswa bukan hanya memiliki satu pilihan, yakni menjadi pekerja atau bekerja untuk orang lain saja, melainkan siswa dapat menjadi kreator atau pembuat lapangan kerja, misalnya dengan berwirausaha. Keempat kemampuan itulah yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah siswa melalui program GLS.

Pada tahun 2016, SMK Negeri 12 Bandung telah melaksanakan GLS. Dalam implementasi GLS, SMK Negeri 12 Bandung membentuk Tim Literasi. Kemudian, pihak sekolah, khususnya kepala sekolah mengadakan sosialisasi GLS. Kepala sekolah mengadakan rapat dinas dengan guru, staf, dan komite sekolah. Selain itu, Upacara hari Senin menjadi momen untuk menyosialisasikan GLS selain di laman resmi sekolah. Kemudian, sebagaimana yang tertuang di Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SMK, pihak sekolah membuat mading, pojok-pojok baca, dan menciptakan suasana yang nyaman untuk membaca. Kemudian, sekolah juga mengumpulkan hasil tulisan dan karya yang dibuat peserta didik.

Dalam implementasinya, SMK Negeri 12 Bandung melaksanakan tiga tahap, yakni tahap pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Pada tahap pembiasaan, SMK Negeri 12 Bandung melaksanakan lima belas menit membaca buku (bukan buku pelajaran). Lalu, guru menugaskan siswa untuk membuat jurnal hasil bacaan siswa dan mengisi mading secara bergantian. Pada tahap pengembangan, sekolah membuat bahan kaya teks untuk siswa. Kemudian, pembelajaran dilakukan dengan berbasis literasi. Selain itu, program tambahan pada tahap pengembangan adalah lomba menulis puisi, cerpen, perpustakaan kelas, dan lomba poster. Pada tahap pembelajaran, setiap hari besar nasional, sekolah akan mengadakan pembacaan bahan literasi tentang hari tersebut. Sekolah juga

mendorong siswa untuk mendiskusikan berbagai buku dan membuat bedah buku. Sekolah juga akan memberi penghargaan bagi siswa yang menulis (hasil bacaannya atau karya lainnya) dengan hasil tulisan yang berkualitas. Dalam hal ini, sekolah akan mendokumentasikan hasil karya siswa. Dokumentasi itu dibuat dalam format buku bacaan dan melalui tahap seleksi. Lalu, SMK Negeri 12 Bandung juga mendatangkan instruktur yang menguasai gerakan literasi.

Untuk melihat efektivitas program ini, Tim Literasi SMK Negeri 12 Bandung membuat *monitoring* dan evaluasi. Tim membuat angket evaluasi pelaksanaan GLS dengan berbagai indikator. Dari hasil evaluasi itu, tim akan dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya untuk mengembangkan pelaksanaan GLS. Kemudian, untuk memonitor pelaksanaan GLS di SMK Negeri 12 Bandung, tim melakukan pemantauan secara berkelanjutan dan mencatat temuan-temuan dalam implementasi GLS di SMK Negeri 12 Bandung.

Sama halnya dengan SMK Negeri 12 Bandung, SMK Negeri 1 Tanah Abang mengimplementasikan GLS berdasarkan Panduan Gerakan Literasi Sekolah di SMK. Siswa SMK Negeri 1 Tanah Abang melakukan kegiatan membaca lima belas menit buku non-pelajaran dengan situasi yang menyenangkan. Selain itu, siswa tidak dibebankan tugas apa pun terhadap buku yang ia baca. Menurut Wandasari, Kepala SMK Negeri 1 Tanah Abang dalam artikelnya yang berjudul “Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sebagai Pembentuk Pendidikan Berkarakter” (2017), komunikasi antara seluruh komponen sekolah menjadi strategi implementasi GLS di sekolah. Komunikasi ini berkaitan dengan sosialisasi kebijakan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam GLS. Sosialisasi ini dilakukan melalui rapat kerja dan pemberitahuan kepada orang tua. Selain itu, pihak sekolah juga menggalakkan GLS di sekolah saat upacara bendera pada hari Senin.

Guru menjadi ujung tombak bagi kesuksesan GLS di SMK Negeri 1 Tanah Abang—bagaimana pun guru menjadi pelaksana utama dalam program ini. Selain guru, orang tua siswa memiliki peran dalam menyukseskan GLS. Pihak sekolah berkolaborasi dengan pihak orang tua dalam menentukan kebijakan untuk GLS, sehingga kebijakan tidak hanya berasal dari kepala sekolah saja, melainkan dari seluruh komponen yang ada di sekolah.

Wandasari (2017) menganggap bahwa GLS juga sukses jika seluruh

komponen sekolah terlibat karena gerakan ini adalah gerakan partisipatif. GLS juga akan mampu membentuk karakter siswa. Menurutnya, GLS mampu memberikan kebajikan bagi siswa karena dalam hal ini siswa diajarkan untuk menyediakan waktu untuk membaca berbagai macam hal yang baik. Melalui GLS, siswa akan diajarkan untuk menghargai prestasi dan keberhasilan orang lain. Siswa juga akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat.

Komunitas Pelajar Sehat dan Berotot

Selain GLS, pemerintah perlu memperhatikan kesehatan siswa, khususnya siswa SMK. Hal itu signifikan karena pada saat ini siswa dihadapkan pada kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan dirinya. Direktur Human Capital Manajemen PLN, Muhammad Ali, mengatakan bahwa banyak lulusan SMK yang memiliki penyakit, misalnya paru-paru dan kolesterol. Meski siswa-siswa tersebut telah mendapatkan surat kompetensi dari PLN, calon karyawan PLN lulusan SMK gagal masuk karena masalah kesehatan mereka.

Merokok menjadi kebiasaan buruk yang dialami siswa, khususnya siswa SMK. Selain itu, siswa SMK juga tidak mendapatkan edukasi mengenai makanan sehat, sehingga siswa makan sembarangan. Padahal, kondisi fisik mereka akan memengaruhi ketersediaan tenaga kerja dan kinerja mereka saat bekerja. Tentu saja, suatu perusahaan tidak ingin memiliki pekerja yang memiliki penyakit karena dapat memengaruhi produktivitas perusahaan mereka. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan besar mengadakan tes kesehatan secara serius. Mereka tidak ingin karyawan mereka tidak produktif karena masalah kesehatan.

Data Dirjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI tahun 2018 menyebutkan bahwa terdapat 277 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang sudah memenuhi kualitas kesehatan lingkungan dari 514 kabupaten/kota. Sementara itu, di SMK sendiri, kualitas kesehatan lingkungan masih sangat terbatas. Menurut data Kemdikbud, SMK yang memiliki akses jamban dasar hanya 41,36%. Sementara itu, SMK yang memiliki akses jamban terbatas dan tidak memiliki akses jamban masing-masing sebesar 44,56% dan 14,08%. Kemudian, jumlah SMK yang belum memiliki akses cuci tangan pun sangat besar jumlahnya, yakni 31,14%. Perihal ketersediaan air bersih, secara keseluruhan SMK di Indonesia memiliki akses air yang baik.

Persentase SMK yang memiliki akses air layak dan cukup mencapai 74,65%. Namun, hal ini berbeda dengan di NTT, sekitar 60% SMK di NTT mengakses sumber air yang tidak layak, seperti sungai, sumur tidak terlindungi atau mata air tidak terlindungi. Apabila melihat data-data di atas, tentu saja, kondisi saat ini belum cukup ideal.



Gambar 9.5 "Saran Kesehatan Sekolah"

Jika Indonesia ingin lulusan SMK yang berkualitas, komponen sekolah sehat harus dipenuhi. Sebuah sekolah harus memiliki pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan lingkungan sekolah sehat. Standar-standar sekolah sehat pun harus dimiliki oleh SMK di Indonesia. Standar sekolah sehat itu meliputi:

1. memiliki lingkungan sekolah bersih, indah, tertib, rindang dan memiliki penghijauan yang memadai;
2. memiliki tempat pembuangan dan pengelolaan sampah yang memadai dan representatif;
3. memiliki air bersih yang memadai dan memenuhi syarat kesehatan;
4. memiliki kantin dan petugas kantin yang bersih dan rapi, serta menyediakan

menu bergizi seimbang;

5. memiliki saluran pembuangan air tertutup dan tidak menimbulkan bau tak menyenangkan;
6. memiliki ruang kelas yang memenuhi syarat kesehatan (ventilasi/AC dan pencahayaan cukup);
7. memiliki ruang kelas yang representatif dengan rasio kepadatan jumlah siswa di dalam kelas adalah 1: 2 m²;
8. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran memenuhi standar kesehatan, kenyamanan dan keamanan;
9. memiliki ruang dan peralatan UKS yang ideal. (tersedia tempat tidur; timbangan berat badan, alat ukur tinggi badan, *snellen chart*; kotak P3K berisi obat; lemari obat, buku rujukan, KMS, poster-poster, struktur organisasi, jadwal piket, tempat cuci tangan/*wastafel*, data angka kesakitan siswa; peralatan perawatan gigi, unit gigi; contoh-contoh model organ tubuh, rangka torso dan lain-lain);
10. memiliki toilet (wc) dengan rasio untuk siswi 1 : 25 dan siswa 1:40;
11. memiliki taman/kebun sekolah yang dimanfaatkan dan diberi tabel (untuk sarana belajar) dan pengolahan hasil kebun;
12. memiliki kurikulum pembelajaran yang baik bagi tumbuh kembang siswa;
13. memiliki kehidupan sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan;
14. memiliki pola hidup bersih, higienis dan sehat.

Untuk mencapai standar itu, SMK harus melakukan berbagai kegiatan. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan aktivitas fisik dan kreativitas: wisata siswa, kemah, ceramah, diskusi, simulasi, dan bermain peran, lomba-lomba, bimbingan hidup sehat, kerja bakti, piket sekolah, dll. Selain itu, sekolah juga dapat membuat sarana-sarana kesehatan, misalnya apotek hidup, kebun sekolah, majalah dinding, buletin, atau majalah. Melalui kegiatan-kegiatan itu, siswa akan memahami pola makan sehat, perlunya keseimbangan gizi, berbagai penyakit menular seksual dan penyakit menular lainnya, bahaya seks bebas, bahaya merokok dan minuman keras, bahaya penyalahgunaan narkoba, dan cara menolak perlakuan pelecehan seksual.

Pencapaian standar sekolah sehat ditentukan oleh (1) fasilitas sanitasi yang baik, (2) pendidikan kesehatan yang baik, dan (3) manajemen sekolah yang menjamin anggaran perawatan sarana kesehatan. Jika ketiga hal tersebut dilaksanakan, lingkungan sehat akan tercapai, PHBS akan terlaksana, dan kesehatan dan pendidikan akan terjamin.

Selain memperbaiki lingkungan, sekolah juga harus memiliki strategi peningkatan kesehatan siswa SMK. Sekolah harus bekerja sama dengan orangtua dalam meningkatkan kesehatan siswa. Dalam hal ini, keluarga menjadi ujung tombak. Pihak sekolah dapat menyarankan kepada orangtua siswa untuk melakukan makan tiga kali sehari; mengonsumsi ikan dan sumber protein lainnya, memperbanyak makan sayuran, dan buah-buahan; menyediakan bekal makanan dan air putih untuk anaknya; membatasi makanan cepat saji atau jajanan; membiasakan menyikat gigi kepada anaknya; melarang anaknya untuk merokok dan minuman beralkohol; melakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur.

Sementara itu, pihak sekolah pun harus menyiapkan peserta didiknya agar mampu diserap lapangan kerja. Seperti yang telah disebutkan di awal bahwa banyak perusahaan yang mensyaratkan kesehatan bagi calon pegawainya. Oleh sebab itu, pihak sekolah harus melakukan tes kesehatan terhadap calon peserta didiknya. Tes kesehatan ini penting karena peserta didik akan menghadapi pendidikan kejuruan yang berat. Sekolah dapat memeriksa fisik peserta didiknya; mulai dari postur tubuh hingga tes buta warna. Kondisi fisik pada masa awal akan memengaruhi proses pendidikan mereka.

Selain itu, bila perlu sekolah menerapkan pendidikan ketrunaan. Pendidikan ketrunaan memang telah diterapkan pada SMK tertentu, misalnya pelayaran, penerbangan, pertambangan, dll. Dalam pendidikan ketrunaan, siswa akan diajarkan kedisiplinan. Hal ini penting saat mereka bekerja di perusahaan, apalagi perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran, penerbangan, dan pertambangan. Kedisiplinan menjadi hal yang utama. Selain kedisiplinan, kondisi fisik yang prima dan mental yang kuat juga sangat menunjang pekerjaan di tiga bidang tersebut. Dalam pendidikan ketrunaan, peserta akan dilatih secara fisik dan mental. Pendidikan ini juga dapat diterapkan pada SMK dengan kompetensi keahlian lainnya, misalnya teknik, akuntansi, pemasaran, pariwisata, dll. Mereka

juga harus dilatih untuk berdisiplin. Kondisi mental dan fisik mereka pun harus kuat.

Jika pun tidak menjadi basis pendidikan di suatu sekolah, pendidikan ketrunaan sebaiknya diberikan secara singkat atau periodik dalam bentuk pelatihan; dapat berupa pendidikan dan latihan bela negara; dapat juga dimasukkan ke dalam program masa pengenalan lingkungan sekolah; dapat pula sebagai kegiatan ekstrakurikuler.



Gambar 9.6 "Pelatihan Ketrunaan di SMK"

Pihak sekolah juga harus mengontrol kondisi kantin sekolah. Sebaiknya, kantin sekolah menyediakan makanan yang sehat. Sekolah dapat menyeleksi pedagang yang berjualan di kantin sekolah. Pedagang yang menjual makanan yang dapat mengganggu kesehatan dapat dibatasi, misalnya pedagang gorengan atau makanan yang berminyak. Pihak sekolah harus memikirkan komposisi kantin sekolah. Makanan empat sehat lima sempurna harus tersedia di kantin sekolah.

Selain kesehatan jasmani, peserta didik juga harus memiliki kesehatan rohani. Sekolah harus mempersiapkan peserta didik yang berakhlak mulia. Sekolah dapat memperbanyak kegiatan keagamaan di sekolah. Selain itu, sekolah juga harus mengenalkan sekolah dalam masa orientasi siswa dengan cara melakukan kerja bakti. Dengan kerja bakti, calon peserta didik yang mengikuti masa orientasi sekolah akan mengenal tiap sudut sekolah mereka. Hal ini berefek positif bagi sekolah dan peserta didik itu sendiri. Kemudian, pihak sekolah juga dapat memberikan kegiatan yang dapat membangun karakter peserta didik (selain kegiatan GLS). Misalnya, pihak sekolah dapat membuat kegiatan dialog interaktif tentang pembangunan karakter bangsa dan kegiatan yang dapat membentuk watak dan perilaku siswa. Dalam hal ini, pihak sekolah juga dapat berkolaborasi dengan pihak lain, misalnya pemerintah daerah atau bahkan militer.

Gerakan Literasi Sekolah dan Komunitas Pelajar Sehat dan Berotot diyakini dapat meningkatkan kualitas lulusan SMK. SMK harus menghasilkan lulusan yang literat dan sehat. Itulah tujuan pendidikan!

SIMBIOSIS SMK DAN INDUSTRI

Industri merupakan sebuah aktivitas yang harus terus bergerak maju sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Industri tidak boleh berhenti apalagi mati. Sejak manusia mengenal kebutuhannya, industri sudah dimulai dari yang paling sederhana sebagai upaya pemenuhan kebutuhan. Kemudian, industri berkembang sehingga mengalami berbagai fase bahkan dari terjadi revolusi dalam industri. Industri terus seirama dengan siklus hidup manusia.

Pekerja merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah ekosistem industri. Bahkan, untuk industri yang paling sederhana pun, pekerja menjadi pelaku aktivitas industri yang penting; apalagi industri besar yang melibatkan hingga ribuan bahkan puluhan ribu pekerja. Bahkan, pada industri besar, sekalipun pekerja masih menjadi kebutuhan utama meskipun industri itu telah menggunakan teknologi robot, tetap saja ada pekerja yang harus mengontrol mesin-mesin itu sehingga berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Dalam sebuah ekosistem industri, pekerja yang dihasilkan oleh institusi SMK

menjadi kelas yang dominan. Beda halnya dengan supervisor yang relevansinya dengan lulusan diploma atau manajer yang relevansinya dengan sarjana. Dengan begitu, segmentasi lulusan diploma dan sarjana tidak begitu banyak menempati posisi dalam berbagai aktivitas industri. Biasanya, pekerja lulusan SMK menjadi pelaksana teknis, misalnya melakukan perakitan mesin pada industri kendaraan, menjadi pelaksana lapangan pada industri pariwisata, dan melakukan pelayanan pada industri jasa. Dalam sebuah ekosistem industri, peran mereka sangat sentral karena mereka menentukan pergerakan produksi di suatu industri. Jika mereka tidak bekerja, produksi suatu industri akan mengalami kerugian. Kita dapat melihat kasus-kasus seperti pemogokan buruh yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pemogokan buruh menjadi mimpi buruk bagi pemilik perusahaan karena produksi mereka terhenti dengan pemogokan tersebut.

Dengan demikian, SMK dan industri menjadi dua hal yang seolah tidak dapat dipisahkan: manunggal. Tentu saja, untuk membuat simbiosis itu menjadi simbiosis mutualisme, simbiosis yang saling menguntungkan, diperlukan sinergitas atas keduanya. Misalnya, pihak industri harus dapat menyerap lulusan SMK dan SMK harus menghasilkan lulusan yang memenuhi kualifikasi industri. Oleh sebab itu, SMK sebagai institusi pendidikan yang mencetak pekerja yang andal dapat menjalin komunikasi dengan pihak industri untuk mendapat informasi tentang kualifikasi pekerja yang dibutuhkan. Selain itu, tentu saja, SMK juga harus memberikan pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi itu.

Prosser A. Charles and Quigley Thos, merupakan bapak Pendidikan Kejuruan (Vocational Education), memberikan enam belas dalil atau prinsip dasar pendidikan kejuruan. Lembaga Pendidikan SMK akan berhasil bila memenuhi enam belas prinsip dasar/dalil tersebut. Adapun prinsip-prinsip dasar pendidikan kejuruan tersebut, yaitu sebagai berikut.

1. *Vocational education will be efficient in proportion as the environment in which the learner is trained is a replica of the environment in which he must subsequently work.* Artinya, lembaga Pendidikan SMK akan efisien apabila disediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan masalah yang sama atau merupakan replika/tiruan terhadap lingkungan industri tempat mereka bekerja.

2. *Effective vocational training can only be given where the training jobs are carried on in the same way which the same operation, the same tool and the same machines in the occupational itself.* Artinya, pembelajaran kejuruan di SMK dapat diberikan secara efektif hanya jika pembelajaran tersebut dilaksanakan dengan cara yang sama, operasi sama, peralatan sama dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan kelak.
3. *Vocational education will be effective in proportion as it trains the individual directly and specifically in the thinking habits and the manipulative habits required in the occupation itself.* Artinya, pendidikan kejuruan di SMK akan efektif apabila individu dilatih secara langsung dan spesifik untuk membiasakan cara bekerja dan berpikir secara teratur.
4. *Vocational education will be effective in proportion as it enables each individual to capitalize his interests, aptitudes and intrinsic intelligence to the highest possible degree.* Artinya, pendidikan Kejuruan di SMK akan efektif jika SMK membantu individu yang belajar di sekolah tersebut untuk mencapai cita-cita, kemampuan, dan keinginan yang lebih tinggi.
5. *That effective vocational education for any profession, calling, trade, occupation or job can only be given to the selected group of individuals who need it, want it and are able to profit by it.* Artinya, pendidikan kejuruan untuk satu jenis keahlian, posisi, dan ketrampilan akan efektif hanya jika diberikan pada kelompok individu yang merasa memerlukan, menginginkan, dan mendapatkan keuntungan dari padanya.
6. *Vocational education will be effective in proportion as the specific training experience for forming right habits of doing and thinking are repeated to the point that the habits developed are those of the finished skill necessary for gainful employment.* Artinya, pendidikan kejuruan akan efektif bila pengalaman penataran yang dilakukan akan melatih membiasakan bekerja dan berpikir secara teratur, sehingga merupakan sarana yang betul-betul diperlukan untuk meningkatkan prestasi kerja.
7. *That vocational education will be effective in proportion as the instructor has successful experience in the application of skill and knowledge to the operation and processes he undertakes to teach.* Artinya, pendidikan

kejuruan yang efektif apabila instruktur telah mempunyai pengalaman yang berhasil di dalam menerapkan ketrampilan dan pengetahuan mengenai operasi dan proses.

8. *For every occupation there is a minimum of productive ability which an individual must possess in order to secure or retain employment in that occupation. If vocational education is not carried to that point with that individual, it is neither personally nor socially effective.* Artinya, untuk setiap jenis pekerjaan, individu minimum harus memiliki kemampuan memproduksi agar bisa mempertahankan diri sebagai karyawan pada pekerjaan tersebut.
9. *Vocational education must recognize condition as they are and must train individuals to meet more efficient ways of conducting the occupation may be known and that better working condition are highly desirable.* Artinya, pendidikan kejuruan harus memahami posisinya di masyarakat; melatih individu untuk memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja dan menciptakan kondisi kerja yang lebih baik.
10. *The effective establishment of process habits in any learner will be secured proportion as the training is given on actual jobs and not on exercises or pseudo jobs.* Artinya, kebiasaan kerja akan terjadi, apabila pendidikan kejuruan memberi pelatihan dengan pekerjaan yang nyata, dan bukan sekadar pekerjaan untuk latihan atau pekerjaan yang bersifat tiruan.
11. *The only reliable source of content for specific training in an occupation is in the experience of master of that occupation.* Artinya, hanya dengan memberi pelatihan yang bersumber dari dunia kerja yang konsisten. Mereka akan memiliki pengalaman tuntas dalam pekerjaan.
12. *For every occupation there is a body of content which is peculiar to that occupation and which practically has no functioning value in any other occupation.* Artinya, untuk setiap jenis pekerjaan, terdapat satu batang tubuh isi, satu materi yang sangat tepat untuk satu jenis pekerjaan, belum tentu cocok untuk pekerjaan yang lain.
13. *Vocational education will render efficient social service in proportion as it needs the specific training needs of any group at the time that they need*

it and in such a way that they can most effectively profit by the instruction. Artinya, pendidikan kejuruan akan menuju pada pelayanan sosial yang efisien apabila diselenggarakan dan diberikan pada manusia yang pada saat itu memerlukan dan mereka mendapat keuntungan dari program tersebut.

14. *Vocational education will be socially efficient in proportion as in its methods of instruction and its personal relation with learner it take into consideration the particular characteristic of any particular group which it serves.* Artinya, pendidikan kejuruan secara sosial akan efisien apabila metode pembelajaran memperhatikan kepribadian siswa dan karakteristik kelompok yang dilayani.
15. *The administration of vocational education will be efficient in proportion as it is elastic and fluid rather than rigid and standardized.* Artinya, administrasi dalam pendidikan kejuruan akan efisien bila dilaksanakan dengan fleksibel, dinamis, dan tidak kaku.
16. *While every reasonable effort should be made to reduce per capita cost, there is a minimum below which effective vocational education cannot be given, and if the course does not permit of this minimum of per capita cost, vocational education should not be attempted.* Artinya, walaupun setiap usaha perlu dilaksanakan sehemat mungkin, pembiayaan pendidikan kejuruan yang kurang dari batas minimum tidak bisa dilaksanakan secara efektif, dan jika pengajaran tidak bisa menjangkau biaya minimumnya, sebaiknya pendidikan kejuruan tidak perlu dilaksanakan.

SMK sebagai sebuah lembaga pendidikan menghasilkan puluhan ribu lulusan setiap tahun. Puluhan ribu lulusan tersebut memerlukan dunia kerja sebagai wadah yang menampung mereka. Berdasarkan pendekatan historis, wadah terbesar yang dapat menampung lulusan SMK adalah dunia industri. Saat lulusan SMK melamar pekerjaan, ia harus memenuhi kualifikasi perusahaan tersebut; ia harus telah matang secara teori dan praktik. Artinya, kemampuan yang dimiliki tidak sebatas teori, tetapi (bahkan) lebih banyak kemampuan praktik. Seperti diketahui bahwa SMK memang didesain menjadi sebuah lembaga pendidikan yang membuat peserta didik untuk

dapat siap melakukan praktik pekerjaan di masing-masing kompetensi keahlian.

Industri terus berkembang dari masa ke masa yang menuntut adanya perkembangan keterampilan para pekerjanya. SMK terus mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman agar para lulusan dapat memasuki dunia kerja sesuai dengan kebutuhan zaman yang ada. Demikian SMK dan industri terbentuk menjadi unsur-unsur yang bersinergi dalam menciptakan suatu simbiosis.

Area Kerja Sama SMK dan Industri

Sebagai dua unsur lembaga yang harus terus bersimbiosis dalam menjawab tantangan perkembangan dunia juga menjawab berbagai pemenuhan kebutuhan manusia, SMK dan industri harus menentukan area kerja sama tersebut. Kerja sama SMK dengan Industri jangan sampai berhenti sampai dengan penandatanganan *memorandum of understanding* (MoU) saja. Setidaknya ada enam area kerja sama yang vital di antara keduanya.



Gambar 10.1 “Enam Area Kerja Sama SMK—Industri”

1) Penyelaras Kurikulum

SMK harus terus meng-*update* dan meng-*upgrade* kurikulumnya sesuai dengan perubahan zaman. Biasanya, siswa atau guru SMK sering berseloroh tentang mesin bubut, “Mesin bubut yang digunakan untuk praktik siswa saat ini adalah mesin bubut yang sudah digunakan sejak praktik kakek saya.” Pesan moralnya adalah bahwa sistem pendidikan kita terus menggunakan pola lama padahal zaman sudah banyak berubah. Memang, hal ini tidak dapat dipukul rata dan merupakan beberapa kasus saja. Namun, jika terus dibiarkan, hal ini akan menjadi sebuah persoalan yang serius.

Pemertahanan pola lama yang sudah tidak relevan dengan kondisi hari ini adalah sebuah kemunduran dalam pendidikan. Dunia terus bergerak maju, zaman terus berkembang, begitu juga pendidikan yang harus terus seirama. Kurikulum pendidikan harus terus disesuaikan agar tetap selaras dengan zaman. Pola lama yang baik dan relevan tetap digunakan, tetapi yang sudah ketinggalan zaman harus mau disesuaikan. Bahkan, jika tidak memungkinkan, pola tersebut harus mau diganti.

Industri sesuai dengan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, selalu dinamis. Dari waktu ke waktu, beberapa kebutuhan manusia terus berubah sehingga industri pun menyesuaikan. Misalnya, industri perangkat audio yang dulu masih menggunakan pita dan piringan, sekarang sudah tidak ada lagi karena masyarakat tidak lagi menggunakan itu. Semuanya sudah beralih ke perangkat digital. Begitu sebaliknya. Ketika akan bepergian, sekarang, masyarakat memudahkan dengan adanya aplikasi transportasi berbasis aplikasi, seperti Gojek dan Grab. Bepergian menjadi semakin mudah karena hanya tinggal tekan tombol aplikasi lalu kendaraan datang menjemput. Industri bidang jasa menjadi semakin luas dengan adanya model pemesanan berbasis aplikasi. Tidak hanya transportasi, industri jasa model ini juga lebih berkembang ke arah daring seperti hotel dan kuliner.

Ketika industri sudah sedemikian jauh perubahannya, SMK sebagai lembaga yang bersimbiosis dengan industri harus memiliki perubahan yang seiring sejalan. Kurikulum yang digunakan SMK harus sesuai dengan tuntutan perubahan-perubahan tersebut. Kurikulum harus terus di-*update* dan di-*upgrade*. SMK harus berani untuk menyesuaikan kompetensi keahlian yang mungkin selama ini sudah dianggap mapan. Bahkan, bukan hanya mengubah, melainkan SMK harus berani memperbarui atau bahkan menghapus mata pelajaran yang sudah tidak relevan lagi dengan dunia industri.

2) Praktik Kerja Industri (Prakerin) Siswa

Praktik kerja industri (prakerin) siswa merupakan sebuah area kerja sama yang juga krusial. Dalam prakerin, siswa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan di bangku sekolah. Prakerin menjadi bekal pengalaman siswa untuk nantinya memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Namun, di wilayah kerja sama, prakerin tidak hanya menjadi bekal pengalaman semata. Dalam proses tersebut, upaya interaksi antara SMK dan industri. SMK berupaya untuk mengenal dunia industri secara nyata.



Gambar 10.2 "Prakerin SMK Prajna Paramita"
Sumber: prajnaparamita.sch.id

SMK dalam konteks ini bukan hanya sebatas siswa, melainkan SMK sebagai sebuah lembaga yang berupaya mengenal mitra simbiosisnya. Demikian juga industri, pelaku industri berupaya mengenal SMK lebih dekat. Pelaku industri berhak mencari tahu kompetensi siswa SMK untuk memasuki industri. Dengan bergabungnya siswa dalam rangka prakerin, pelaku industri dapat mengukur tingkat

aplikasi pengembangan kurikulum yang dilaksanakan di SMK. Pengukuran tersebut dapat menjadi sebuah penilaian tentang kompeten atau tidaknya lulusan SMK untuk memasuki dunia industri.

Kesalahan umum pelaksanaan prakerin adalah lembaga pendidikan SMK tidak mencarikan tempat prakerin yang terbaik sesuai dengan kebutuhan keahlian siswa SMK. Kebanyakan para siswa SMK ditugaskan mencari sendiri tempat prakerin dengan dibekali surat dari lembaga pendidikan SMK. Kondisi inilah yang menjadi kebermaknaan *dual system* SMK melalui prakerin menjadi hilang. Semestinya, sekolah mengirimkan siswanya pada perusahaan yang telah menjalin kerja sama dengan sekolah. Tentu saja, pada tahap awal, SMK harus menjalin kerja sama dengan perusahaan tersebut. Dengan demikian, prakerin akan berjalan dengan efektif.

3) Pengembangan *Teaching Factory* dan *Training Center*

Teaching factory merupakan sebuah upaya peningkatan keterampilan bagi para siswa SMK melalui menarik pola kerja industri ke sekolah sehingga dapat dikatakan juga pabrik di sekolah. *Teaching factory* selain menjadi area kerja sama antara SMK dengan industri juga menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan dunia pendidikan di SMK dengan dunia kerja bidang industri. Ini adalah sebuah konsep pendidikan yang mengurangi kesenjangan informasi dan kompetensi. Tidak hanya berfungsi sebagai ruang pembelajaran, *teaching factory* juga menjadi sebuah unit produksi. Konsepnya disimulasikan dengan situasi yang sebenarnya di industri. Kemudian, cara kerja dan sistem operasinya juga sebagaimana sebuah unit produksi pada umumnya.

Di dalamnya terdapat bagian SDM, pemeliharaan alat, penerapan sistem produksi dari bahan hingga produk, serta perhitungan usahanya. Semuanya dilakukan secara profesional sehingga menjadi pos penghasilan tersendiri untuk sekolah.

Ketika memasuki *teaching factory*, siswa tidak hanya belajar tentang aplikasi teori yang diterima di kelas. Siswa akan merasakan pengalaman dunia kerja yang sesungguhnya yang mengandung nilai disiplin, tanggung jawab, inovasi, kepemimpinan, improvisasi, konsistensi, kerja sama, dan kejujuran sebagai bentuk-bentuk etos kerja.

Sebagai sebuah area kerja sama, *teaching factory* lebih spesifik lagi menjadi

mitra dari industri. Lokasinya berada di lingkungan SMK agar memudahkan pelaksanaan dan pengontrolan. Kemudian sarana produksi merupakan dukungan dari industri. Sistem produksi dilaksanakan sebagaimana produksi di industri mitra. Dengan begitu ketika ada pesanan yang merupakan salah satu bentuk kerja sama juga dari industri mitra, barang produksinya juga memiliki spesifikasi yang sama. Setelah itu, supervisi dan pelatihan juga dilakukan oleh industri mitra karena pihak industri mitralah yang memang bergerak di lapangan.



Gambar 10.3 "Teaching Factory"
Sumber: psmk.kemdikbud.go.id

Teaching factory pada akhirnya menjadi sebuah kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak. Tidak hanya SMK yang menerima dukungan sistem produksi, penghasilan, serta pembekalan pengalaman bagi para siswa, industri juga mendapatkan bibit-bibit pekerja yang kompetensinya sesuai dengan bidang industri mereka.

Demikian halnya *training center* yang merupakan pusat pelatihan bagi para siswa untuk meningkatkan keterampilan *soft skills*. Namun, *training center* tidak sekompleks dan real seperti *teaching factory*. *Training center* dan *teaching factory* memiliki kekurangan dan kelebihan sehingga menjadi dua konsep yang saling menyempurnakan.

Training center lebih berfokus kepada pembekalan keterampilan *soft skills* bagi para siswa SMK yang akan memasuki suatu pekerjaan. Pembekalan tersebut melalui berbagai ajang pelatihan terbatas pada batasan-batasan tertentu. Berikut ini adalah *soft skills* yang dapat dilatih.

a. Komunikasi Interpersonal

Komunikasi meliputi kemampuan mendengarkan, presentasi hingga menulis. Tanpa kemampuan komunikasi yang baik, siswa SMK akan kesulitan untuk menjelaskan sesuatu kepada rekan kerja maupun klien. Belum lagi soal aktivitas *networking* dan pemasaran yang membutuhkan komunikasi. Komunikasi interpersonal lebih menekankan kepada kemampuan untuk menangani konflik, kerja sama, dan menyampaikan pendapat kepada rekan kerja maupun atasan juga krusial untuk menjaga kelancaran perkerjaan.

b. Adaptasi

Dalam hal ini, adaptasi memiliki arti yang luas. Adaptasi bukan hanya beradaptasi dengan orang-orangnya di tempat kerja, melainkan juga dengan budaya perusahaan. Adaptasi dapat dimaknai dengan penyesuaian diri dengan berbagai perubahan yang ada di perusahaan seperti peraturan baru, pemindahan posisi, perubahan kebijakan dan perkembangan target.

c. Manajemen

Kemampuan ini membekali siswa SMK untuk dapat merencanakan dan mengeksekusi tugas yang sudah ditetapkan.

d. Pemecahan Masalah

Permasalahan di dunia kerja berkali lipat lebih menantang daripada permasalahan yang ditemukan selama di SMK. Ada banyak orang cerdas, tetapi tidak semuanya mampu melihat secara jeli akar permasalahan, berpikiran positif, dan kreatif mencari solusi.

Selain itu, *training center* juga membekali para siswa SMK untuk memahami etika dasar bekerja, yaitu

a. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu tidak hanya berhubungan dengan ketepatan jam masuk kantor. Sebagai salah satu aspek penting dalam dunia kerja, ketepatan waktu juga

terkait dengan penyelesaian tugas yang diberikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Jika tidak dapat tepat waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, kegiatan lain dapat terganggu dan merusak alur kerja dari seluruh tim.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas bermakna bahwa lulusan SMK harus bertanggung jawab atas setiap tindakan dan hasilnya dalam berbagai situasi serta menghindari membuat alasan saat sesuatu tidak dapat berjalan sesuai rencana. Kondisi ini mendorong siswa SMK memiliki keberanian mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan menggunakannya sebagai sebuah pembelajaran agar di masa depan ia tidak melakukan kesalahan serupa.

c. Rasa saling menghargai

Kemampuan ini membekali siswa SMK untuk mampu menghormati sesama pegawai, senior dan terutama atasan. Siswa SMK dilatih untuk mendengarkan instruksi atasan dengan saksama; menghormati setiap pendapat dan masukan dari pegawai yang lebih senior maupun atasan.

d. Determinasi Tinggi

Kemampuan ini membekali siswa SMK untuk memiliki *passion*/antusias menghadapi sebuah tantangan dengan menyelesaikan tanggung jawab sesuai dengan tujuan

e. Kerja sama

Kemampuan ini membekali siswa SMK untuk mampu bekerja sama dengan orang lain, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dengan rekan-rekan kerja.

4) Pemagangan Guru/OJT

Guru yang magang atau *on job training* (OJT) merupakan sebuah implementasi kurikulum yang mengedepankan aspek pengajaran bahwa guru tidak hanya membagikan teori, tetapi juga membagikan pengalamannya. OJT sendiri merupakan kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak (SMK dan perusahaan). Bagi SMK, guru yang melakukan OJT ini dapat meningkatkan kompetensi mereka sendiri sehingga menciptakan guru produktif. Bergabungnya guru kepada perusahaan

melalui OJT juga menjadi sebuah proses transfer teknologi. Akan timbul pemerataan keahlian guru SMK untuk mendukung semakin kompetennya para lulusan SMK jika diajar oleh guru-guru yang berbekal pengalaman.



Gambar 10.4 "Guru peserta OJT"
Sumber: psmk.kemdikbud.go.id

Sebuah simulasi produksi merupakan upaya dunia industri dalam mengembangkan industri-industri berbasis SMK. Bagi SMK, simulasi produksi tersebut menjadi sebuah ajang peningkatan kompetensi bagi para siswa karena unit produksi didatangkan ke sekolah. Namun, apa maknanya semua itu tanpa bimbingan guru-guru SMK yang melek teknologi serta adaptif terhadap berbagai perubahannya?

OJT inilah yang merupakan ajang untuk guru SMK dalam mempelajari berbagai teknologi yang akan ditularkan kepada para peserta didik. Selain itu, dengan adaptifnya para guru SMK, guru SMK akan mudah untuk menerapkan berbagai penyesuaian kurikulum. Dengan demikian, tidak akan ada lagi pola pembelajaran lama yang sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi dan dunia industri.

5) Pemanfaatan *Corporate Social Responsibility*



Gambar 10.5 "Siswa SMK Negeri 6 Semarang mengikuti program CSR PT Pertamina dan PT Patra Jasa"

Sumber: jateng.tribunnews.com

Corporate social responsibility (CSR) bukan hanya kepedulian sosial untuk memberikan bantuan sosial begitu saja. CSR dapat digunakan sebagai ajang untuk memberikan edukasi kepada penerima CSR. Namun, yang lebih banyak terlihat, pada kenyataannya, kepedulian tersebut biasanya diberikan dalam berbagai bentuk bantuan yang bersifat temporer. Kebutuhan tersebut berwujud barang konsumsi yang dimulai dari kebutuhan sesaat jangka pendek hingga kebutuhan jangka panjang.

Namun, akan lebih baik jika perusahaan industri juga menjalankan CSR dalam bidang pendidikan SMK. CSR tersebut dapat diwujudkan misalnya dengan memberikan media pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pembelajaran praktis di SMK seperti diwujudkan melalui *teaching factory*. Jika setiap perusahaan memberikan CSR semacam itu kepada SMK-SMK yang ada di sekitarnya, akan begitu banyak SMK yang dapat berakselerasi dalam peningkatan kompetensi para siswa dan para gurunya. Pada kenyataannya, belum banyak perusahaan yang memberikan CSR dalam bentuk edukasi.

6) Sertifikasi

Sertifikasi bagi siswa SMK merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap dunia pendidikan SMK dalam kesiapan memasuki dunia kerja. Dengan adanya program sertifikasi, ada sebuah bukti otentik yang dimiliki para siswa bahwa mereka memiliki kompetensi khusus di bidang tertentu.

Sertifikasi adalah sebuah langkah dalam meningkatkan kualitas lulusan. Bagaimanapun, lulusan SMK dengan berbagai pendekatan praktik telah mengikuti sejumlah peningkatan kompetensi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan industri. Namun, peningkatan kompetensi yang bersifat *soft skill* dan *hard skill* tersebut tidak berbekas tanpa adanya sebuah sertifikasi sebagai bukti dari kompetensi yang dimilikinya.

Sekolah dapat bekerja sama dengan perusahaan industri dalam program sertifikasi tersebut. Sertifikasi ini sebagai bentuk pengukuran kemampuan siswa dalam bidang praktik yang dapat dilakukan di sekolah. Namun, instrumen sertifikasinya merupakan sinergi antara sekolah sebagai pelaksana kurikulum dan perusahaan sebagai pelaku industri. Sertifikasi ini dapat menjadi sebuah langkah yang konkret dalam kerja sama SMK dengan industri. Sertifikasi ini sebagai tindak lanjut dari *prakerin*, *teaching factory*, dan sebagainya yang telah diselenggarakan bersama-sama.

7) Realitas di Lapangan

Sebagai bentuk pengembangan, SMK tidak hanya bekerja sama dengan industri, tetapi juga melibatkan lembaga lainnya. Pada lembaga industri, SMK telah bekerja sama dengan banyak perusahaan industri ternama seperti Kubota, PT Astra Honda Motor, Pertamina Retail, Daihatsu, dan masih banyak lagi. Di luar itu, SMK bekerja sama dengan Kemdikbud, Kemenperin, Kemenaker, dan banyak kementerian yang lain.

Kerja sama yang telah dilakukan seperti program sertifikasi 1 juta tenaga industri oleh Kemenperin. Dalam program sertifikasi ini, sebanyak 308 industri telah melakukan kepada 1.035 SMK. Kemudian sebanyak 25 kompetensi keahlian telah diselenggarakan.

Selain itu, ada program kelas industri dan sertifikasi lulusan Kementerian PUPR. Ada 10 kelas industri yang dilaksanakan serta 2 mobil training unit. Hasilnya, sebanyak 24 lulusan telah tersertifikasi; disusul dengan bursa kerja khusus Kemenaker yang diikuti oleh 2.604 Badan Kerja Khusus (BKK) SMK.

Contoh kerja sama lainnya, 314 industri mendukung pengembangan teaching factory yang diadakan di SMK. Kemudian dilakukan juga pelatihan 1.720 guru produktif bidang TIK, konstruksi, mesin, otomotif, geomatika, retail, dan kecantikan. Terakhir adalah program sertifikasi lulusan yang dilakukan oleh Kemenpar. Program tersebut, pada umumnya, telah berjalan dengan baik meski implementasinya harus ditingkatkan lagi. Sementara itu, dalam implementasi program prakerin, banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, seperti yang telah sedikit disinggung pada bagian sebelumnya.

Seperti yang kita ketahui, prakerin merupakan salah satu fase Dual System pendidikan SMK di bidang praktik kejuruan. Pada fase ini, pendidikan dan pelatihan dilakukan di dunia usaha dan industri untuk meningkatkan kemampuan siswa SMK dalam melakukan praktik serta mendekatkan mereka dengan dunia kerja yang sesungguhnya.

Beberapa hal merupakan target capaian dari pelaksanaan prakerin, yang pertama bertujuan untuk mengimplementasikan pengetahuan selama di sekolah. Pengetahuan yang sifatnya teori tersebut diwujudkan dalam bentuk praktik. Kemudian, hal ini membentuk pola pikir siswa sebagai pekerja, bukan lagi sebagai siswa. Jika siswa hanya berpikir tentang hal-hal yang diterima sebagai materi, pekerja harus memiliki pola pikir konstruktif untuk menyesuaikan dengan dinamika dunia kerja. Selain itu, prakerin juga melatih siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara profesional. Komunikasi yang dilakukan di sekolah cenderung bersifat satu arah yakni siswa hanya 'disuapi' informasi baik bidang akademik maupun non-akademik. Namun, iklim dunia kerja akan memaksa siswa untuk dapat berkomunikasi secara interaktif sehingga siswa aktif bertanya, aktif mencari tahu, dan selalu berupaya untuk berimprovisasi dalam berbagai kesempatan.

Kemudian, prakerin juga ditujukan untuk membentuk etos kerja bagi para siswa. Siswa harus memiliki semangat kerja, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, dan kepemimpinan. Jika di sekolah ada istilah pintar sendiri, dunia

kerja akan membentuk siswa untuk pintar bersama-sama. Tujuan lainnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dasar masing-masing kompetensi keahlian. Tujuan berikutnya adalah menambah keterampilan siswa agar dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari serta membangun kerja sama antara SMK dengan dunia usaha dan industri.

Dengan pemaparan tersebut, ada sebuah garis kesimpulan yang dapat ditarik bahwa prakerin merupakan sebuah kerja profesional. Sebagai kerja profesional, unsur-unsur yang ada di dalamnya pun harus profesional, begitu juga konsep pelaksanaannya. Para siswa harus memosisikan diri sesuai dengan kapasitasnya dalam dunia profesionalisme agar tujuan-tujuan prakerin dapat tercapai. Begitu juga dunia usaha dan industri harus mengakomodasi kebutuhan para siswa dalam masa prakerin. Mereka membutuhkan iklim yang profesional untuk kesiapan memasuki dunia kerja.

Namun, tujuan-tujuan profesional dari penyelenggaraan prakerin tidak selalu tercapai. Ada dua kesalahan baik dari pihak sekolah/siswa maupun dari dunia usaha dan industri. Kesalahan tersebut terutama tentang persepsi.

Di antara tujuan prakerin cukup jelas bahwa prakerin merupakan sebuah fase pendidikan untuk meningkatkan keterampilan siswa sesuai dengan kompetensi keterampilan (KK) masing-masing. Dengan begitu idealnya seorang siswa perhotelan magang di bidang perhotelan dan siswa teknologi informasi magang di bidang teknologi informasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit yang salah tempat dalam melakukan prakerin. Para siswa melakukan prakerin di dunia usaha dan industri yang bidangnya sama sekali tidak sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Hal itu terjadi karena persepsi bahwa prakerin hanyalah sebuah fase untuk menggugurkan kewajiban akademik. Dengan begitu siswa dan sekolah tidak begitu peduli tentang sesuai atau tidaknya bidang prakerin. Bahkan, hal yang membuat lebih miris adalah siswa atau sekolah mencari tempat prakerin yang ada upahnya walaupun bidangnya tidak sesuai, bukan mencari tempat prakerin yang menuntun pengalaman untuk masa depannya setelah lulus.

Begitu pun dunia usaha dan industri yang tidak jarang mempersepsikan prakerin sebagai formalitas belaka. Oleh karena itu, siswa yang sedang prakerin

tidak dibimbing secara profesional di bidang keahliannya. Lebih parah lagi mereka hanya dijadikan pembantu umum yang tugasnya melakukan fotokopi; membuatkan minuman; melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama sekali tidak berhubungan dengan keahliannya, sehingga selama tiga bulan mereka tidak mendapatkan tambahan keterampilan.

**BAB
11**

GOOD SCHOOL GOVERNANCE

Masyarakat menjadi elemen utama dan pertama dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Hak dan kewajiban masyarakat ini diatur dalam Bab IV. Pada bab tersebut, setiap warga negara diberi tanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan (Pasal 6 ayat 2). Selain itu, dalam Bab IV pasal 8, dijelaskan pula bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pada pasal 9, masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Jauh sebelum terbitnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, masyarakat telah berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam sejarah pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan justru didirikan oleh masyarakat. Maka, berdirilah sekolah-sekolah swasta. Namun, kini, sekolah swasta dihadapkan pada berbagai tantangan, apalagi kini, banyak pemerintah

daerah menggratiskan sekolah. Tentu saja, ini menjadi tantangan serius bagi sekolah swasta.

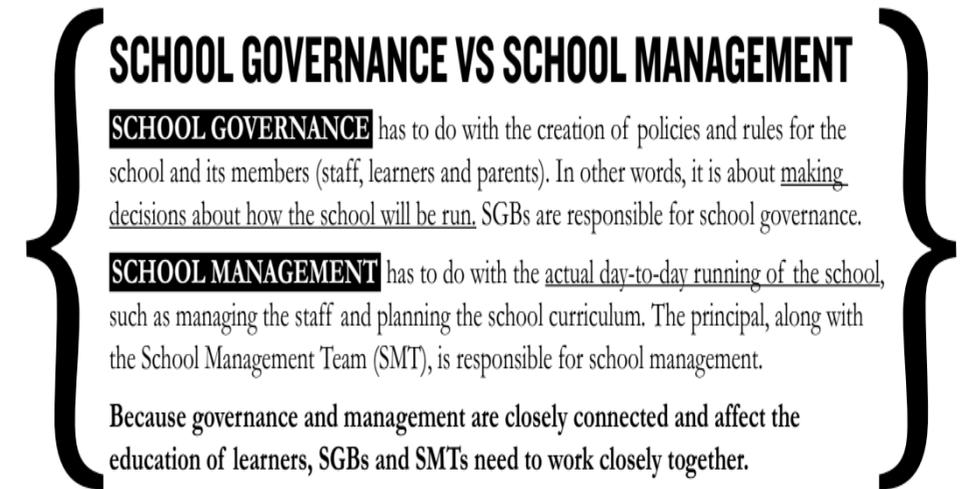
Sekolah swasta seharusnya meningkatkan kualitas mereka di tengah kondisi ini. Namun, justru banyak sekolah yang tutup. Hal ini terjadi karena sekolah swasta gagal mendapatkan murid. Mereka kalah bersaing dengan sekolah negeri atau sekolah swasta yang lebih establish.

Kekalahan dalam persaingan penerimaan siswa baru terjadi karena (1) sekolah negeri tidak membatasi penerimaan siswa di sekolah. Selain itu, hal yang paling krusial adalah bahwa (2) sekolah swasta tidak memiliki kemampuan untuk membangun dan mengembangkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sekolah. Padahal, hal ini sangat penting bagi daya tawar atau nilai jual sekolah.

Persoalan yang kedua ini berkaitan dengan manajemen pengelolaan sekolah. Kualitas sekolah yang sudah *establish* pun akan menurun—yang kemudian akan berdampak pada kuantitas siswa—jika tidak memiliki manajemen sekolah yang baik. Seperti yang kita ketahui, kini, banyak sekolah swasta yang mengalami hal ini padahal mereka telah memiliki reputasi yang baik di mata masyarakat. Namun, karena tidak memiliki manajemen yang baik, akhirnya mereka kalah bersaing dengan sekolah negeri yang sudah semakin baik dan murah, bahkan dengan sekolah swasta lainnya yang telah meningkatkan pelayanan. Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah perlu menerapkan manajemen pengelolaan sekolah yang baik atau dapat disebut *good school governance*.

Pentingnya Good School Governance

Good school governance (GSG) bukan hanya bersifat retorika melainkan sebuah perangkat kebijakan dan peraturan yang idealnya diterapkan. SMK sebagai sebuah pendidikan menengah tentu tidak lepas dari tuntutan untuk menerapkan *good school governance*. Meskipun ada kata *governance* sebagai kunci, GSG tidak hanya mengandalkan penguasa atau dalam hal ini adalah kepala sekolah, dalam menentukan kesuksesan pelaksanaannya. Namun GSG mengandalkan keseluruhan elemen dalam rangka menciptakan iklim ‘pemerintahan’ yang bagus untuk melaksanakan tujuan pendidikan itu sendiri. Konsep GSG berbeda dengan *school management* seperti digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 11.1 “School Governance VS School Management”

Kemudian dalam realisasinya, tidak hanya kepala sekolah yang menentukan berjalannya GSG, melainkan juga pemilik yayasan, pemegang kebijakan, termasuk para guru dan staf sekolah sebagai pelaksana. Semua elemen tersebut harus menjalankan semua fungsinya sehingga membentuk sebuah sistem yang saling terkait. Selain itu, dalam tahap implementasi GSG, ada empat hal yang perlu diperhatikan: (1) *human resource management*, (2) *core business management*, (3) *financial management*, dan (4) *operational support management*.

GSG harus mengelola dan mengatur semua aspek yang menentukan arah sekolah. Pengelolaan yang pertama adalah dalam hal pengorganisasian. Sekolah harus meningkatkan sumber daya manusia dengan berbagai program, misalnya diklat, seminar, dll. sehingga kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya dapat meningkat. Selain itu, sekolah harus mengelola strukturnya dengan baik sehingga mampu menempatkan SDM pada posisi yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

Misalnya, saat merekrut staf atau guru, sekolah harus membentuk tim atau divisi khusus sehingga staf atau guru yang direkrut adalah orang yang benar-benar memenuhi kualifikasi, bukan orang-orang yang terikat hubungan kerabat belaka.

Selain itu, sekolah juga harus memilih orang-orang pada tugas-tugas tertentu dengan demokratis. Misalnya, saat menunjuk panitia untuk suatu kegiatan, sekolah harus melakukan pemilihan sehingga terbentuk iklim yang demokratis di sekolah. Demikian pula saat sekolah membentuk komite sekolah. Orang tua yang terpilih sebagai komite sekolah harus pula dipilih secara demokratis. Artinya, semua elemen yang menuntut tugas dan tanggung jawab harus dilakukan secara demokratis, dari memilih wakil kepala sekolah hingga ketua kelas. Dalam *good school governance*, prinsip demokrasi sangat penting. Dalam iklim demokrasi, setiap individu memiliki hal yang sama. Sekolah tidak boleh membeda-bedakan agama, suku, ras, dan kelompok.

kebijakan yang dirumuskan itu kepada pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung. Setiap keputusan yang dibuat, sekolah harus mempublikasikannya kepada khalayak atau pihak terkait, termasuk siswa. Ketika program atau kebijakan sekolah diimplementasikan, pengawasan harus dilakukan. Sekolah harus terbuka terhadap kritis dan masukan dari berbagai pihak, termasuk siswa.

Kemudian, dalam mengelola finansial, tentu saja, sekolah harus menerapkan prinsip akuntabilitas. Sekolah tidak boleh menutup audit finansial. Dalam hal ini, sekolah dapat memanfaatkan berbagai media untuk memberikan informasi perihal kondisi sekolah, khususnya dalam keuangan, misalnya surat, media sosial, bahkan media elektronik (radio). Dalam pengelolaan finansial, tentu saja, orang-orang yang ada di dalamnya harus bekerja sesuai dengan profesinya secara profesional.

Akuntabilitas ini bukan hanya perihal finansial semata, melainkan juga sosial. Sekolah harus menginformasikan kepada warga sekolah perihal capaian yang telah diraih sekolah, misalnya capaian terhadap visi, prestasi, kemajuan pembangunan, dsb., sehingga warga sekolah atau masyarakat umum mengetahui perkembangan sekolah. Jika perkembangan itu tidak ada atau stagnan, tentu saja, warga sekolah tergerak untuk memperbaiki dan membangun sekolahnya.

Oleh sebab itu, prinsip keterbukaan wajib dimiliki oleh sekolah, termasuk dalam fasilitas pendukung. Untuk mewujudkan *good school governance*, sekolah harus juga menginformasikan perihal sarana dan prasarana yang ada di sekolah termasuk pengelolaan dan perawatannya. Hal ini dapat membuat warga sekolah berperan aktif dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana yang ada di sekolah.

Good governance akan menghasilkan sebuah *good result*. Berbagai pencapaian sekolah akan berindikasi baik berdasarkan pengukuran-pengukuran tertentu yang ditetapkan. Hasil yang baik akan berpengaruh secara jangka panjang. Jika prinsip *good governance* selalu diterapkan, hal itu akan menghasilkan *good culture* bagi sekolah itu sendiri. *Good school governance* tidak mungkin terlaksana tanpa adanya sistem ‘pemerintahan’ yang sehat di dalam sekolah. Sistem pemerintahan yang sehat adalah bentuk lain dari *good culture* yang di antaranya ditandai dengan iklim demokratis yang terbentuk di sekolah. Dengan demikian, visi misi sekolah akan tercapai dengan maksimal.



Gambar 11.2 “Apa Good Governance Sekolah?”

Dalam menjalankan atau mengimplementasikan visi misi, sekolah harus membuat program atau kebijakan. Tentu saja, program dan kebijakan itu tidak boleh keluar dari visi misi sekolah. Keduanya harus berlandaskan pada visi misi sekolah sehingga sekolah tidak kehilangan orientasi. Dalam merumuskan program dan strategi, sekolah harus melibatkan banyak pihak sehingga, iklim demokratis itu benar-benar terbentuk. Sekolah juga harus menginformasikan setiap program dan

GSG Dimulai dari Implementasi RIPS

GSG sebagai sebuah sistem pemerintahan di dalam sekolah adalah salah satu upaya untuk menentukan arah sekolah. Arah yang dimaksud adalah sejalan dengan arus perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri. Namun, *good school governance* sebagai sebuah konsep yang baru tidak betul-betul baru secara utuh. Setiap sekolah dalam pembangunan dan pengembangannya pasti memiliki Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS). RIPS merupakan sebuah rumusan dalam menentukan tujuan sekolah. RIPS inilah yang kemudian menjadi bekal dari penentuan terbentuknya konsep *good school governance*.

Dalam RIPS terdapat visi misi yang harus tercapai. Jika visi misi tersebut telah tercapai, implementasi GSG hanya tinggal meneruskan dan mengembangkan. Dalam implementasi GGS, terdapat berbagai faktor yang harus dipenuhi. Pertama adalah pengaturan tentang konsentrasi bisnis dari sekolah. Sekolah, khususnya SMK, harus memiliki *core business* untuk dapat membentuk kemandirian. Dengan melakukan manajemen bisnis tersebut secara baik, pemerintahan dalam sekolah pun akan berjalan dengan baik juga.

Berikutnya adalah manajemen sumber daya manusia di dalam sekolah. Manajemen sumber daya seperti disinggung sebelumnya baik secara struktural maupun fungsional guru mata pelajaran. Berikutnya adalah manajemen sarana pendukung yang juga harus optimal. Walaupun namanya pendukung, konsep *good school governance* tidak akan berjalan tanpa adanya salah satu faktor seperti sarana pendukung tersebut.

Terakhir, sebagai faktor yang harus menjadi perhatian adalah manajemen keuangan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, sekolah harus mampu mengatur keuangannya secara mandiri dan akuntabel. Jika sekolah memiliki sebuah bidang bisnis, sekolah akan lebih leluasa dalam melakukan pengelolaan keuangan.

Faktor-faktor tersebut pada dasarnya sudah tertuang di dalam Rencana Induk Pengembangan Sekolah baik secara eksplisit maupun secara implisit. Kemudian dengan adanya *good school governance*, terjadi penguatan terhadap RIPS yang dimaksud.

BAB 12

KEMANDIRIAN FINANSIAL SMK

“School finance refers to the process by which revenues and other resources are derived for the formation and operation of elementary and secondary school as well as the process by which those resources are located to school in different geographical areas and to types and level of education.”

--H.M. Levin

Pendapat H.M. Levin di atas sangat relevan dengan kondisi (seharusnya) pendidikan di Indonesia. Bahwa, lembaga pendidikan di Indonesia harus memanfaatkan potensi dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Pemanfaatan potensi itu, pada dasarnya, dilakukan untuk mencapai kemandirian finansial lembaga pendidikan itu sendiri.

Terbitnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (khususnya pasal 56) menjadi tanda bahwa pendidikan Indonesia telah memasuki era baru. Pendidikan Indonesia telah masuk pada periode desentralisasi.

⁷Dalam *Work and Education* (1987).

Pada periode ini, pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dapat menyusun strategi secara mandiri untuk meningkatkan kualitas pendidikannya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Kini, pengelolaan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini menjadi suatu keuntungan karena pemerintah daerah dapat menyusun strategi secara mandiri untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan potensi daerahnya. Dengan demikian, mereka dapat mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing untuk mengejar ketertinggalan dengan daerah lain.

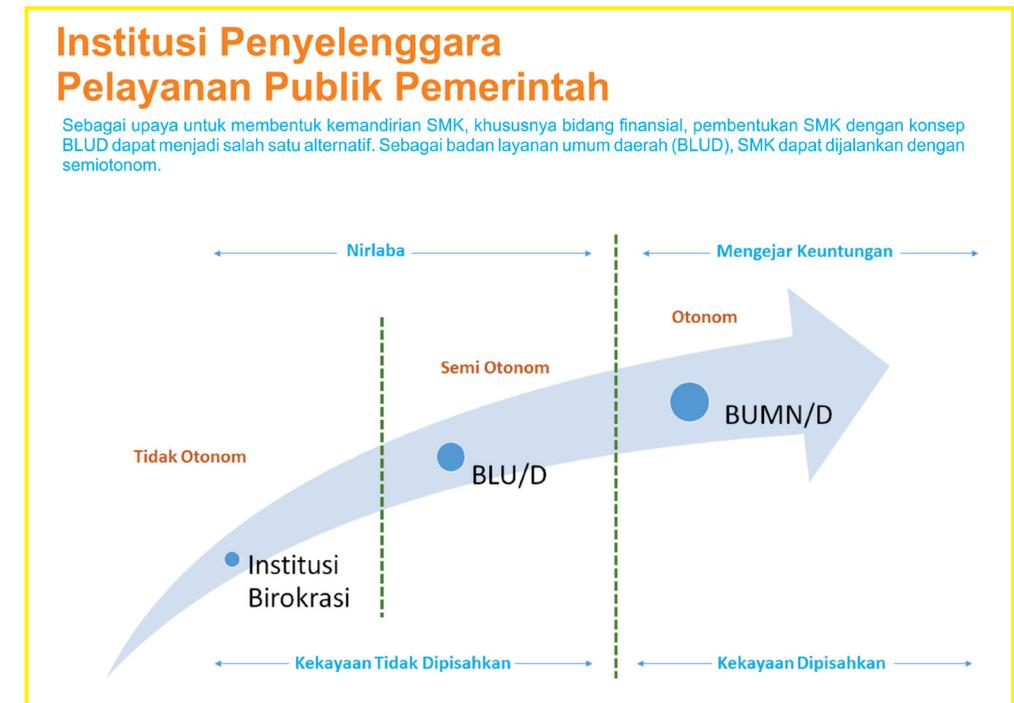
Namun, hal ini menjadi bermasalah pada daerah-daerah yang minim sumber daya alam. Desentralisasi pendidikan ini juga berdampak pada daerah-daerah yang tidak memiliki alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pendidikan karena pada periode desentralisasi ini, anggaran pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Hal ini membuat pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan di daerah harus menyusun strategi sendiri, khususnya kemandirian finansial, untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

SMK Berbentuk Badan Layanan Umum Daerah

Sebagai upaya untuk membentuk kemandirian SMK, khususnya bidang finansial, pembentukan SMK dengan konsep BLUD dapat menjadi salah satu alternatif. Sebagai badan layanan umum daerah (BLUD), SMK dapat dijalankan dengan semi-otonom. Oleh karena itu, SMK tetap mendapat kesempatan untuk menerima berbagai program dukungan dana. Namun, di samping itu, SMK dapat menyelenggarakan sebuah pengelolaan keuangan yang bersifat mandiri dalam lingkungannya. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dinyatakan bahwa BLUD merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah seperti sekolah, rumah sakit, dan sebagainya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Sebagai badan semi-otonom, SMK berkonsep BLUD masih berorientasi nirlaba sehingga tidak dibenarkan jika penyelenggaraannya semata-mata mengejar keuntungan. Konsep ini masih menuntut SMK sebagai badan nirlaba. Dalam konsep

SMK BLUD, SMK dituntut untuk memproduksi. Tentu saja, modal produksi itu didapat bukan dari pemerintah (sepenuhnya). Kemudian, hasil produksi itu dijual kepada masyarakat. Hasil dari penjualan itu, tidak perlu dilaporkan dan disetorkan kepada negara. Hasil dari produksi itu dapat diolah menjadi modal dan dapat juga membantu operasional sekolah.



Gambar 12.1 "Institusi Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah"

Hal ini dapat menjadi pemecahan persoalan yang ada saat ini. Namun, saat ini, SMK tidak mau memproduksi karena keuntungan hasil produksi harus disetorkan kepada negara. Dengan konsep SMK BLUD ini, SMK akan termotivasi untuk memproduksi dan berkembang secara mandiri.

Karakter Utama Badan Layanan Umum Daerah

SMK dengan konsep BLUD harus memiliki karakter-karakter yang sudah menjadi ketentuan. Karakter pertama adalah layanan penyediaan barang dan jasa. Karakter tersebut menuntut SMK untuk menjadi sebuah badan layanan umum

yang selayaknya sebagai bentuk 'layanan'. Dengan demikian, SMK BLUD menjadi penyedia layanan jasa dan barang.

Karakter kedua adalah *non-profit oriented*. Meski sekolah menjual barang dan jasa, hal ini bukan berarti sekolah mencari keuntungan. Keuntungan yang diperoleh sekolah ditujukan untuk kepentingan bersama. Misalnya, suatu sekolah dapat memproduksi komoditas pertanian. Hasil dari penjualan komoditas pertanian tersebut digunakan untuk kegiatan belajar, praktikum, atau sebagai modal produksi. Sekolah tidak boleh mengambil manfaat sepihak dari keuntungan tersebut. Keuntungan itu digunakan dengan asas kepentingan bersama sesuai yang berlaku di satuan kerja terkait.

Karakter ketiga adalah efisien dan produktif. Seperti yang dipaparkan di atas bahwa saat sekolah mampu memproduksi dan menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut dapat digunakan untuk kegiatan belajar atau praktikum sehingga diharapkan biaya operasional untuk kegiatan belajar atau praktikum dapat ditekan. Ini adalah bentuk efisiensi biaya. Selain itu, di saat yang bersamaan, sekolah menjadi produktif karena telah memproduksi barang dan jasa. Hal ini tentu saja menjadi hal yang positif bagi sekolah itu sendiri, baik secara finansial maupun pengembangan sumber daya manusia (siswa) di dalamnya.

Karakter keempat adalah keuangan dikelola secara fleksibel dan SDM dikelola secara fleksibel. Perlu diingat bahwa walaupun ada pembatasan bagi penyelenggaraan SMK dengan konsep BLUD, pembatasan tersebut tidak bersifat harga mati yang secara saklek harus dijalankan oleh SMK. Perlu diingat bahwa SMK BLUD masih semi-otonom. Dengan demikian, kewenangan untuk beberapa aspek penyelenggaraan masih dimiliki oleh sekolah.

Oleh karena itu, penyelenggaraan SMK BLUD, khususnya pengelolaan SDM dan keuangan, tetap fleksibel. Namun, fleksibilitas ini tidak lantas menjadi sesuatu yang tidak memiliki batasan yang pada akhirnya menabrak aturan-aturan. Fleksibilitas tersebut harus tetap dibarengi dengan upaya untuk menjaga karakter SMK BLUD yang tidak lepas dari intervensi aturan. Pakem-pakem tertentu harus tetap diikuti sebagai sebuah kontrol penyelenggaraan kegiatan. Dalam hal ini, akuntabilitas harus tetap dijunjung.

Karakter kelima adalah dikecualikan dari pengelolaan keuangan negara

sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. PP tersebut menjelaskan bahwa instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dengan demikian, karakter yang kelima ini berkaitan atau bahkan menjadi dasar dari karakter-karakter sebelumnya. SMK BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaannya karena dikecualikan dari BLUD lainnya. Namun, SMK BLUD masih tetap memiliki aturan yang menaunginya karena sebagai bagian dari badan layanan yang dimiliki oleh negara harus taat asas dalam pengelolaan dan penyelenggaraannya.

Perbedaan SMK Negeri BLUD dan SMK sebagai Institusi Birokrasi

Ragam Perbedaan Institusi Birokrasi, BLU/D, dan BUMN/D

Terdapat berbagai perbedaan karakter antara institusi birokrasi, BLU/D, dan BUMN/D. Sebagai badan semi otonom, SMK berkonsep BLUD masih berorientasi nirlaba sehingga tidak dibenarkan jika penyelenggaraannya semata-mata mengejar keuntungan. Konsep ini masih menuntut SMK sebagai badan nirlaba.

No	Ragam Perbedaan	Institusi Birokrasi	BLU/D	BUMN/D
1	Status Hukum	Bukan Badan Hukum atau Subjek Hukum	Bukan Badan Hukum atau Subjek Hukum	Badan Hukum atau Subjek Hukum
2	Kekayaan	Tidak Dipisahkan	Tidak Dipisahkan	Dipisahkan
3	Motif	Nirlaba	Nirlaba	Pengejaran Keuntungan
4	Kemandirian	Tidak Otonom	Semi -Otonom	Otonom
5	Pola Pengelolaan Keuangan	Tidak Fleksibel	Tidak Fleksibel	Sangat Fleksibel
6	Sumber Dana	APBN/APBD	APBN/APBD dan Dana Operasional Sendiri (dari konsumen)	Dana Operasional Sendiri (dari konsumen)
7	Sumber Daya Manusia	Pegawai Negeri	Pegawai Negeri dan non Pegawai Negeri (Hybrid)	Non Pegawai Negeri

Gambar 12.2 "Ragam Perbedaan Institusi Birokrasi, BLU/D, dan BUMN/D"

Ada perbedaan aturan penyelenggaraan dan pengelolaan antara SMK negeri BLUD dengan SMK sebagai institusi birokrasi jika dilihat dari beberapa aspek. Pertama dari aspek sumber dana, SMK sebagai institusi birokrasi mendapat

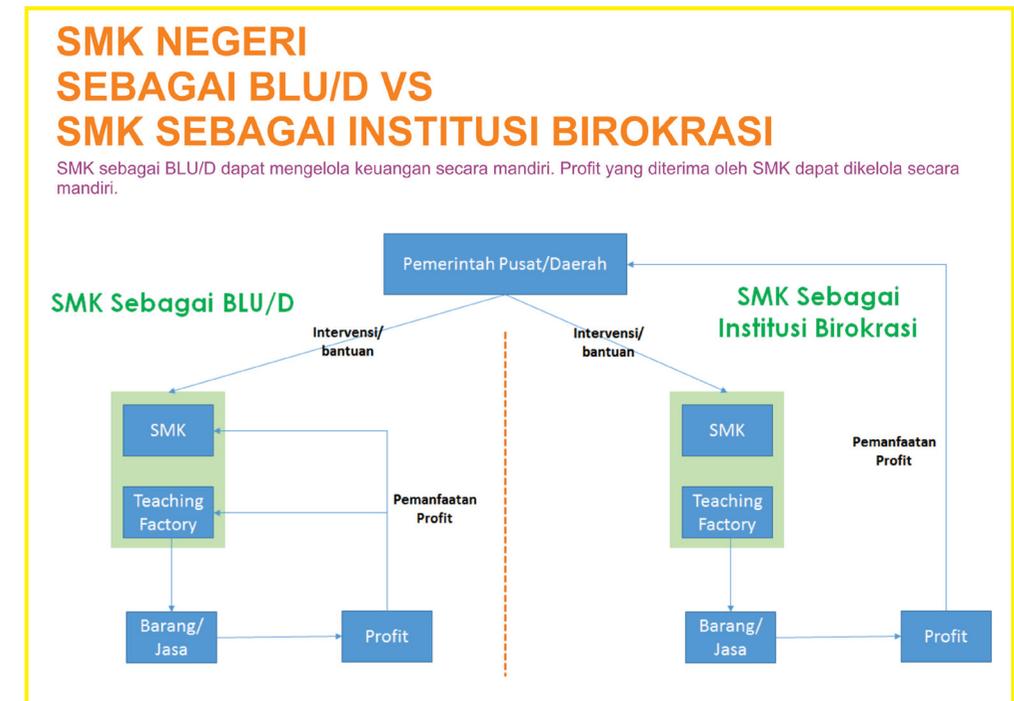
dukungan dana yang murni dari APBN atau APBD. Sementara itu, SMK BLUD selain mendapat dukungan dana dari APBN atau APBD juga memiliki peluang dalam mengelola pendapatan sendiri dari konsumen, misalnya dengan membentuk sebuah unit usaha/produksi.

Kemudian dalam aspek pengelolaan pegawai, SMK sebagai institusi birokrasi memiliki SDM yang bersumber dari PNS sedangkan SMK BLUD memiliki SDM dari PNS maupun dari hasil perekrutan yang dilakukan sendiri. Maka, pada pembahasan karakter di atas dijelaskan bahwa SMK BLUD dalam batasan tertentu memiliki fleksibilitas dalam mengelola SDM yang ada di lingkungannya.

Selain itu, kontrol pemerintah atau intervensi yang dilakukan terhadap SMK birokrasi sangat kuat. Berbeda dengan intervensi pemerintah terhadap SMK BLUD yang cukup longgar. Ini berdampak juga pada penggunaan standar akuntansi. SMK sebagai institusi birokrasi menggunakan standar akuntansi pemerintah sementara SMK BLUD dapat menggunakan standar campuran, yakni standar akuntansi pemerintah sebagai dasar dan standar akuntansi keuangan sebagai pendamping sehingga lebih kompleks juga adaptif.

Terkait dengan penggunaan metode pembelajaran yang mengaplikasikan berbagai pendekatan praktikum, ada perbedaan aturan penyelenggaraan. Seperti sudah dibahas bahwa dalam pendekatan pembelajaran berbasis praktikum, salah satu media yang digunakan adalah *teaching factory*. *Teaching factory* ini merupakan unit usaha atau unit produksi yang dikelola SMK yang tentu saja memiliki keuntungan. Hal ini karena *teaching factory* dikelola secara profesional sebagaimana unit usaha atau unit produksi yang sesungguhnya. Pemanfaatan keuntungan ini akan berbeda antara SMK sebagai institusi dan SMK negeri BLUD jika dilihat dari alurnya.

Sebagai institusi birokrasi, segala pengelolaan keuangan SMK memiliki aturan dan standar sendiri dari pemerintah. Begitu juga keuntungan yang didapatkan dari *teaching factory*. Keuntungan tersebut tidak boleh diambil manfaat oleh SMK. SMK birokrasi masih memiliki sumber dana yang murni dari APBN atau APBD. Oleh karena itu, keuntungan yang didapatkan dari *teaching factory* harus dialirkan kepada APBN atau APBD. Nantinya, dana yang bersumber dari keuntungan tersebut akan dikembalikan lagi kepada SMK birokrasi sebagai bentuk bantuan atau operasional rutin.



Gambar 12.2 "SMK Negeri sebagai BLU/D VS SMK sebagai Institusi Birokrasi"

Berbeda lagi dengan SMK yang diselenggarakan dengan konsep BLUD. SMK BLUD dikelola secara semi-otonom yaitu bersama-sama antara pemerintah dengan sekolah sebagai lembaga. SMK BLUD masih memiliki sumber dana dari pemerintah. Namun, ketika SMK tersebut memiliki sebuah unit usaha atau unit produksi dalam rangka *teaching factory*, keuntungan yang didapatkannya dialokasikan ke dua pos. Pos pertama adalah dikembalikan kepada *teaching factory* sebagai bentuk pemeliharaan. Pos kedua adalah dialokasikan ke sekolah untuk dimanfaatkan menjadi dana operasional maupun dana kegiatan.

SMK Negeri yang Mandiri

Terlepas dari bentuk penyelenggaraan bahkan status sebagai SMK negeri maupun swasta, SMK sebagai lembaga sekolah harus memiliki kemandirian finansial. Dengan memiliki kemandirian finansial, SMK tidak akan hanya bergantung kepada badan penyokong dana saja.

Kemandirian finansial SMK harus didapatkan melalui pendekatan yang

kompetensi keahlian yang dimiliki. Pendekatan ini atas dasar pertimbangan bahwa ketika pengembangan dilakukan terhadap kompetensi keahlian, potensi keberlanjutannya akan cukup besar karena tidak profit semata yang diperhatikan, tetapi keberlanjutan tersebut juga sebagai perhatian terhadap peningkatan keterampilan siswa.

Satu contoh yang paling dekat sebagai sumber kemandirian finansial SMK adalah *teaching factory* yang membuat sebuah unit usaha atau unit produksi. Unit usaha atau unit produksi yang terbentuk secara berkelanjutan akan menjadi akumulasi profit. Jika dikelola berdasarkan transparansi anggaran dan profesionalisme, akumulasi profit ini dapat terus dimanfaatkan keuntungannya dalam jangka panjang.

Sumber kemandirian finansial SMK lainnya yang bisa dioptimalkan adalah kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha tersebut dapat dilakukan oleh elemen siswa, elemen guru, atau oleh elemen sekolah sebagai institusi. Bahkan, akan lebih kuat jika pelaksanaannya menjadi sinergi antar-elemen. Namun, ada hal yang harus terus diperhatikan bahwa pengembangan wirausaha ini harus tetap berkaitan dengan kompetensi keahlian karena merupakan bentuk pengembangan keterampilan untuk para siswa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Akuino C. 2013. Analisis penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata (sektor perdagangan, hotel dan restoran). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 11 (2): 153-167.
- Berlyne DE. 1974. *Aesthetics and Psychobiology*. New York (US): John Wiley & Sons.
- Charles AP. Thos Q. 1950. *Vocational education in a Democracy*. Chicago (US): American Technical Society.
- Ninawati M. 2012. Kajian dampak bilingual terhadap perkembangan kognitif anak sekolah dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar. Jurnal Ilmiah Widya*. 4 (2): 23-27.
- Levin HM. 1987. *Work and Education*. Oxford (UK): Pergamon Press.
- Majid S. 2016. Ambachtschool Surabaya tahun 1853-1942 [Skripsi]. ITS: FIB. <http://repository.unair.ac.id/33189/2/FS.SEJ.18-16%20Maj%20a.pdf>. (diakses pada 16 Agustus 2018).
- Marpaung R. 2017. Memanfaatkan momentum besar sector ritel 2018 [internet]. <https://investor.id/archive/memanfaatkan-momentum-besar-sektor-ritel-2018>. (diakses pada 16 Agustus 2018).
- Mehisto, Peeter. 2011. Navigating management and pedagogical complexities in bilingual education: an Estonian case study [disertasi]. London (UK): Institute of London.
- Mina S. 2019. 21 Pekerjaan yang akan hilang, pekerjaanmu salah satunya? [internet]. <https://techfor.id/21-pekerjaan-yang-akan-hilang/> (diakses pada 20 Juni 2019).
- Mourshed, M., Farrell, D., & Barton, D. 2012. *Education to Employment: Designing a System that Works* [buku-el]. McKinsey Center for Government. https://npeac.memberclicks.net/assets/education%20to%20employment_final.pdf (diakses pada 17 September 2018).
- Pradipto YD. 2007. *Belajar Sejati vs. Kurikulum Nasional: Kontestasi Kekuasaan dalam Pendidikan Dasar*. Yogyakarta (ID): Kanisius.

Singer PW, Cole A. 2015. *Ghost Fleet*. San Diego (US): Houghton Mifflin Harcourt.

Schwab K. 2016. *The Fourth Industrial Revolution*. Jenewa (SZ): World Economic Forum.

Wandasari Y. 2017. Implementasi Gerakan Literasi Sekolah (GLS) sebagai Pembentuk Pendidikan Berkarakter. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*. 1(1): 325-343.

Dokumen

[Inpres] Instruksi Presiden No 9/2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).Perdirjen No 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

[Perpres] Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

[PP] Peraturan Pemerintah No.41 /2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.

[PP] Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

[SK] Surat Keputusan Dirjen No. 4678/D/KEP/MK/2016 tentang Standar Nilai Pendidikan.

Surat Edaran Direktur PSMK No 4540/D5.3/TU/2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

[UU] Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[UU] Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Internet

Bisnis.com. 2018. Industri kesulitan cari tenaga terampil. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180515/98/795498/industri-kesulitan-cari-tenaga-terampil-logistik>.

Detik.com. 2018. Startup ini jadi tempat kursusnya anak-anak start-up. <https://inet.detik.com/business/d-4043223/startup-ini-jadi-tempat-kursusnya-anak-anak-startup>.

Harian Analisa. 2016. Industri hotel dan restoran berkembang pesat. <http://harian>.

analisedaily.com/ekonomi/news/industri-hotel-dan-restoran-berkembang-pesat/253621/2016/08/01.

Liputan6.com. 2016. Siswa SMK bias jadi tulang punggung lahirnya startup di RI. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2497394/siswa-smk-bisa-jadi-tulang-punggung-lahirnya-startup-di-ri>.

Pesbisnisdigital.com. 2018. Bisnis Paytren. <https://www.pesbisnisdigital.id/bisnis-paytren/> (diakses pada 16 Agustus 2018).

Pragiwaksono P. 2016. Kenapa beli Adidas Ace 16 Pure Control? [internet]. <https://www.youtube.com/watch?v=VjiXOkosciY> (diakses pada 3 September 2018).

Republika. 2016. Industri Otomotif kekurangan tenaga ahli. <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/16/11/30/oheslv416-industri-otomotif-kekurangan-tenaga-ahli>. (diakses pada 6 September 2018).

Republika. 2016. Survei minat baca pelajar kota bogor rendah. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/07/13/oa9bbm365-survei-minat-baca-pelajar-kota-bogor-rendah>. (diakses pada 6 September 2018).

BIOGRAFI PENULIS



Arie Wibowo Khurniawan merupakan sosok generasi muda yang sangat mencintai sepenuh jiwa pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Baginya, memperjuangkan kesuksesan sebuah SMK merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat kelas menengah dan bawah melalui penguasaan *skill/keterampilan* kejuruan yang kompeten.

Penulis lahir di Jakarta, 3 Desember 1980. Penulis sudah meniti kariernya

sebagai birokrat sejak tahun 2004 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (Dikmenjur) pada waktu itu dan saat ini bernama Direktorat Pembinaan SMK. Beberapa jabatan pernah didudukinya, yaitu Kasubbag Program dan Anggaran (2011-2014), Kasubbag Data dan Infomasi (2014-2015), Kepala Seksi Program (2014-2015) dan Kasubdit Program dan Evaluasi (2016-sekarang).

Pendidikan Formal yang dimiliki adalah Sarjana Statistika dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Magister Akuntansi konsentrasi Pemerintahan dari Universitas Indonesia (UI) dan serentak dalam menjalankan tugas jabatan beliau sedang mengambil program Doktor dari Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB-IPB)

Aktivitasnya saat ini turut serta dalam melakukan perancangan Strategi Revitalisasi SMK yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sela-sela waktu kesibukannya, beliau menyempatkan diri berbagi ilmu dan pengalaman terkait pengembangan SMK melalui tulisan dan juga aktif sebagai pembicara revitalisasi SMK pada seluruh Provinsi di Indonesia.